



Katalog: 4401002
ISSN 2089-5291

STATISTIK KRIMINAL 2023

Volume 14, 2023



BADAN PUSAT STATISTIK

Katalog: 4401002
ISSN 2089-5291

STATISTIK KRIMINAL 2023

Volume 14, 2023

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Statistik Kriminal 2023

Volume 14, 2023

Katalog: 4401002

ISSN: 2089-5291

Nomor Publikasi: 04300.2306

Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm

Jumlah Halaman: xxxii+209 halaman

Penyusun Naskah:

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Penyunting:

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Pembuat Kover:

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi:

freepik.com, flaticon.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.





ISSN 2089-5291

Tim Penyusun

Statistik Kriminal 2023

Volume 14, 2023

Pengarah:

Dr. Ateng Hartono, SE., M.Si.

Penanggung Jawab:

Dr. Nurma Midayanti, S.Si., M.Env.Sc.

Editor:

Trophy Endah Rahayu, S.ST., M.Si.

Dr. Nenden Budiarti, SST., S.E., M.Si.

Devy Setiyowati, S.Si., M.Si.

Pengolah Data dan Penulis Naskah:

Diane Putri Prahastiwi, SST., M.E.K.K.

Riska Andianti, SST.

Riyana Dewi, S.ST.

Novita Sari, S.Tr.Stat.

Penata Letak:

Novita Sari, S.Tr.Stat.

Kata Pengantar

Statistik kriminal merupakan salah satu aspek kunci yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas pariwisata dan ekonomi. Statistik kriminal yang *valid*, *reliable*, dan *sustainable* akan bermanfaat bagi berbagai pihak.

Publikasi Statistik Kriminal 2023 merupakan publikasi yang diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan data kriminalitas di Indonesia antarwaktu. Penerbitan publikasi ini akan sangat bermanfaat untuk memonitor pelaksanaan, perkembangan, dan pencapaian program-program pembangunan, khususnya dalam bidang keamanan.

Data yang disajikan pada publikasi ini berasal dari tiga sumber, yaitu data registrasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Pendataan Potensi Desa (Podes) yang dihasilkan oleh BPS. Ketiga jenis data tersebut tidak dapat secara langsung dibandingkan karena cara pendekatan pengumpulan data yang berbeda, tetapi bisa saling melengkapi (komplementer).

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan sehingga publikasi ini dapat diterbitkan. Semoga data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pengambil keputusan sebagai acuan atau rujukan dalam rangka penyusunan arah dan kebijakan pembangunan nasional, terutama pembangunan dan perbaikan publikasi di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2023
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik



Amalia Adininggar Widyasanti

Ringkasan Eksekutif

Publikasi Statistik Kriminal 2023 memberikan gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Data ini menjadi dasar untuk merencanakan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan hukum dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan dalam publikasi ini mencakup tiga aspek utama statistik kriminal, yaitu pelaku (Data Registrasi Kepolisian), korban (Data Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas), dan kewilayahan (Pendataan Potensi Desa/Podes).

Data registrasi Polri menunjukkan fluktuasi jumlah kejahatan di Indonesia. Total kejadian kejahatan pada tahun 2020 mencapai 247.218 kejadian, kemudian mengalami penurunan menjadi 239.481 kejadian pada tahun 2021. Namun, tren penurunan tersebut tidak berlangsung lama karena terjadi peningkatan signifikan di tahun 2022, yaitu mencapai 372.965 kejadian. Tingkat kejahatan (*crime rate*) juga mengalami pola yang serupa. Pada tahun 2020, *crime rate* mencapai 94, kemudian menurun menjadi 90 pada tahun 2021, namun melonjak menjadi 137 di tahun 2022. Selain itu, interval waktu terjadinya kejahatan (*crime clock*) adalah 00.02'07" pada tahun 2020, lalu menjadi 00.02'11" pada tahun 2021, dan semakin pendek menjadi 00.01'24" di tahun 2022. Penurunan interval *crime clock* di tahun 2022 menunjukkan peningkatan intensitas kejadian tindak kejahatan.

Berdasarkan data survei, persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan selama periode tahun 2020–2022 menunjukkan pola serupa dengan data registrasi kepolisian. Persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan mengalami penurunan dari 0,78 persen di tahun 2020 menjadi 0,47 persen di tahun 2021, tetapi meningkat menjadi 0,53 persen di tahun 2022. Meskipun demikian, tingkat pelaporan ke polisi (*police report rate*) setiap tahun masih tergolong rendah. Selama periode 2020–2022, persentase korban kejahatan yang melapor ke polisi masih relatif rendah dan cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir, dari yang semula sebanyak 23,46 persen di tahun 2020 menjadi 23,31 persen di tahun 2021 dan terus menurun hingga menjadi 22,98 persen di tahun 2022.

Data Potensi Desa yang berfokus pada kejadian kejahatan di tingkat desa/kelurahan, memperlihatkan bahwa pencurian menjadi jenis kejahatan yang paling sering terjadi sepanjang periode 2014–2021, yaitu berada pada kisaran 26–45 persen dari total desa/kelurahan di Indonesia.

Daftar Isi

Statistik Kriminal 2023

Volume 14, 2023

Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xv
Penjelasan Umum	xxiii
Penjelasan Teknis	xxv
 BAB I Pendahuluan	 1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Sistematika Penyajian	5
 BAB II Kejadian Kejahatan	 7
2.1 Angka Kejahatan Nasional	9
2.2 Angka Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah (Polda)	11
2.3 Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi	13
2.4 Kejahatan Terhadap Nyawa	15
2.5 Kejahatan Terhadap Fisik/Badan	17
2.6 Kejahatan Terhadap Kesusilaan	19
2.7 Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang	21
2.8 Kejahatan Terhadap Hak/milik dengan Penggunaan Kekerasan	23
2.9 Kejahatan Terhadap Hak/milik tanpa Penggunaan Kekerasan	25
2.10 Kejahatan Terkait Narkotika	27
2.11 Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi	29
2.12 Gambaran Kejadian Kejahatan Secara Kewilayahan	30
2.13 Perkelahian Massal	36
2.14 Upaya Menjaga Keamanan	41
 BAB III Korban Kejahatan	 45
3.1 Penduduk Korban Kejahatan	47

3.2 Tingkat Pelaporan	54
3.3 Bantuan Hukum bagi Korban Kejahatan	57
BAB IV Indikator <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Terkait Keamanan ..	61
Daftar Pustaka	75
Lampiran	79

<https://www.bps.go.id>

Daftar Gambar

II. Kejadian Kejahatan

2.1	Jumlah Kejahatan dan Tingkat Risiko Kejahatan, 2020–2022	10
2.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan, 2020–2022	10
2.3	Jumlah Kejahatan yang dilaporkan Menurut Kepolisian Daerah, 2022	11
2.4	Tingkat Risiko Terkena Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2022	12
2.5	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa, 2018–2022	15
2.6	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa Menurut Kepolisian Daerah, 2022	16
2.7	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan, 2018–2022	17
2.8	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan Menurut Kepolisian Daerah, 2022	18
2.9	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan, 2018–2022	19
2.10	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan Menurut Kepolisian Daerah, 2022	20
2.11	Jumlah Kejadian dan Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, 2018–2022	21
2.12	Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Menurut Kepolisian Daerah, 2022	22
2.13	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan, 2018–2022	23
2.14	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan Menurut Kepolisian Daerah, 2022	24
2.15	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang Tanpa Penggunaan Kekerasan, 2018–2022	25
2.16	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang Tanpa Penggunaan Kekerasan Menurut Kepolisian Daerah, 2022	26
2.17	Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika, 2018 – 2022	27
2.18	Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika Menurut Kepolisian Daerah, 2022	28

2.19 Jumlah Kejadian Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi, 2018–2022	29
2.20 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi Menurut Kepolisian Daerah, 2022	30
2.21 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, 2014, 2018, dan 2021 ...	31
2.22 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021	32
2.23 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021	33
2.24 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021	33
2.25 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian (Tanpa Kekerasan) Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021	34
2.26 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021	35
2.27 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021	36
2.28 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal, 2014, 2018, dan 2021	37
2.29 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Tipenya, 2014, 2018, dan 2021	38
2.30 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Penyelesaiannya, 2014, 2018, dan 2021	39
2.31 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021	40
2.32 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021	41
2.33 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2014, 2018, dan 2021	42

2.34	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi, 2021	43
2.35	Persentase Desa/Kelurahan yang Tidak Memiliki Pos Polisi Menurut Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat, 2021	44

III. Korban Kejahatan

3.1	Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan, 2020–2022	48
3.2	Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan yang Dialami, 2020–2022	49
3.3	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin, 2020–2022	50
3.4	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Umur, 2020–2022	50
3.5	Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Provinsi, 2020–2022	51
3.6	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Provinsi, 2022	52
3.7	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Umur dan Provinsi, 2022	53
3.8	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi, 2020–2022	55
3.9	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Berdasarkan Provinsi, 2020–2022	56
3.10	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi dan Mendapatkan/Ditemani Bantuan Hukum, 2020–2022	57
3.11	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi dan Mendapatkan/Ditemani Bantuan Hukum Berdasarkan Provinsi, 2020–2022	58

IV. Indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terkait Keamanan

4.1	Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir, 2018–2022	66
4.2	Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, 2020	68

4.3	Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan kepada Polisi, 2018–2022	69
4.4	Perkembangan IPAK, 2012–2023	71
4.5	Persentase Masyarakat yang Pernah Berurusan dengan Layanan Publik dan Mengeluarkan Uang/Barang/Fasilitas Melebihi Ketentuan, 2020–2023	72
4.6	Persentase Masyarakat Pelaku Usaha yang Pernah Berurusan dengan Layanan Publik dan Mengeluarkan Uang/Barang/Fasilitas Melebihi Ketentuan, 2020–2023	73

<https://www.bps.go.id>

Daftar Lampiran

II. KEJADIAN KEJAHATAN

Sumber Data: Kepolisian RI

Lampiran 1	Indikator Kriminalitas Nasional, 2020–2022	83
Lampiran 2	Peringkat Polda Menurut Jumlah Kejahatan dan Risiko Penduduk Terkena Kejahatan, 2022	84
Lampiran 3	Jumlah Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2020–2022	85
Lampiran 4	Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan Menurut Kepolisian Daerah, 2020–2022	86
Lampiran 5	Persentase Penyelesaian Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2020–2022	87
Lampiran 6	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2020–2022	88
Lampiran 7	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Daerah, 2020–2022	89
Lampiran 8	Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok Jenis Kejahatan, 2020–2022	90
Lampiran 9	Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan, 2022	91
Lampiran 10	Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2020	95
Lampiran 11	Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2021	101
Lampiran 12	Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2022	107

Sumber Data: Potensi Desa (Kejadian Kejahatan)

Lampiran 13	Jumlah Desa/Kelurahan, 2014, 2018, dan 2021	114
Lampiran 14	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, 2014, 2018, dan 2021	115
Lampiran 15	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan	

	Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	116
Lampiran 16	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	117
Lampiran 17	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	118
Lampiran 18	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	119
Lampiran 19	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	120
Lampiran 20	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	121
Lampiran 21	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	122
Lampiran 22	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	123
Lampiran 23	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	124
Lampiran 24	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	125
Lampiran 25	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	126
Lampiran 26	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	127

Lampiran 27	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	128
Lampiran 28	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	129
Lampiran 29	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	130
Lampiran 30	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	131
Lampiran 31	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	132
Lampiran 32	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	133
Lampiran 33	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	134
Lampiran 34	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	135

Sumber Data: Potensi Data (Konflik Massal)

Lampiran 35	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia Menurut Beberapa Karakteristik Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014, 2018, dan 2021	138
Lampiran 36	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	139
Lampiran 37	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014	140

Lampiran 38	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018	142
Lampiran 39	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2021	144
Lampiran 40	Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014	146
Lampiran 41	Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018	148
Lampiran 42	Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2021	150
Lampiran 43	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal dan Mampu Menyelesaikannya Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	152

Sumber Data: Potensi Data (Upaya Menjaga Keamanan)

Lampiran 44	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2014, 2018, dan 2021	154
Lampiran 45	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2014	155
Lampiran 46	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2018	156
Lampiran 47	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2021	158
Lampiran 48	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2014	160
Lampiran 49	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2018	161
Lampiran 50	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2021	163

Lampiran 51	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membangun Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	165
Lampiran 52	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membentuk Regu Keamanan Lingkungan Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	166
Lampiran 53	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Menambah Anggota Hansip/ Linmas Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	167
Lampiran 54	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Memeriksa Setiap Warga Luar Desa yang Masuk (Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan) Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	168
Lampiran 55	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2014	169
Lampiran 56	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2018	170
Lampiran 57	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2021	171
Lampiran 58	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2014	172
Lampiran 59	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2018	173
Lampiran 60	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2021	174

III. KORBAN KEJAHATAN

Sumber Data: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Lampiran 61	Persentase Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan yang Dialami, 2020–2022	176
Lampiran 62	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2020–2022	177
Lampiran 63	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Jenis	

	Kelamin, 2020–2022	178
Lampiran 64	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Kelompok Umur, 2020–2022	179
Lampiran 65	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2020–2022	180
Lampiran 66	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Penganiayaan Menurut Provinsi, 2020–2022	181
Lampiran 67	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Menurut Provinsi, 2020–2022	182
Lampiran 68	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pelecehan Seksual dengan Kekerasan Menurut Provinsi, 2020–2022	183
Lampiran 69	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Lainnya Menurut Provinsi, 2020–2022	184
Lampiran 70	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2020–2022	185
Lampiran 71	Persentase Penduduk yang Pernah Melapor dan Mendapatkan/ Ditemani Bantuan Hukum Menurut Provinsi, 2020–2022	186
Lampiran 72	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melapor ke Polisi Menurut Jenis Kejahatan dan Provinsi, 2020–2022	187

IV. INDIKATOR *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) TERKAIT KEAMANAN

Sumber Data: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Lampiran 73	Persentase Tingkat Kekhawatiran Rumah Tangga Berjalan Sendirian di Siang Hari Menurut Provinsi, 2020	190
Lampiran 74	Persentase Tingkat Kekhawatiran Rumah Tangga Berjalan Sendirian di Malam Hari Menurut Provinsi, 2020	191
Lampiran 75	Persentase Tingkat Kekhawatiran Rumah Tangga Berkendara (Sepeda, Sepeda Motor, Mobil) Sendirian di Malam Hari Menurut Provinsi, 2020	192
Lampiran 76	Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir, 2020–2022	194
Lampiran 77	Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, 2020	195

Lampiran 78	Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan kepada Polisi, 2020–2022	196
-------------	--	-----

ESTIMASI SAMPLING ERROR

Lampiran 79	Estimasi <i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2022	198
Lampiran 80	Estimasi <i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Korban Kejahatan Laki-Laki Menurut Provinsi, 2022	200
Lampiran 81	Estimasi <i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Korban Kejahatan Perempuan Menurut Provinsi, 2022	202
Lampiran 82	Estimasi <i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2022	204
Lampiran 83	Estimasi <i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2022	206
Lampiran 84	Estimasi <i>Sampling Error</i> Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, 2020	208

Penjelasan Umum

Pada publikasi ini, terdapat beberapa tanda/symbol yang digunakan. Berikut adalah penjelasan terkait penggunaan tanda/symbol tersebut:

Data tidak tersedia : ...
Tidak ada atau nol : -
Data dapat diabaikan : 0
Tanda desimal : ,
Angka diperbaiki : r

<https://www.bps.go.id>

Penjelasan Teknis

Jenis dan Sumber Data

Publikasi ini menggunakan tiga sumber data yang berbeda, yaitu:

1. Data karakteristik kejadian kejahatan yang bersumber dari Laporan dan Evaluasi Situasi Kamtibmas yang diterbitkan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) Tahun 2020, 2021, dan 2022;
2. Data korban kejahatan yang bersumber dari Susenas Tahun 2021, 2022, dan 2023; dan
3. Data jumlah dan persentase desa/kelurahan menurut kejadian kejahatan, kejadian konflik massal dan karakteristiknya, serta upaya dalam menjaga keamanan, bersumber dari Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014, 2018, dan 2021.

Laporan Evaluasi Data Kriminalitas Polri

Laporan Evaluasi Data Kriminalitas Polri merupakan laporan tahunan Mabes Polri yang menyajikan gambaran mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pada level nasional dan provinsi. Laporan yang disajikan meliputi aspek kejahatan/kriminalitas dan bukan kejahatan. Data kriminalitas yang disajikan meliputi karakteristik kejadian kejahatan, pelaku, dan jumlah kerugian.

Data kriminalitas ini hanya mencakup seluruh peristiwa atau kejadian kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat, atau aksi kriminalitas yang pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Mengingat masih tingginya keengganan masyarakat untuk melapor, diduga data yang dihasilkan cenderung "*underestimate*". Artinya, kejadian kriminalitas yang sesungguhnya diduga lebih besar dari yang dilaporkan. Dengan kata lain, angka gelap (*dark number*) kejahatan masih relatif besar.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2021–2023

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan survei yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala setiap tahun. Data Susenas mencakup dua kelompok data, yaitu Kor dan Modul. Data Kor mencakup data pokok dari beberapa aspek kesejahteraan rakyat, termasuk kriminalitas. Data kriminalitas yang dikumpulkan adalah data jumlah dan karakteristik rumah tangga/

individu yang menjadi korban kejahatan. Jumlah sampel Kor Susenas adalah sebanyak 300.000 rumah tangga, sehingga bisa dilakukan estimasi hingga level kabupaten/kota.

Data yang dikumpulkan dalam Modul Susenas hanya terfokus pada salah satu aspek kesejahteraan rakyat. Namun demikian, cakupannya lebih lengkap dan lebih rinci dibandingkan dengan data serupa yang dicakup dalam Kor. Modul Susenas umumnya diberi nama sesuai dengan aspek yang menjadi fokusnya, misalnya Modul Kesehatan dan Perumahan, Modul Sosial Budaya dan Pendidikan, serta Modul Ketahanan Sosial. Data Modul Susenas dikumpulkan setiap tahun dan untuk modul yang sama akan berulang setiap tiga tahun sekali. Jumlah sampel Modul Susenas adalah sebanyak 75.000 rumah tangga, sehingga hanya dimungkinkan untuk menghasilkan estimasi hingga wilayah provinsi.

Sejak pertama kali kegiatan Susenas diselenggarakan tahun 1963, Susenas telah memiliki modul kriminalitas. Modul ini mencakup data-data kriminal secara lengkap dan rinci dengan pendekatan korban rumah tangga/individu. Data yang dikumpulkan meliputi data jenis dan frekuensi kejahatan, pelaku kejahatan, akibat yang ditimbulkan secara fisik maupun psikis, serta kerugian yang diderita. Namun, karena beberapa hal, modul kriminalitas sejak tahun 1995 tidak dilakukan lagi.

Pada 2015, demi penyempurnaan alat ukur dan agar survei korban bisa semakin akurat dalam menangkap pengalaman individu, dilakukan perubahan dalam instrumen Susenas Kor. Sebelumnya, hanya terdapat empat jenis kejahatan yang terdapat di Susenas Kor yakni pencurian, pencurian dengan kekerasan, penipuan, dan lainnya. Sementara pada 2015, BPS melakukan perluasan cakupan instrumen menjadi lima jenis kejahatan yakni pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, dan lainnya.

Perubahan ini menjadikan data Susenas bisa menangkap lebih banyak pengalaman korban kejahatan. Namun, implikasinya pengguna data tidak bisa serta merta melakukan perbandingan antara data hasil Susenas 2015 dengan data tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada jumlah kejahatan berdasarkan jenisnya. Data Susenas 2021 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2020, Susenas 2022 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2021, dan Susenas 2023 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2022.

Statistik Potensi Desa (Podes) 2014, 2018, dan 2021

Data Statistik Potensi Desa (Podes) merupakan satu-satunya data kewilayahan yang dikumpulkan BPS. Pendataan Potensi Desa (Podes) dilakukan di seluruh desa/kelurahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk desa persiapan, desa definitif, Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT), Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Pemukiman Masyarakat Terasing (SPMT). Responden untuk Pendataan Podes adalah Kepala Desa/Lurah atau aparat desa/kelurahan lainnya dan narasumber lainnya, seperti petugas kesehatan yang bertugas di desa/kelurahan (dokter puskesmas/bidan desa), guru/kepala sekolah, Petugas Penyuluh Pertanian (PPL), dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Salah satu fungsi Pendataan Podes adalah menyajikan data atau informasi tentang desa/kelurahan untuk memenuhi keperluan perencanaan kegiatan sensus. Data atau informasi tersebut antara lain adalah tentang luas wilayah, jumlah RW, jumlah RT, dan satuan lingkungan setempat (SLS) yang merupakan bagian wilayah desa/kelurahan beserta batas-batas wilayahnya, keadaan geografis, keadaan topografis, jumlah dan struktur penduduk, dan struktur perekonomian. Sejalan dengan fungsinya tersebut, pelaksanaan Pendataan Podes biasanya dilakukan menjelang penyelenggaraan suatu sensus.

Data yang dikumpulkan dalam Podes juga mencakup data tentang jenis dan jumlah fasilitas umum yang ada di desa/kelurahan, baik fasilitas sosial seperti posyandu, puskesmas, sekolah, masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya, maupun fasilitas ekonomi seperti pasar, pertokoan, supermarket, KUD, sarana transportasi, bank, dan lembaga keuangan/perkreditan lainnya. Pendataan Podes juga mencakup pengumpulan data tentang jenis dan jumlah kejadian-kejadian penting yang sedang atau pernah terjadi di desa, seperti jenis dan jumlah bencana alam, wabah penyakit, kejadian kejahatan, dan konflik massal, baik antarwarga desa maupun antardesa.

Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, penjelasan mengenai konsep dan definisi pada bagian ini akan diuraikan sesuai dengan urutan sumber data.

Konsep-Konsep Kriminalitas dalam Polri

A. Peristiwa Kejahatan (Kriminalitas)/Pelanggaran

1. Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
2. Peristiwa yang dilaporkan adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindak-lanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.
3. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah:
 - Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa;
 - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang;
 - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichtmatigheid* (setiap tindakan polisi sudah dianggap sah berdasarkan atau bersumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum);
 - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian;
 - Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia; dan
 - Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

B. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan
- Orang yang turut melakukan kejahatan
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan
- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan

C. Tahanan

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari.

D. Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak, atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

E. Korban

Korban kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

Konsep-Konsep Kejahatan dalam Susenas dan Podes

A. Kejahatan

Konsep dan definisi kejahatan yang digunakan dalam Susenas dan Podes pada dasarnya merujuk pada konsep kejahatan yang digunakan oleh Polri maupun KUHP. Namun, karena konsep ini ditanyakan pada responden yang umumnya awam tentang hukum, pengertian tentang konsep kejahatan ini lebih didasarkan pada pengakuan, pemahaman, dan persepsi responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya. Sejalan dengan itu, jenis-jenis tindak kejahatan yang dicakup Susenas atau Podes lebih fokus pada jenis kejahatan yang dikenal masyarakat, misalnya perampokan untuk menggantikan konsep pencurian dengan kekerasan yang biasa digunakan Polri.

B. Korban Kejahatan

Konsep korban kejahatan dalam Susenas adalah korban/sasaran dari tindak kejahatan yang terjadi dalam rentang waktu selama setahun yang lalu. Korban kejahatan dalam Susenas dikelompokkan menjadi dua klasifikasi, yaitu rumah tangga dan individu. Penentuan kriteria korban kejahatan ini hanya berdasarkan pada pengakuan responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya.

Klasifikasi korban kejahatan menurut umur:

- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 18 tahun
- Dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun dan lebih

C. Konflik Massal

Konsep konflik massal yang digunakan dalam Podes merujuk pada konflik fisik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi:

- Perkelahian antarkelompok warga adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari;
- Perkelahian warga antar desa/kelurahan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan warga desa/kelurahan/nagari lainnya;
- Perkelahian warga dengan aparat keamanan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan;
- Perkelahian warga dengan aparat pemerintah adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah;

- Perkelahian antar pelajar/mahasiswa adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain;
- Perkelahian antar suku/etnis adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/kelurahan/nagari; dan
- Lainnya: perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan, dan sebagainya.

Penghitungan Indikator

1. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk/*Crime Rate*

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada Tahun } t}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100.000$$

2. Selang Waktu Kejahatan Tahun t/*Crime Clock*

$$\text{Crime Clock} = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada Tahun } t} \quad (\text{detik})$$

3. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan/*Crime Clearance*

$$\text{Crime Clearance} = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan yang Dilaporkan}} \times 100$$

Penghitungan *Sampling Error*

Secara teoritis, terdapat dua jenis kesalahan yang dapat terjadi dalam suatu survei, yaitu *non-sampling error* dan *sampling error*. *Non-sampling error* adalah kesalahan yang terjadi pada saat proses pengumpulan maupun pengolahan data. Misalnya, kesalahan dalam menginterpretasikan pertanyaan-pertanyaan di kuesioner maupun kesalahan dalam melakukan input data. Adapun *sampling error* adalah kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan teknik sampling tertentu dalam suatu survei.

Pada publikasi ini, dilakukan penghitungan *sampling error* untuk indikator-indikator yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022. Secara statistik, besarnya *sampling error* hasil Susenas 2022 ditunjukkan oleh nilai galat baku (*standard error*) dari suatu ukuran statistik (rata-rata, persentase, atau jumlah). Untuk mengukur tingkat presisi dari indikator-indikator tersebut, dilakukan penghitungan nilai *Relative Standard Error* (RSE) yang merupakan perbandingan

nilai *standard error* terhadap estimasi indikatornya yang dinyatakan dalam satuan persen.

Selain untuk menghitung nilai RSE, *standard error* juga digunakan untuk menghitung besaran selang kepercayaan (*confident interval*). Selang kepercayaan adalah interval nilai yang dapat memuat nilai populasi dari indikator yang diestimasi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan selang kepercayaan dengan batas bawah sebesar nilai estimasi dikurangi dua *standard error* dan batas atas sebesar nilai estimasi ditambah dua *standard error*. Semakin rendah nilai RSE atau semakin pendek selang kepercayaan menunjukkan bahwa nilai indikator yang diestimasi tersebut semakin baik.

Menurut Aryago Mulia, dkk (2007), kualitas dari hasil estimasi suatu survei dapat diamati dari nilai RSE yang dihasilkan. Kesalahan sampling yang digunakan dari beberapa estimasi harus diterapkan dan digunakan secara hati-hati. Apabila jumlah kasus yang diobservasi kecil, hasil estimasi akan memiliki kesalahan relatif yang sangat besar. Secara umum, nilai *standard error* akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya besaran estimasi. Sebaliknya, RSE akan menurun apabila ukuran estimasi tersebut meningkat. Oleh karena itu, peningkatan ukuran estimasi menjadi salah satu alternatif untuk memperkecil nilai RSE sehingga nilai estimasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat.

1

PENDAHULUAN

Tersedianya statistik kriminal menjadi salah satu **aspek kunci** yang turut memengaruhi pembangunan nasional. Statistik kriminal akan menjadi **tolak ukur** dan acuan publik dalam menilai **tingkat keamanan** suatu wilayah.



Publikasi Statistik Kriminal 2023 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan data statistik kriminal **secara berkala dan berkesinambungan**.

1.1 Latar Belakang

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) mendeklarasikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, kemerdekaan, dan keamanan. Sejalan dengan itu, *Handbook on Governance Statistics* (2015) juga menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan merupakan salah satu dimensi kunci dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, tersedianya statistik kriminal menjadi salah satu aspek kunci yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas pariwisata dan ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Statistik kriminal yang *valid*, *reliable*, dan *sustainable* akan bermanfaat bagi berbagai pihak. Selain stabilitas politik, aspek keamanan merupakan salah satu faktor penting bagi investor untuk berinvestasi pada suatu wilayah. Kondisi keamanan yang baik, akan menciptakan iklim investasi yang baik, begitu pula sebaliknya. Kemudian, faktor keamanan juga membuat masyarakat umum menjadi lebih tertarik untuk melakukan kunjungan wisata ke wilayah tertentu. Ketersediaan statistik kriminal juga sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Statistik kriminal akan menjadi tolok ukur dan acuan publik dalam menilai tingkat keamanan suatu wilayah dan wujud pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Saat ini, dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia (Maslow, 1943), rasa aman berada pada tingkatan kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting.

1.2 Maksud dan Tujuan

Publikasi Statistik Kriminal 2023 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik kriminal secara berkala dan berkesinambungan. Ketersediaan data statistik kriminal ini bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Selain untuk pemenuhan kebutuhan nasional, ketersediaan data kriminal juga dibutuhkan di level internasional, yakni untuk pemenuhan data *United Nations Surveys on Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems* (UN-CTS) yang setiap tahun dikumpulkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), serta pemenuhan indikator SDGs, khususnya Goal 16 terkait dengan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Tujuan penyusunan Publikasi Statistik Kriminal 2023 ini adalah dalam rangka memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, penyusunan publikasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban kejahatan yang terjadi di Indonesia.

1.3 Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan gambaran tentang kejadian kejahatan dan korban kejahatan yang terjadi di Indonesia, baik pada level provinsi maupun level nasional. Khusus untuk data yang bersumber dari Mabes Polri disajikan menurut wilayah atau Kepolisian Daerah (Polda) dan nasional. Sesuai dengan ketersediaan data, untuk keseluruhan statistik dan indikator mengenai kejadian tindak kejahatan dan korban kejahatan disajikan selama tiga tahun terakhir berturut-turut, yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022. Untuk keseluruhan statistik dan indikator bersumber dari Potensi Desa disajikan selama tiga periode terakhir, yaitu tahun 2014, 2018, dan 2021.

1.4 Sistematika Penyajian

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam beberapa bagian (Bab) yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

- Bab I menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta sistematika penyajian publikasi.
- Bab II menyajikan gambaran umum dan perkembangan kejadian kejahatan termasuk kejadian kejahatan berdasarkan data polisi dan gambaran kejadian kejahatan dan konflik secara kewilayahan bersumber dari Podes.
- Bab III menyajikan data korban kejahatan berdasarkan karakteristik demografi dan sosial ekonomi yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- Bab IV menyajikan data yang merupakan indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) terkait keamanan.
- Daftar pustaka berisi referensi yang digunakan dalam penulisan publikasi.
- Lampiran mencantumkan tabel-tabel terkait statistik kriminal.

2

KEJADIAN KEJAHATAN



Indikator Kriminalitas Tahun 2022

Jumlah kejadian kejahatan

372.965

Selang waktu kejahatan

00.01'24"

Tingkat risiko kejahatan

137 /100.000 penduduk

Kejahatan terhadap
kesusilaan

SUMUT

453

Jumlah Kejadian Kejahatan
Tertinggi Tahun 2022



Kejahatan terkait
penipuan, penggelapan,
dan korupsi

METRO JAYA

9.729

Kejahatan terhadap
nyawa

JATIM

102

BAB II

Kejadian Kejahatan

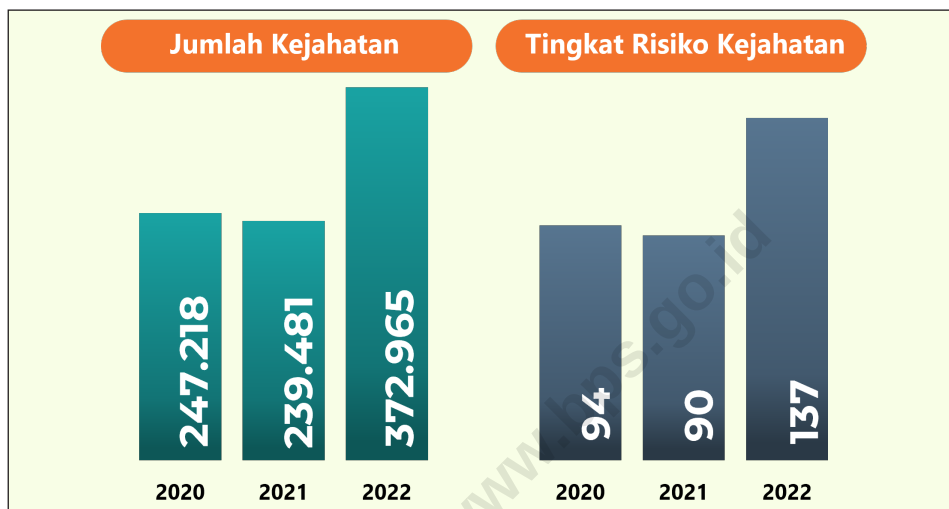
2.1 Angka Kejahatan Nasional

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat secara eksplisit menyebutkan tujuan negara Indonesia, salah satunya yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Melalui tujuan tersebut, negara Indonesia berkomitmen untuk melindungi seluruh komponen di Indonesia yang meliputi rakyat, kekayaan alam, kekayaan budaya, maupun nilai-nilai luhur bangsa. Sejalan dengan itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan dan keamanan warganya dari segala bentuk kejahatan sebagai upaya mewujudkan tujuan perlindungan bangsa. Dilihat dari pendekatan legal, kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat (Anwar, 2010). Di Indonesia sendiri, pendefinisian kejahatan di lembaga penegak hukum didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang lainnya yang relevan.

Ketersediaan statistik kejahatan menjadi hal yang fundamental untuk mengevaluasi tingkat keamanan di suatu wilayah. Menurut Mohammad Hatta (2008), angka statistik kejahatan merupakan gambaran jumlah kerugian yang diakibatkan dari terjadinya suatu kejahatan. Statistik kejahatan banyak diperoleh dari data administrasi yang dikumpulkan oleh lembaga penegak hukum, salah satunya dari kepolisian. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa data administrasi belum dapat menggambarkan keseluruhan kejadian kejahatan dikarenakan dugaan adanya kasus kejahatan yang tidak dilaporkan ke polisi atau biasa disebut dengan *dark number*. Dari sisi makro, terdapat beberapa indikator yang menggambarkan tentang kejahatan, yaitu jumlah kejahatan (*crime total*), tingkat risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Pemaknaan angka-angka tersebut dalam konteks makro memerlukan kehati-hatian karena merupakan agregat dari semua jenis kejahatan yang terjadi dalam satu waktu tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya (Savitz, 1978).

Berdasarkan Gambar 2.1, jumlah kejadian kejahatan di Indonesia sempat mengalami penurunan, dari yang semula sebanyak 247.218 kejadian di tahun 2020 menjadi 239.481 kejadian di tahun 2021. Namun, terjadi peningkatan jumlah

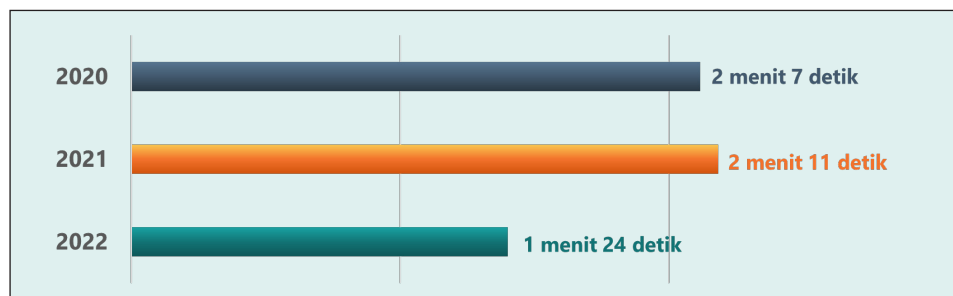
kejadian kejahatan yang cukup drastis di tahun 2022 menjadi sebanyak 372.965 kejadian. Fenomena yang serupa juga tergambar dari indikator risiko penduduk terkena tindak kejahatan (*crime rate*). Nilai *crime rate* mengalami penurunan dari 94 di tahun 2020 menjadi 90 di tahun 2021, kemudian melonjak cukup tajam di tahun 2022 menjadi 137. Nilai *crime rate* tahun 2022 ini dapat dimaknai bahwa dari 100.000 penduduk, terdapat 137 orang yang mengalami kejahatan.



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.1 Jumlah Kejahatan dan Tingkat Risiko Kejahatan, 2020–2022

Apabila dikaji dari selang waktu terjadinya kejahatan (*crime clock*), indikator ini menunjukkan bahwa interval terjadinya kejahatan cenderung fluktuatif selama tiga tahun terakhir (Gambar 2.2). Pada tahun 2020 adalah 00.02'07" (2 menit 7 detik), kemudian intervalnya menjadi semakin panjang di tahun 2021 menjadi 00.02'11" (2 menit 11 detik). Namun di tahun 2022, nilai *crime clock* justru semakin pendek menjadi 00.01'24" (1 menit 24 detik). Penurunan interval *crime clock* di tahun 2022 menunjukkan peningkatan intensitas kejadian tindak kejahatan.

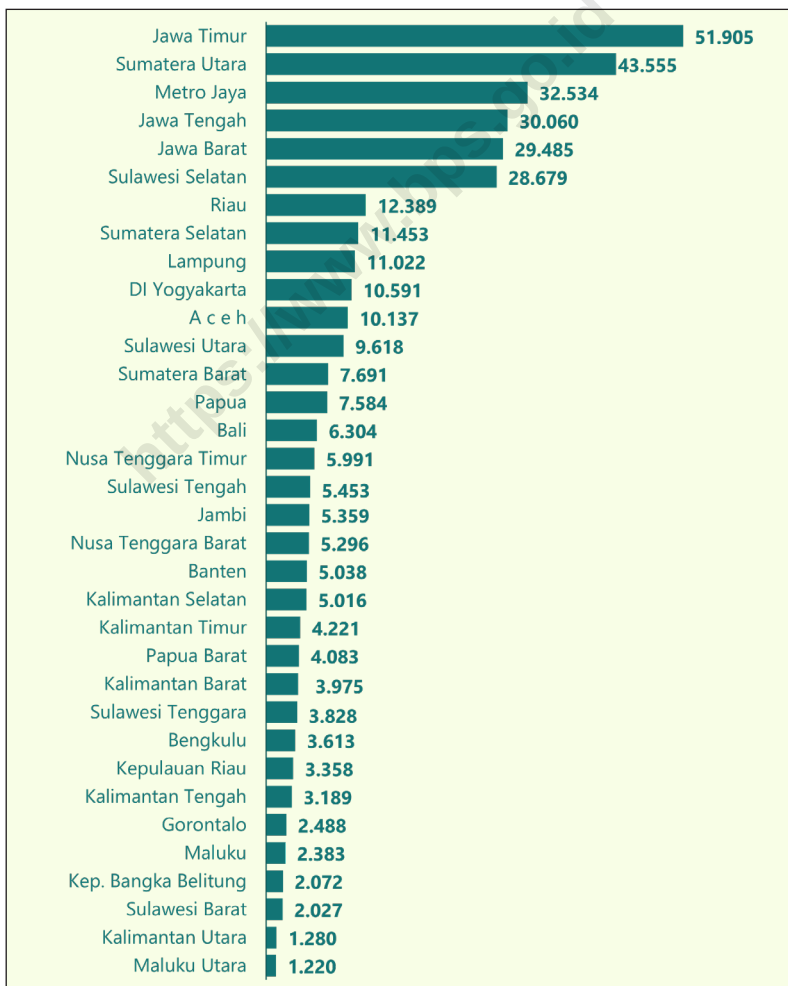


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.2 Selang Waktu Terjadinya Kejahatan, 2020–2022

2.2 Angka Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah (Polda)

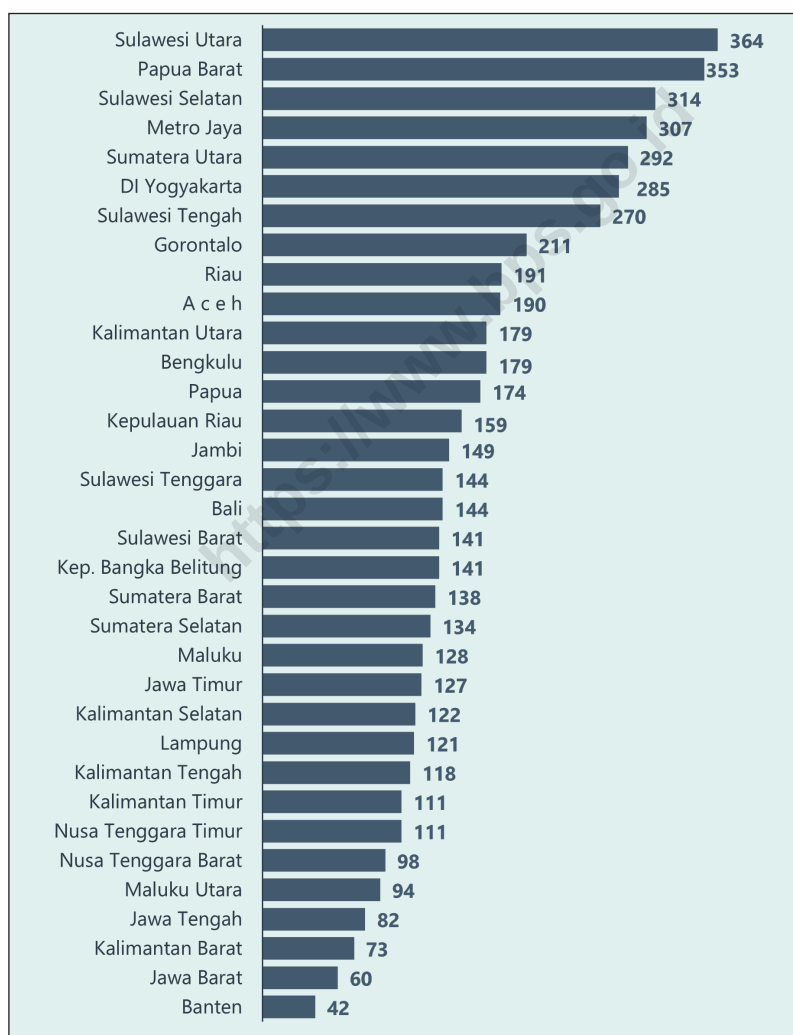
Statistik kejahatan yang bersumber dari data administrasi kepolisian dapat disajikan menurut Kepolisian Daerah (Polda) sesuai dengan wilayah yurisdiksinya masing-masing. Jumlah kejahatan untuk level Polda selama tahun 2022 disajikan pada Gambar 2.3. Polda Jawa Timur menjadi Polda dengan jumlah kejahatan terbanyak di tahun 2022 (51.905 kejadian), disusul oleh Polda Sumatera Utara sebanyak 43.555 kejadian, dan Polda Metro Jaya (32.534 kejadian). Sementara itu, Provinsi Maluku Utara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat merupakan tiga Polda dengan jumlah kejahatan paling sedikit dengan jumlah kejadian kejahatan berturut-turut sebanyak 1.220 kejadian, 1.280 kejadian, dan 2.027 kejadian.



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.3 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kepolisian Daerah, 2022

Indikator tingkat risiko kejahatan (*crime rate*) tahun 2022 menurut Kepolisian Daerah tersaji di Gambar 2.4. Berdasarkan grafik tersebut, Polda Sulawesi Utara memiliki nilai *crime rate* tertinggi di tahun 2022, yaitu sebesar 364 (per 100.000 penduduk), disusul oleh Polda Papua Barat sebesar 353 (per 100.000 penduduk), dan Polda Sulawesi Selatan sebesar 314 (per 100.000 penduduk). Sementara itu, Polda Jawa Timur termasuk dalam kelompok dengan *crime rate* rendah dengan nilai sebesar 127 (per 100.000 penduduk), meskipun Polda Jawa Timur menjadi satuan kerja dengan jumlah kejahatan tertinggi. Hal ini tentu karena pengaruh jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur yang besar.



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.4 Tingkat Risiko Terkena Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2022

2.3 Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, jumlah kejahatan (*crime total*), tingkat risiko kejahatan (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya kejahatan (*crime clock*) merupakan agregat dari semua jenis kejahatan sehingga hanya menggambarkan peristiwa kejahatan secara makro dan umum. Penyajian indikator kriminal yang lebih detail dan spesifik dapat lebih bermanfaat untuk menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta membantu memberikan fokus dan prioritas penyelesaian pada jenis kejahatan tertentu. Oleh karena itu, publikasi ini juga menyajikan statistik kejahatan berdasarkan klasifikasi kejahatan yang didasarkan pada beberapa kriteria berikut.

- Target dari kejadian kejahatan (orang, harta benda, ketertiban umum, negara, dan sebagainya)
- Tingkat keseriusan kejahatan (kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap hak milik/barang, dan sebagainya)
- Bagaimana kejahatan tersebut dilakukan (kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan, kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan, dan sebagainya)

Penyajian klasifikasi jenis kejahatan pada publikasi ini sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia dan *International Classification of Crime for Statistical Purposes* (ICCS) yang digagas oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Berikut klasifikasi kejahatan yang disajikan dalam publikasi ini.

Tabel 1. Klasifikasi Kejahatan yang Disajikan dalam Publikasi Statistik Kriminal 2023

No	Klasifikasi Kejahatan	Jenis Kejahatan
(1)	(2)	(3)
1	Kejahatan terhadap Nyawa	Pembunuhan
2	Kejahatan terhadap Fisik/ Badan	Penganiayaan Berat
		Penganiayaan Ringan
		Kekerasan dalam Rumah Tangga
3	Kejahatan terhadap Kesusilaan	Perkosaan
		Pencabulan
4	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	Penculikan
		Mempekerjakan Anak di Bawah Umur

No	Klasifikasi Kejahatan	Jenis Kejahatan
(1)	(2)	(3)
5	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan
		Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)
		Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam)
6	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	Pencurian
		Pencurian dengan pemberatan
		Pencurian Kendaraan Bermotor
		Pengrusakan/Penghancuran Barang
		Pembakaran dengan Sengaja
		Penadahan
7.	Kejahatan Terkait Narkotika	Narkotika dan Psikotropika
8.	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi	Penipuan/Perbuatan Curang
		Penggelapan
		Korupsi
9.	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	Terhadap Ketertiban Umum

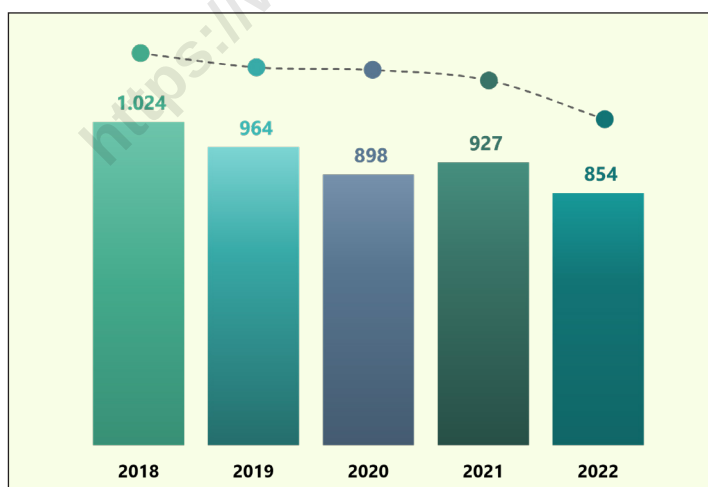
Sumber: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia dan *International Classification of Crime for Statistical Purposes* (ICCS)

Perlu menjadi pertimbangan bahwa tidak semua jenis kejahatan dijelaskan dalam publikasi ini. Jenis kejahatan yang dicantumkan dalam publikasi ini adalah jenis kejahatan dengan skala besar dan menjadi kasus menonjol yang dilaporkan kepada polisi.

2.4 Kejahatan terhadap Nyawa

Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights*, hak untuk hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A juga secara tegas menyatakan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Oleh karena itu, kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) menjadi kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional serta memiliki hukuman yang paling berat dalam KUHP Indonesia.

Selama periode lima tahun terakhir (tahun 2018–2022), jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) di Indonesia cukup fluktuatif dengan kecenderungan menurun (Gambar 2.5). Pada tahun 2018 tercatat ada 1.024 kejadian yang merupakan jumlah kasus tertinggi pada kurun waktu lima tahun terakhir. Angka ini terus menurun menjadi 964 kejadian di tahun 2019 dan 898 kejadian di tahun 2020, namun sempat mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 927 kejadian. Pada tahun 2022, jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa mengalami penurunan menjadi 854 kasus dan merupakan jumlah kasus terkecil dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

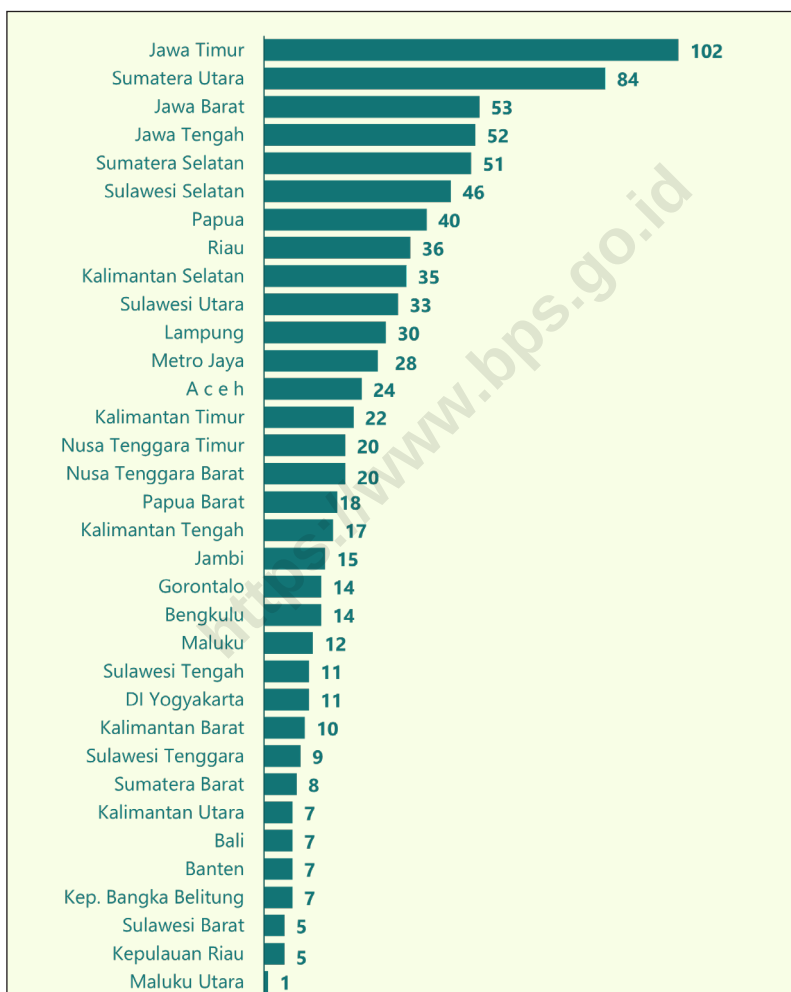


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.5 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa, 2018–2022

Selama periode 2018–2022, jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa cenderung mengalami penurunan.

Tiga wilayah Kepolisian Daerah yang memiliki jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa terbesar pada tahun 2022 adalah Polda Jawa Timur (102 kejadian), Polda Sumatera Utara (84 kejadian), dan Polda Jawa Barat (53 kejadian). Di lain sisi, wilayah Kepolisian Daerah dengan jumlah kejadian paling sedikit terdapat di Polda Maluku Utara dengan satu kejadian, diikuti oleh Polda Kepulauan Riau dan Polda Sulawesi Barat dengan jumlah kejadian yang sama, yaitu masing-masing sebanyak lima kejadian (Gambar 2.6).

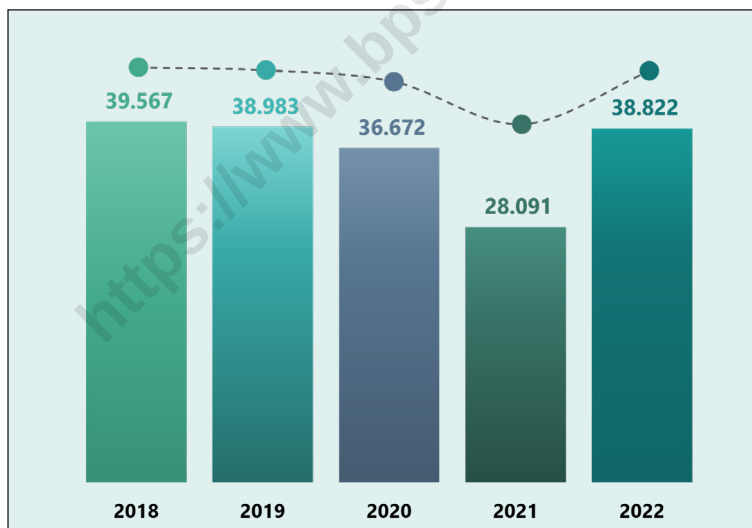


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.6 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa Menurut Kepolisian Daerah, 2022

2.5 Kejahatan Terhadap Fisik/Badan

Pada publikasi ini, kejahatan terhadap fisik/badan mencakup penganiayaan berat, penganiayaan ringan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, perlu menjadi catatan bahwa berdasarkan data dari Kepolisian RI, data untuk jenis kejahatan penganiayaan berat pada tahun 2022 diklasifikasikan ke dalam jenis kejahatan penganiayaan. Dilihat dari perkembangannya, jumlah kejahatan terhadap fisik/badan (*violence*) mengalami penurunan selama periode 2018–2021 kemudian meningkat di tahun 2022 (Gambar 2.6). Pada tahun 2018, jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik/badan sebanyak 39.567 kejadian. Angka ini terus menurun dari tahun ke tahun hingga sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2021 menjadi 28.091 kejadian. Akan tetapi, tren penurunan ini tidak terjadi di tahun 2022 dengan adanya peningkatan jumlah kasus yang cukup besar menjadi 38.822 kejadian.

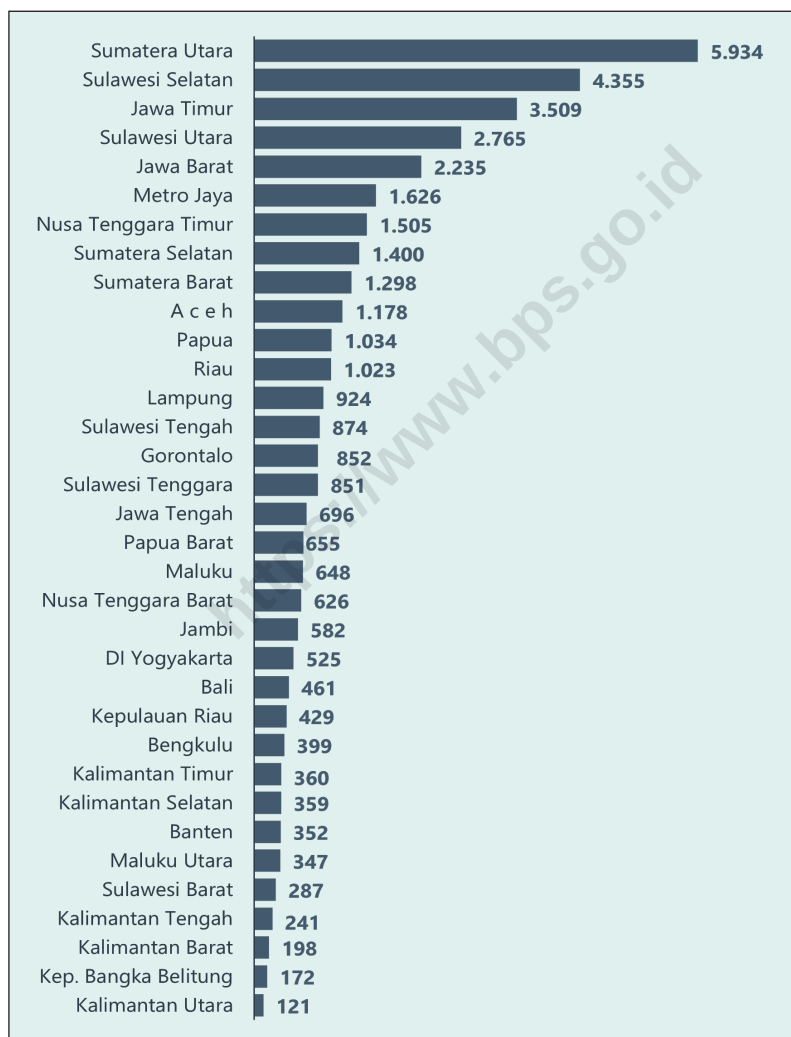


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.7 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan, 2018–2022

Terjadi peningkatan jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik/badan yang cukup besar di tahun 2022, setelah sebelumnya menunjukkan tren penurunan di tahun 2018–2021.

Pada tahun 2022, jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik/badan paling banyak terjadi di wilayah Polda Sumatera Utara, yaitu sebanyak 5.934 kejadian, kemudian diikuti dengan Polda Sulawesi Selatan (4.355 kejadian) dan Polda Jawa Timur (3.509 kejadian). Di lain sisi, tiga wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik/badan yang paling sedikit adalah wilayah Polda Kalimantan Utara, Polda Kepulauan Bangka Belitung, dan Polda Kalimantan Barat, masing-masing sebanyak 121 kejadian, 172 kejadian, dan 198 kejadian (Gambar 2.8).

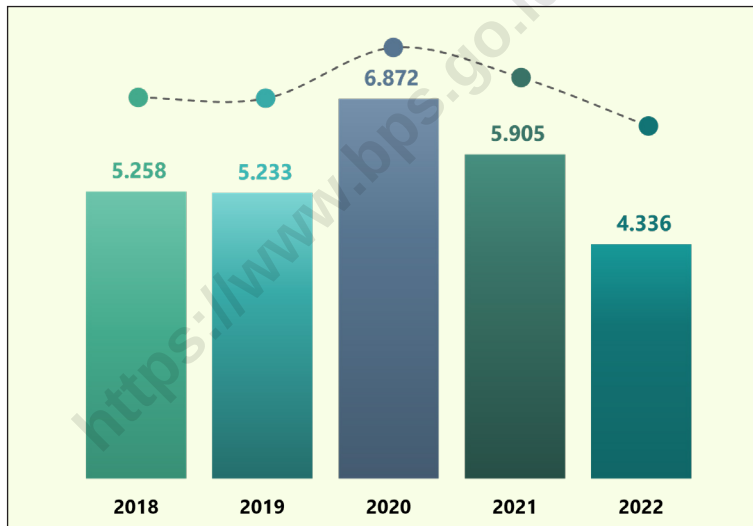


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.8 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan Menurut Kepolisian Daerah, 2022

2. 6 Kejahatan Terhadap Kesusilaan

Pada publikasi ini, klasifikasi kejahatan terhadap kesusilaan terdiri dari jenis kejahatan perkosaan dan pencabulan. Apabila dikaji perkembangannya selama periode 2018–2022, jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan di Indonesia cukup berfluktuasi. Gambar 2.9 memperlihatkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan paling tinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 6.872 kejadian. Meskipun demikian, jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan ini mulai mengalami penurunan menjadi 5.905 kejadian di tahun 2021 hingga mencapai jumlah terendah di tahun 2022, yaitu sebanyak 4.336 kejadian.

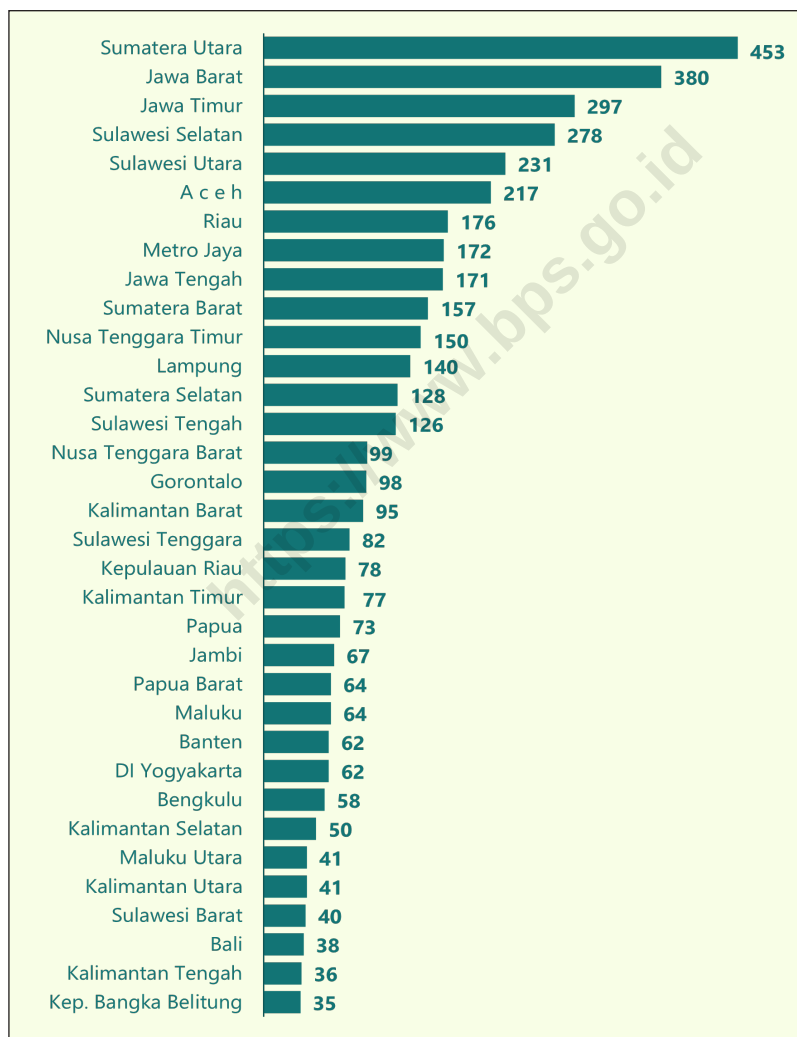


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2. 9 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan, 2018–2022

Meski mengalami kenaikan yang cukup tajam di tahun 2020, jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan mulai mengalami penurunan di tahun 2021 dan mencapai jumlah terendah di tahun 2022.

Gambar 2.10 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 453 kejadian. Di posisi kedua dan ketiga adalah Polda Jawa Barat dan Polda Jawa Timur, masing-masing sebanyak 380 kejadian dan 297 kejadian. Wilayah dengan jumlah kejadian paling sedikit adalah Polda Kepulauan Bangka Belitung, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Bali. Jumlah kejadian di ketiga wilayah tersebut masing-masing 35 kejadian, 36 kejadian, dan 38 kejadian.

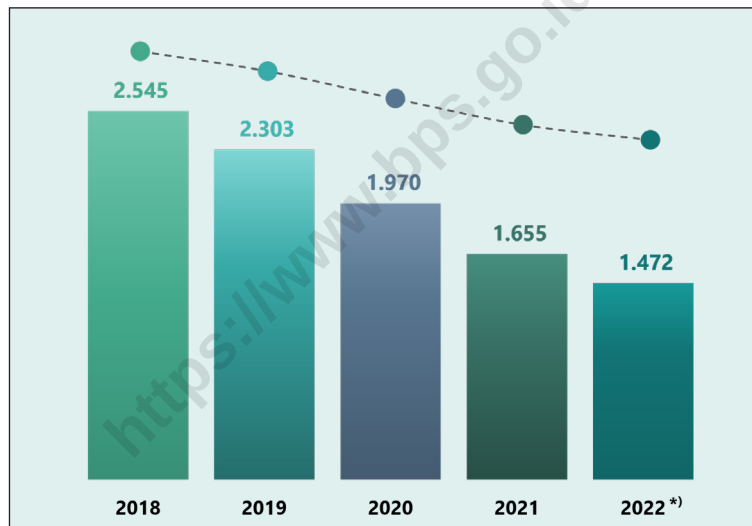


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2. 10 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan Menurut Kepolisian Daerah, 2022

2.7 Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang

Pada publikasi ini, klasifikasi kejahatan terhadap kemerdekaan orang terdiri dari jenis kejahatan penculikan dan mempekerjakan anak di bawah umur. Namun, perlu menjadi catatan bahwa berdasarkan data dari Kepolisian RI, data untuk jenis kejahatan mempekerjakan anak di bawah umur tidak tersedia di tahun 2022. Kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang ini selama periode lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018, terjadi 2.545 kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang kemudian terus menurun dari tahun ke tahun hingga mencapai jumlah terendah, yaitu 1.472 kejadian di tahun 2022 (Gambar 2.10).



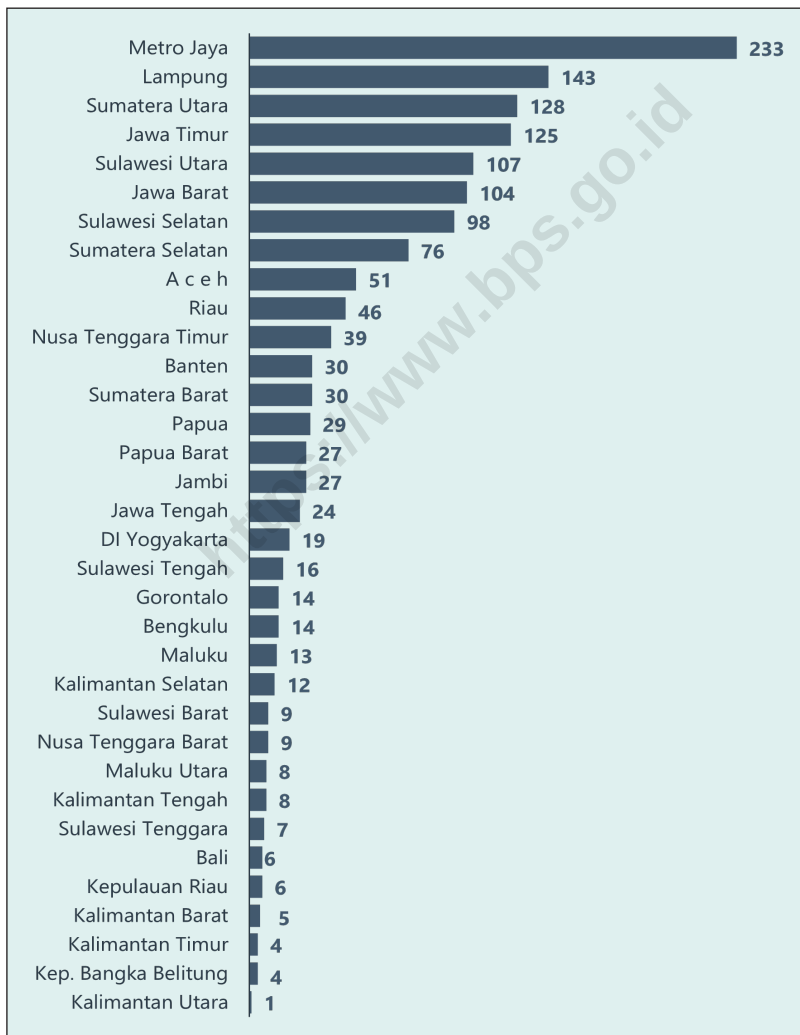
Catatan : *) Penurunan di tahun 2022 disebabkan karena tidak tersedianya data mempekerjakan anak di bawah umur

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2. 11 Jumlah Kejadian dan Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, 2018-2022

Selama periode 2018-2022, jumlah kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang terus menurun hingga mencapai nilai terendah pada tahun 2022.

Jumlah kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang di tahun 2021 berdasarkan Kepolisian Daerah disajikan pada Gambar 2.12. Pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat sebanyak 233 kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, kemudian diikuti oleh Polda Lampung (143 kejadian) dan Polda Sumatera Utara (128 kejadian). Sementara itu, wilayah Polda dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang paling sedikit adalah Polda Kalimantan Utara, yaitu sebanyak satu kejadian, diikuti oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Polda Kalimantan Timur dengan jumlah kejadian yang sama, yaitu empat kejadian.



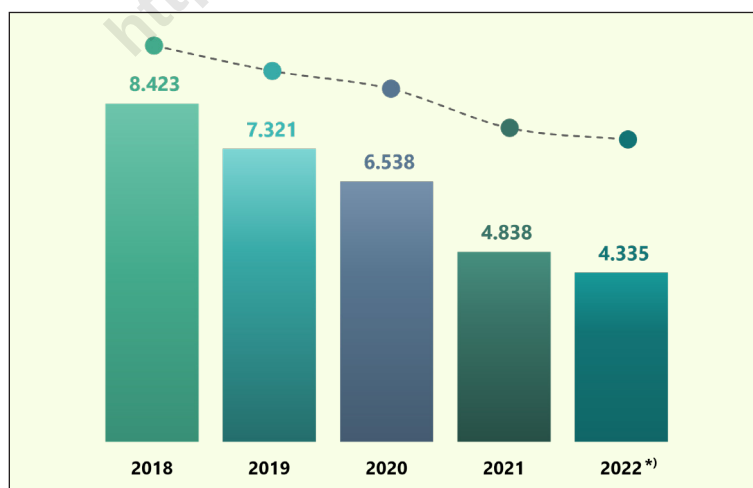
Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2. 12 Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Menurut Kepolisian Daerah, 2022

2.8 Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan

Dalam hierarki klasifikasi jenis kejahatan, jenis kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan tergolong tinggi karena selain menyangkut kejahatan terhadap properti, juga merupakan kejahatan terhadap fisik. Klasifikasi kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan terdiri dari pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api (senpi), dan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam (sajam). Namun, perlu menjadi catatan bahwa berdasarkan data dari Kepolisian RI, data untuk jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022 tidak disajikan secara lebih detail lagi menurut senjata yang digunakan. Oleh karena itu, data terkait pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api (senpi) dan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam (sajam) untuk tahun 2022 tidak tersedia.

Selama periode lima tahun terakhir, jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan di Indonesia menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2018, terdapat 8.423 kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan. Angka ini terus menurun dari tahun ke tahun hingga mencapai jumlah terendah di tahun 2022, yaitu sebanyak 4.335 kejadian (Gambar 2.13).

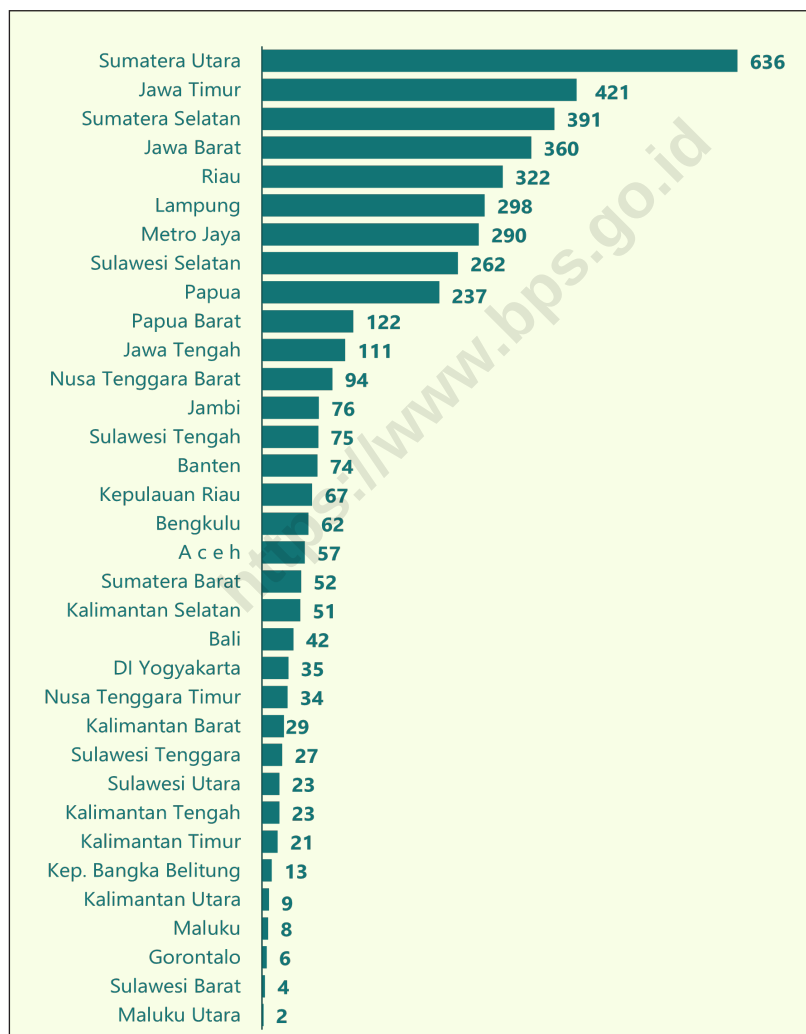


Catatan : *) Penurunan di tahun 2022 juga disebabkan karena tidak tersedianya data pencurian dengan kekerasan menggunakan senpi dan pencurian dengan kekerasan menggunakan sajam

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.13 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan, 2018–2022

Berdasarkan Gambar 2.14, wilayah Polda dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang dengan kekerasan terbanyak pada tahun 2022 adalah Polda Sumatera Utara, yaitu sebanyak 636 kejadian. Di posisi kedua terbanyak adalah Polda Jawa Timur dengan 421 kejadian dan diikuti oleh Polda Sumatera Selatan dengan 391 kejadian. Adapun tiga wilayah Polda dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang paling sedikit adalah Polda Maluku Utara (dua kejadian), Polda Sulawesi Barat (empat kejadian), dan Polda Gorontalo (enam kejadian).

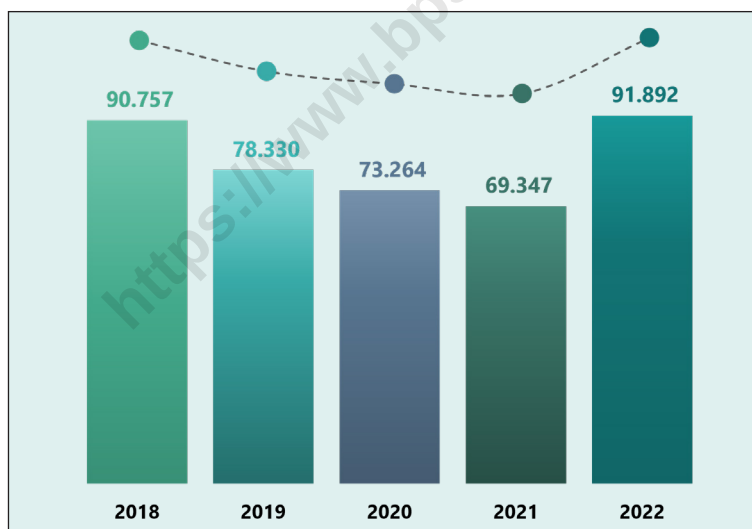


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2. 14 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan Menurut Kepolisian Daerah, 2022

2.9 Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang tanpa Penggunaan Kekerasan

Kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa penggunaan kekerasan terdiri dari pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pengrusakan/penghancuran barang, pembakaran dengan sengaja, dan penadahan. Dilihat dari perkembangannya, jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa penggunaan kekerasan menunjukkan tren yang menurun selama tahun 2018–2021. Pada tahun 2018, terdapat sebanyak 90.757 kejadian terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan yang dilaporkan kepada polisi, kemudian terus menurun hingga mencapai jumlah terendah di tahun 2021 (69.347 kejadian). Namun, tren penurunan ini tidak dapat dipertahankan di tahun 2022 dikarenakan adanya lonjakan kasus yang cukup tajam menjadi sebanyak 91.892 kejadian dan menjadi jumlah terbesar dalam kurun waktu lima tahun terakhir (Gambar 2.15).

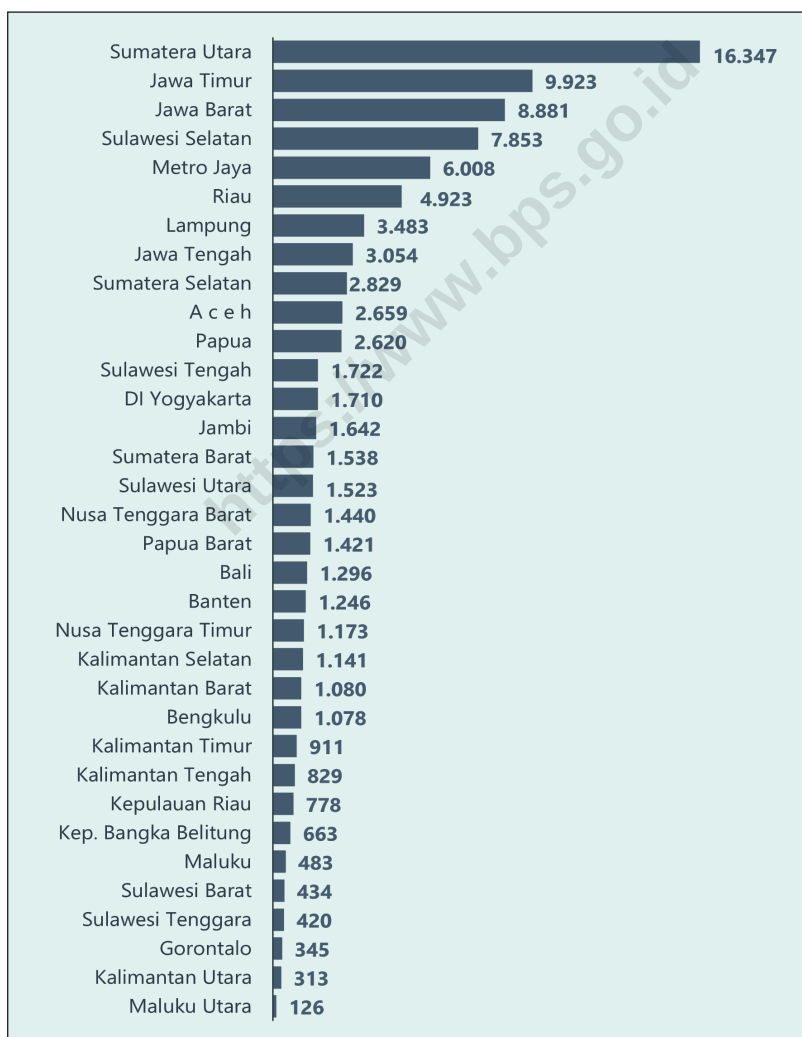


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2. 15 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang Tanpa Penggunaan Kekerasan, 2018–2022

Terjadi lonjakan jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang yang cukup tajam di tahun 2022, setelah sebelumnya menunjukkan tren menurun di tahun 2018–2021.

Jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan menurut Kepolisian Daerah (Polda) disajikan pada Gambar 2.16. Wilayah Polda Sumatera Utara merupakan wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang terbanyak di tahun 2022, yaitu sebanyak 16.347 kejadian. Di posisi selanjutnya, terdapat wilayah Polda Jawa Timur dan Polda Jawa Barat dengan jarak yang cukup jauh dibandingkan Polda Sumatera Utara, yaitu masing-masing sebanyak 9.923 dan 8.881 kejadian. Sementara itu, tiga wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan paling sedikit adalah Polda Maluku Utara (126 kejadian), Polda Kalimantan Utara (313 kejadian), dan Polda Gorontalo (345 kejadian).

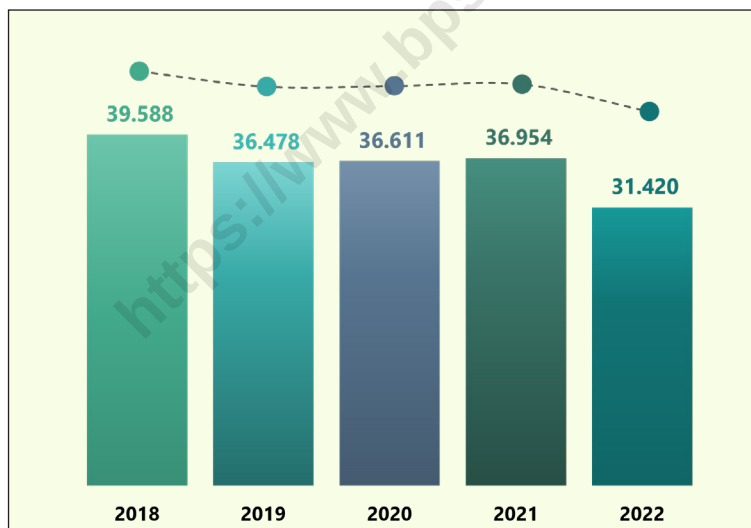


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2. 16 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang Tanpa Penggunaan Kekerasan Menurut Kepolisian Daerah, 2022

2. 10 Kejahatan Terkait Narkotika

Kejahatan terkait narkotika merupakan jenis kejahatan yang termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Pada publikasi ini, kejahatan yang termasuk dalam kelompok kejahatan terkait narkotika mencakup kejahatan narkotika (narkoba) dan psikotropika. Dilihat dari perkembangannya selama periode 2018–2022, jumlah kejahatan terkait narkotika cenderung fluktuatif (Gambar 2.17). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 39.588 kejadian. Angka ini menurun menjadi 36.478 kejadian di tahun 2019, kemudian mengalami peningkatan selama dua tahun berturut-turut, yaitu menjadi sebanyak 36.611 kejadian di tahun 2020 dan 36.954 kejadian di tahun 2021. Meskipun demikian, terjadi penurunan yang sangat drastis untuk jumlah kejahatan terkait narkotika di tahun 2022 menjadi sebanyak 31.420 kejadian.

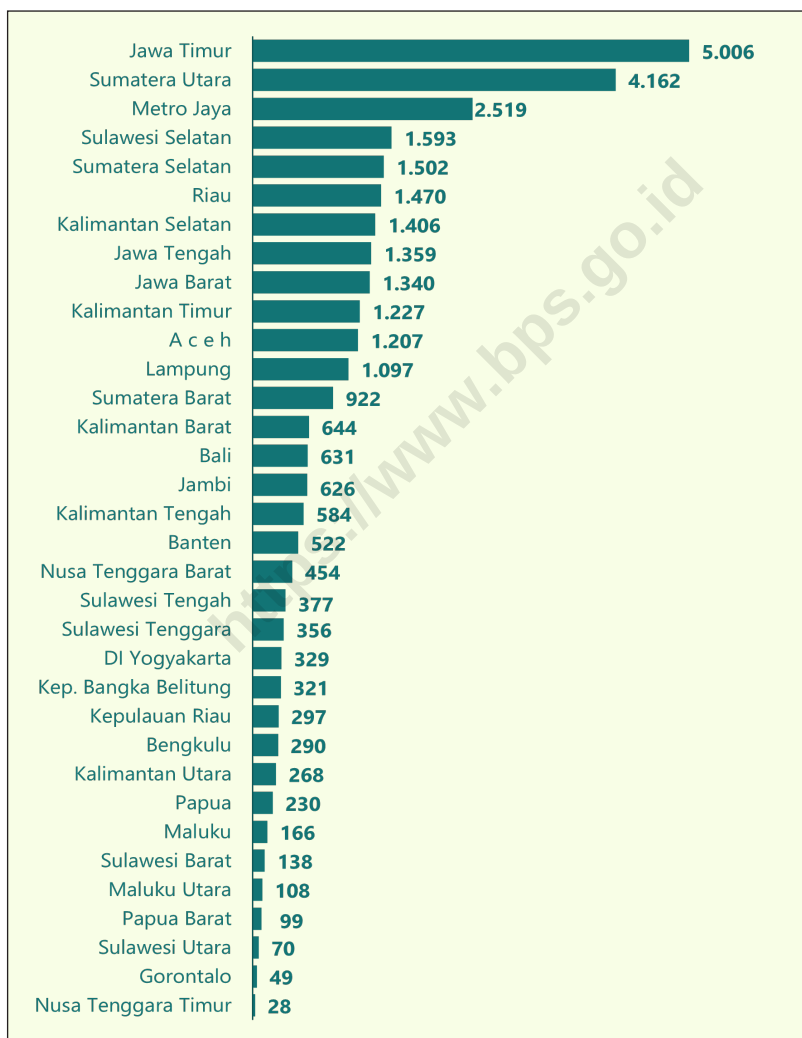


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2. 17 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika, 2018–2022

Penurunan jumlah kasus yang cukup drastis di tahun 2022 dapat menjadi indikasi adanya perbaikan dalam pencegahan dan penanganan kejahatan terkait narkotika.

Gambar 2.18 menunjukkan bahwa jumlah kejahatan terkait narkoba tahun 2022 paling banyak terjadi di wilayah Polda Jawa Timur dengan jumlah sebanyak 5.006 kejadian, kemudian diikuti oleh Polda Sumatera Utara (4.162 kejadian) dan Polda Metro Jaya (2.519 kejadian). Di sisi lain, wilayah Polda Nusa Tenggara Timur, Polda Gorontalo, dan Polda Sulawesi Utara menjadi wilayah dengan jumlah kejadian terkait narkoba yang paling sedikit, masing-masing sebanyak 28 kejadian, 49 kejadian, dan 70 kejadian.

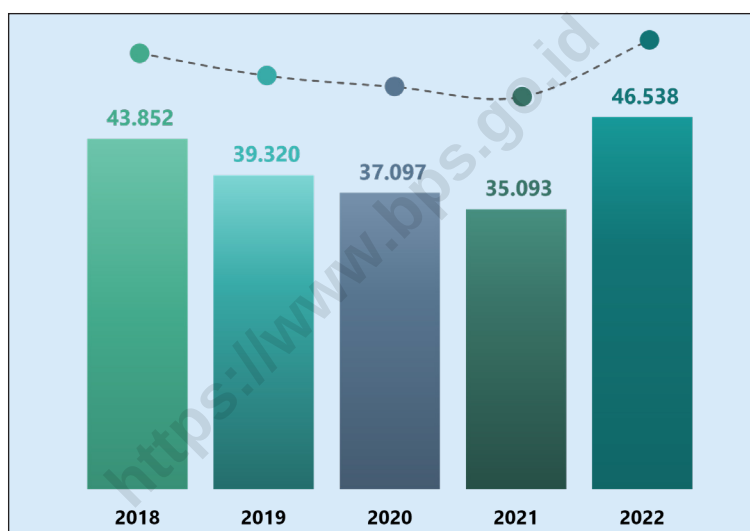


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2. 18 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkoba Menurut Kepolisian Daerah, 2022

2. 11 Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi

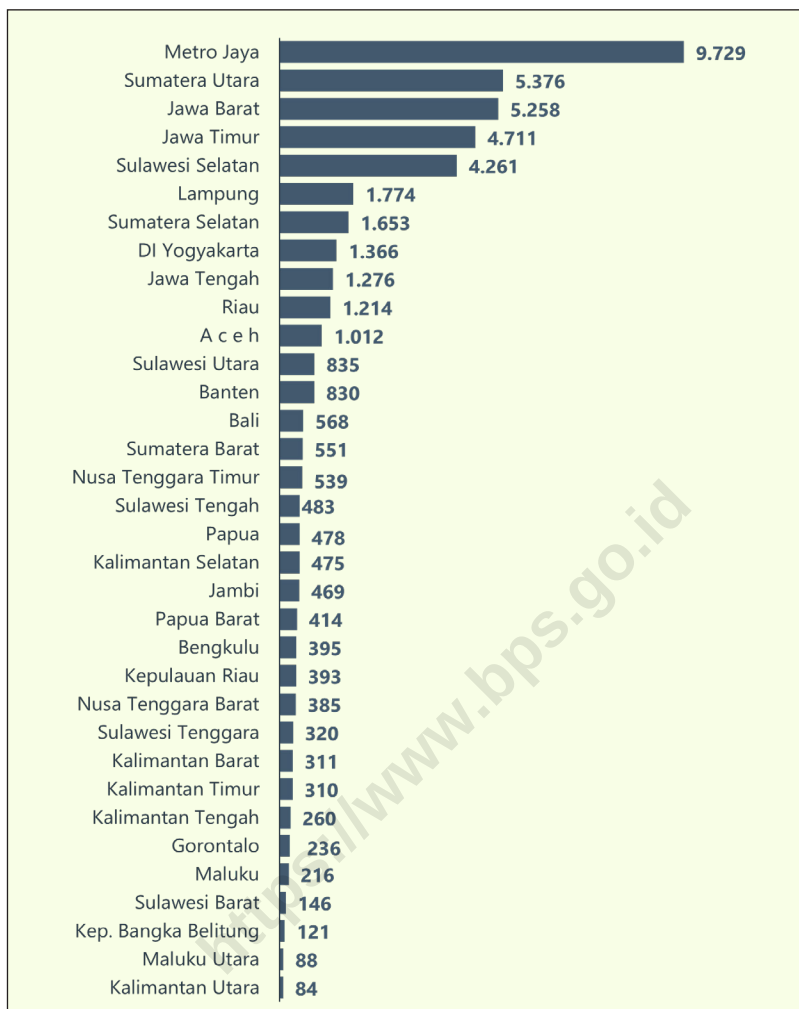
Klasifikasi kejahatan ini mencakup kejahatan penipuan, penggelapan, dan korupsi. Kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi yang tercatat di Polri sempat menunjukkan kecenderungan menurun selama tahun 2018–2021 (Gambar 2.19). Pada tahun 2018, terdapat sebanyak 43.852 kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi kemudian terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2021 menjadi 35.093 kejadian. Namun, terjadi peningkatan jumlah kasus yang sangat tajam di tahun 2022 menjadi sebanyak 46.538 kejadian dan menjadi jumlah kasus terbanyak selama lima tahun terakhir.



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2. 19 Jumlah Kejadian Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi, 2018–2022

Berdasarkan Gambar 2.20, wilayah Polda dengan jumlah kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi terbanyak adalah Polda Metro Jaya (DKI Jakarta dan sekitarnya) sebanyak 9.729 kejadian. Di posisi selanjutnya, terdapat Polda Sumatera Utara dan Polda Jawa Barat dengan selisih jumlah kasus yang cukup jauh dibandingkan Polda Metro Jaya, yaitu masing-masing sebanyak 5.376 kejadian dan 5.258 kejadian. Gambar 2.20 juga menunjukkan bahwa Polda Kalimantan Utara, Polda Maluku Utara, dan Polda Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi yang paling sedikit, yaitu masing-masing sebanyak 84 kejadian, 88 kejadian, dan 121 kejadian.



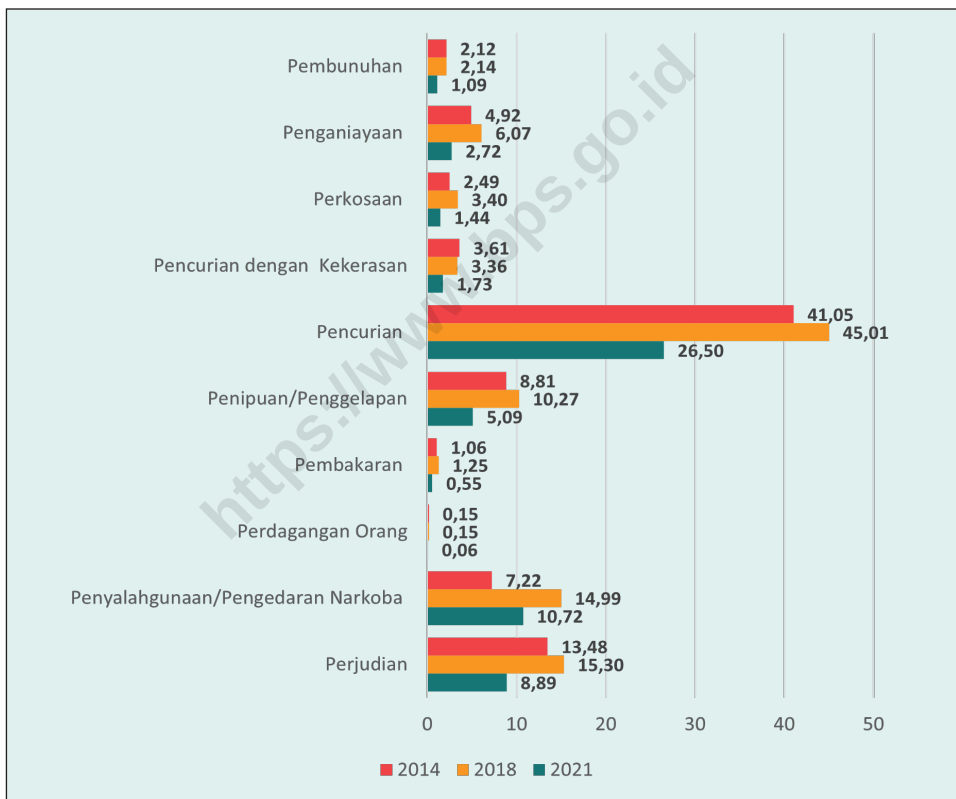
Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2. 20 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi Menurut Kepolisian Daerah, 2022

2. 12 Gambaran Kejadian Kejahatan Secara Kewilayahan

Bagian ini membahas analisis kejadian kejahatan menggunakan pendekatan kewilayahan yang menekankan wilayah dan lokasi di mana kejadian kejahatan terjadi. Lebih lanjut, penjelasan dalam bagian ini akan memberikan gambaran situasi serta tren kejadian kejahatan yang telah dialami oleh masyarakat, berdasarkan cakupan wilayah yang diukur melalui jumlah dan persentase desa/kelurahan yang telah mengalami insiden kejahatan. Data yang menjadi dasar analisis ini diperoleh dari Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2014, 2018, dan 2021 yang secara rutin diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga tahun.

Berdasarkan hasil Pendataan Podes 2021, terdapat penurunan persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian kejahatan secara umum dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pencurian menjadi jenis kejahatan yang paling umum terjadi di desa/kelurahan di Indonesia, yaitu mencapai 26,50 persen dari total desa/kelurahan pada tahun 2021. Persentase ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kejahatan lain yang berada di bawah 11 persen. Tren penurunan terlihat pada persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian pencurian selama periode 2014, 2018, dan 2021. Pada tahun 2014 dan 2018, persentase desa/kelurahan yang mengalami pencurian masih berada di atas 40 persen, tetapi pada tahun 2021 angka ini mengalami penurunan menjadi di bawah 30 persen (Gambar 2.21).



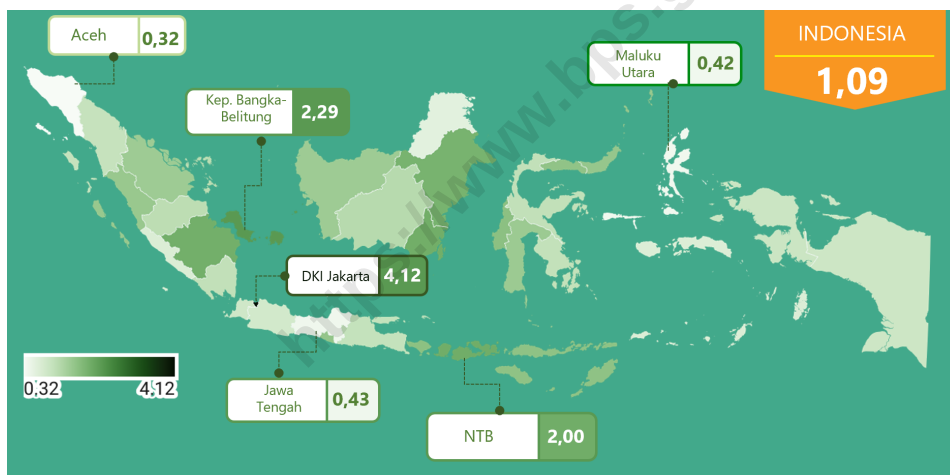
Sumber: Podes 2014, 2018, dan 2021

Gambar 2. 21 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, 2014, 2018, dan 2021

Pada tahun 2021, terjadi penurunan persentase desa/kelurahan yang mengalami kejahatan secara umum pada semua jenis kejahatan. Penurunan yang paling signifikan terjadi pada kejahatan pencurian, yang menurun dari 45,01 persen pada tahun 2018 menjadi 26,50 persen pada tahun 2021. Sementara itu, penurunan yang paling kecil terlihat pada kejahatan perdagangan orang, dengan

penurunan dari 0,15 persen pada tahun 2018 menjadi 0,06 persen pada tahun 2021. Meskipun merupakan hal positif, tetap diperlukan perhatian agar tren penurunan ini dapat dipertahankan atau bahkan diperkuat di masa mendatang.

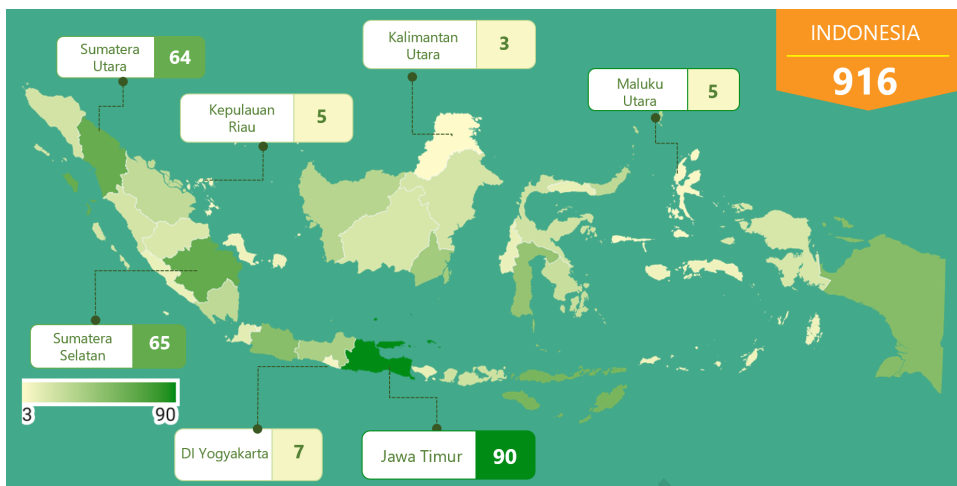
Gambar 2.22 memperlihatkan persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian pembunuhan pada tahun 2021, diukur dengan membandingkan jumlah desa/kelurahan yang mengalami kejadian pembunuhan dengan total desa/kelurahan di suatu provinsi. Dari gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian pembunuhan selama tahun 2021 berkisar antara 0,32 hingga 4,12 persen dari total desa/kelurahan di masing-masing provinsi. Tiga provinsi dengan persentase terbesar dalam kejadian pembunuhan adalah DKI Jakarta (4,12 persen), Kepulauan Bangka Belitung (2,29 persen), dan Nusa Tenggara Barat (2,00 persen). Di sisi lain, tiga provinsi dengan persentase terkecil dalam kejadian pembunuhan adalah Aceh (0,32 persen), Maluku Utara (0,42 persen), dan Jawa Tengah (0,43 persen).



Sumber: Podes 2021

Gambar 2. 22 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021

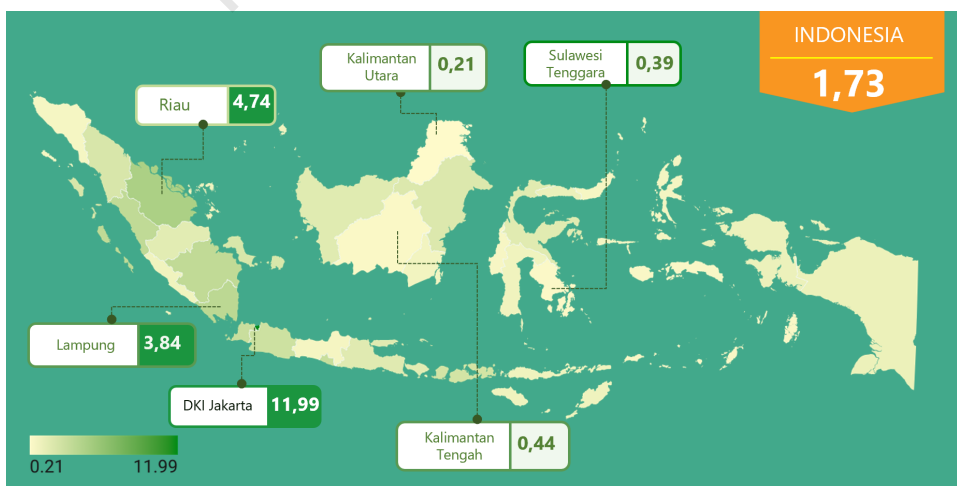
Banyaknya kejahatan pembunuhan pada tahun 2021 berdasarkan jumlah desa/kelurahan yang mengalami kejadian tersebut di 34 provinsi tergambar dalam Gambar 2.23. Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa tiga provinsi dengan jumlah desa/kelurahan yang paling banyak mengalami kejahatan pembunuhan secara berurutan adalah Jawa Timur (90 desa/kelurahan), Sumatera Selatan (65 desa/kelurahan), dan Sumatera Utara (64 desa/kelurahan). Sebaliknya, tiga provinsi dengan jumlah desa/kelurahan yang paling sedikit mengalami kejadian pembunuhan adalah Kalimantan Utara (3 desa/kelurahan) serta Kepulauan Riau dan Maluku Utara dengan jumlah desa/kelurahan yang sama, yaitu 5 desa/kelurahan.



Sumber: Podes 2021

Gambar 2. 23 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021

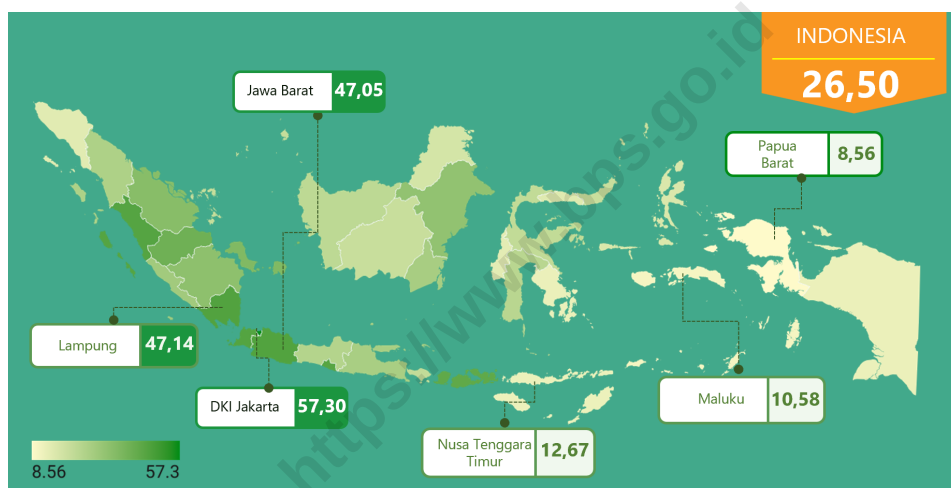
Persentase desa/kelurahan yang mengalami kejahatan pencurian dengan kekerasan sepanjang tahun 2021 di 34 provinsi berada pada rentang antara 0,21 hingga 11,99 persen (Gambar 2.24). Tiga provinsi dengan persentase tertinggi dalam kejahatan pencurian dengan kekerasan secara berurutan adalah DKI Jakarta (11,99 persen), Riau (4,74 persen), dan Lampung (3,84 persen). Sebaliknya, tiga provinsi dengan persentase terendah dalam kejahatan pencurian dengan kekerasan secara berurutan adalah Kalimantan Utara (0,21 persen), Sulawesi Tenggara (0,39 persen), dan Kalimantan Tengah (0,44 persen).



Sumber: Podes 2021

Gambar 2. 24 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021

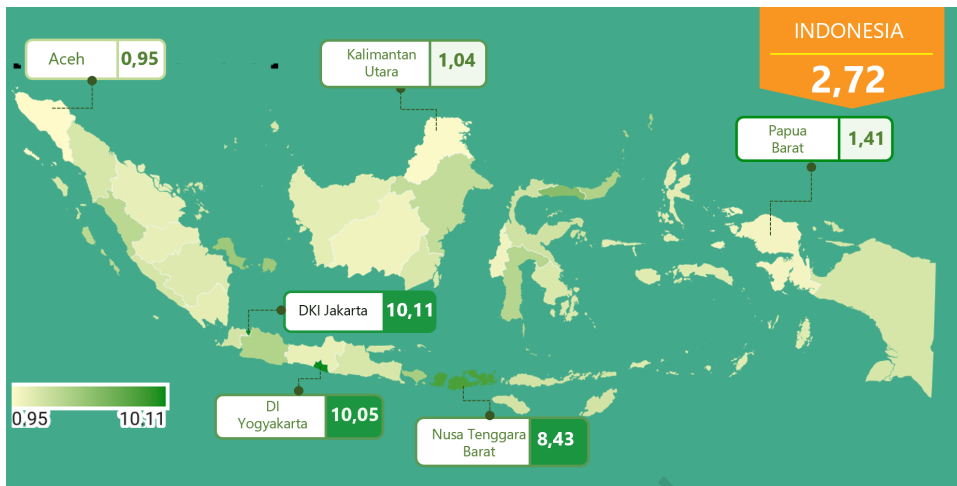
Kejahatan pencurian (tanpa kekerasan) merupakan jenis kejahatan yang umum terjadi di desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Dalam analisis tingkat provinsi, seperti yang terlihat dalam Gambar 2.25, persentase desa/kelurahan yang pernah mengalami kejahatan pencurian (tanpa kekerasan) selama tahun 2021 menunjukkan variasi yang signifikan, berkisar antara 8,56 hingga 57,30 persen dari total desa/kelurahan di masing-masing provinsi. Tiga provinsi dengan persentase tertinggi dalam kejadian kejahatan pencurian (tanpa kekerasan) selama tahun 2021 adalah DKI Jakarta (57,30 persen), Lampung (47,14 persen), dan Jawa Barat (47,05 persen). Di sisi lain, tiga provinsi dengan persentase terendah dalam kejadian kejahatan pencurian secara berurutan adalah Papua Barat (8,56 persen), Maluku (10,58 persen), dan Nusa Tenggara Timur (12,67 persen).



Sumber: Podes 2021

Gambar 2. 25 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian (Tanpa Kekerasan) Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021

Rentang persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian penganiayaan selama tahun 2021 berkisar antara 0,95 hingga 10,11 persen dari total desa/kelurahan di tiap provinsi, seperti yang terlihat pada Gambar 2.26. Tiga provinsi dengan persentase tertinggi dalam kejahatan penganiayaan secara berurutan adalah DKI Jakarta (10,11 persen), DI Yogyakarta (10,05 persen), dan Nusa Tenggara Barat (8,43 persen). Sebaliknya, tiga provinsi dengan persentase terendah dalam kejahatan penganiayaan secara berurutan adalah Aceh (0,95 persen), Kalimantan Utara (1,04 persen), dan Papua Barat (1,41 persen).

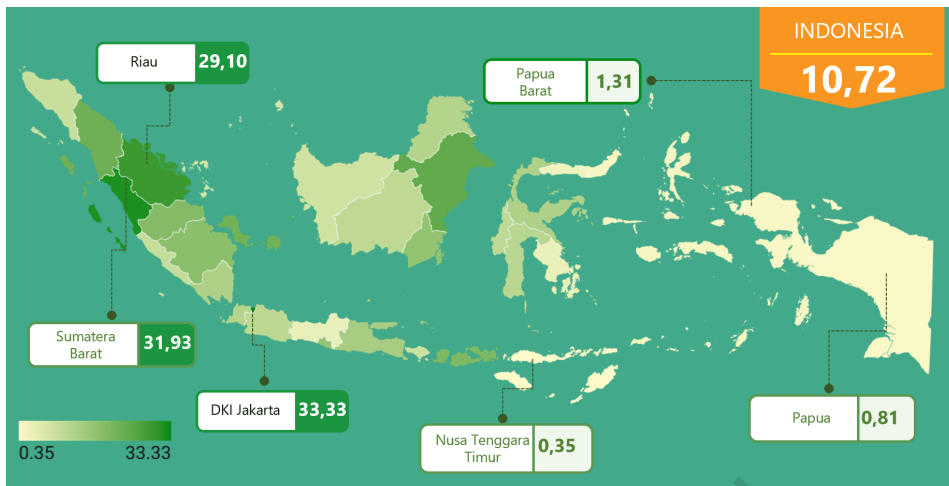


Sumber: Podes 2021

Gambar 2. 26 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021

Jika dilihat menurut provinsi, penyalahgunaan dan pengedaran narkoba telah menyebar di beberapa desa/kelurahan di seluruh Indonesia, sebagaimana halnya dengan kejahatan pencurian dan penganiayaan. Persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian kejahatan narkoba selama tahun 2021 bervariasi, berkisar antara 0,35 hingga 33,33 persen dari total desa/kelurahan di setiap provinsi (Gambar 2.27). Rentang yang signifikan ini menunjukkan variasi yang substansial dalam besaran dan tingkat keseriusan masalah kejahatan narkoba di setiap provinsi. Sebagai contoh, tiga provinsi dengan persentase tertinggi dalam kejadian penyalahgunaan dan pengedaran narkoba secara berurutan adalah DKI Jakarta (33,33 persen), Sumatera Barat (31,93 persen), dan Riau (29,10 persen). Di sisi lain, tiga provinsi dengan persentase terendah dalam kejadian penyalahgunaan dan pengedaran narkoba secara berurutan adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (0,35 persen), Papua (0,81 persen), dan Papua Barat (1,31 persen).

Tersedianya data terkait penyalahgunaan dan pengedaran narkoba hingga level desa/kelurahan dapat menjadi potensi dan dasar intervensi yang lebih terfokus dan tepat sasaran.



Sumber: Podes 2021

Gambar 2. 27 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penyalahgunaan dan Pedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021

2. 13 Perkelahian Massal

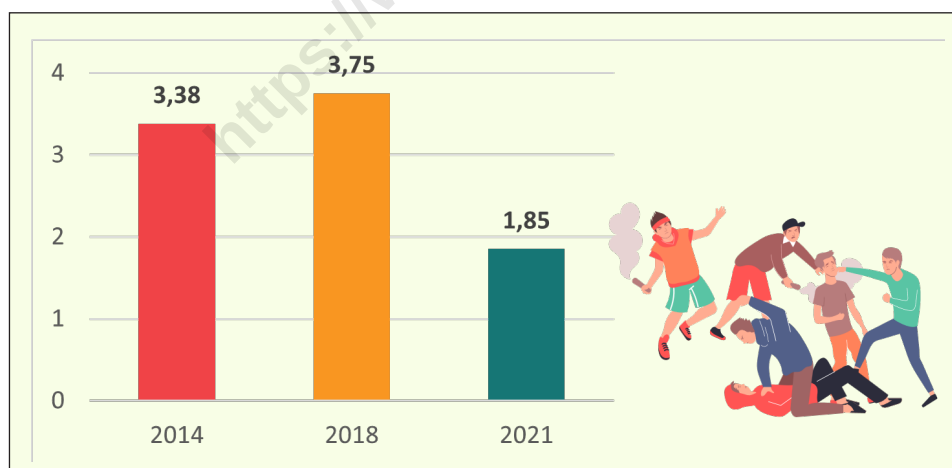
Bagian ini memaparkan mengenai perkelahian massal yang terjadi di Indonesia serta perkembangannya selama satu dekade terakhir secara umum. Aspek-aspek yang diperhatikan melibatkan jenis dan cakupan kejadian perkelahian massal, beserta langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikannya. Selain diklasifikasikan sebagai kejahatan, perkelahian massal juga dianggap sebagai kondisi yang mampu mengganggu stabilitas keamanan. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan untuk menanggapi tindak pidana perkelahian massal, termasuk Pasal 170, Pasal 358, dan Pasal 336 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Dahlan dan Tahir, 2014). Referensi hukum ini memberikan dasar untuk menilai dan menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan konflik fisik massal dengan landasan hukum yang jelas.

Konflik dapat diartikan sebagai interaksi antara dua pihak atau lebih, baik individu maupun kelompok, yang memiliki atau merasa memiliki tujuan yang tidak sejalan (Fisher, 2000 dalam Gamayanti & Nulhaqim, 2019). Definisi tersebut diperkuat oleh Soekanto (2005), yang menggambarkan konflik sebagai suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berupaya mencapai tujuan mereka dengan cara menantang pihak lawan, seringkali disertai ancaman dan/atau kekerasan. Konflik yang mencapai tingkat ekstrem berpotensi memunculkan kekerasan, bahkan dapat melibatkan perkelahian massal yang merugikan banyak pihak.

Konsekuensi dari eskalasi konflik dapat menjadi serius dan menuntut perhatian untuk mencegah dan menyelesaikannya dengan cara yang efektif dan damai.

Dalam pembahasan terkait konflik massal, sumber utama data adalah data kewilayahan yang didapatkan melalui Statistik Potensi Desa (Podes). Proses pengumpulan data Statistik Podes mencakup seluruh desa/kelurahan di Indonesia sebagai unit observasi. Oleh karena itu, dalam analisis mengenai perkelahian massal pada bagian ini, fokus utamanya adalah melihat cakupan jumlah atau persentase desa/kelurahan yang menjadi wilayah atau lokasi terjadinya konflik tersebut. Pendekatan ini memungkinkan untuk pemahaman yang holistik terhadap sebaran dan distribusi perkelahian massal di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan hasil Podes tahun 2014, 2018, dan 2021, terlihat fluktuasi dalam jumlah dan persentase desa/kelurahan yang mengalami perkelahian massal (Gambar 2.28). Pada tahun 2014, persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian perkelahian massal selama setahun terakhir mencapai 3,38 persen dari total desa/kelurahan di Indonesia. Angka ini mengalami peningkatan menjadi 3,75 persen pada tahun 2018, tetapi mengalami penurunan signifikan menjadi 1,85 persen desa/kelurahan pada tahun 2021. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika perubahan dalam kejadian perkelahian massal di berbagai wilayah Indonesia selama periode yang diamati.



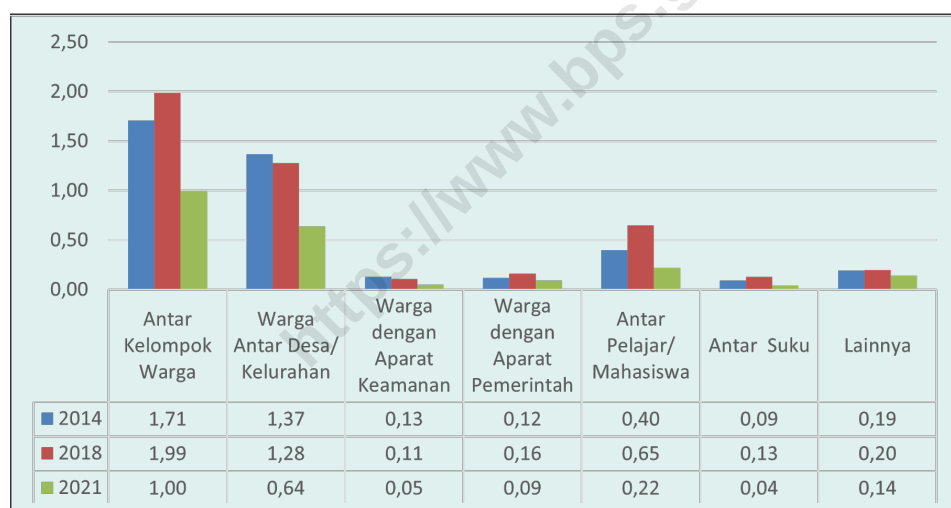
Sumber: Podes 2014, 2018, dan 2021

Gambar 2. 28 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal, 2014, 2018, dan 2021

Jenis-jenis perkelahian massal yang dikumpulkan dalam Podes melibatkan perkelahian antar kelompok warga, antar warga dari desa/kelurahan berbeda, melibatkan warga dengan aparat keamanan, warga dengan aparat pemerintah, antar pelajar, dan antar suku. Kejadian ini mencakup yang terjadi dalam setahun

terakhir dan dapat dipicu oleh berbagai faktor: saling ejek, salah paham, perilaku kenakalan remaja, dendam lama, atau alasan lainnya. Pada bagian ini, perkelahian yang tercatat terjadi di desa/kelurahan tempat kejadian dalam satu tahun terakhir, meskipun pelaku dan korban tidak berasal dari desa/kelurahan tersebut.

Berdasarkan hasil pendataan Podes tahun 2021, terlihat bahwa perkelahian antar kelompok mendominasi sebagai jenis perkelahian massal yang paling umum, diikuti oleh perkelahian antar warga dari desa/kelurahan yang mengalami perkelahian antar kelompok warga. Pada tahun 2014, persentase desa/kelurahan yang terlibat dalam perkelahian antar kelompok warga mencapai 1,71 persen, mengalami peningkatan menjadi 1,99 persen di tahun 2018, dan kemudian mengalami penurunan menjadi 1,00 persen di tahun 2021 (Gambar 2.29). Dinamika fluktuatif ini mencerminkan variasi dalam intensitas dan frekuensi perkelahian antar kelompok warga selama periode yang diamati, memberikan perspektif yang lebih mendalam terhadap perubahan pola konflik di tingkat desa/kelurahan.



Sumber: Podes 2014, 2018, dan 2021

Gambar 2. 29 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Tipenya, 2014, 2018, dan 2021

Terjadinya konflik memiliki dampak ganda dalam masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dapat terjadi jika konflik bersifat konstruktif, seperti mengubah *mindset* atau pola pikir masyarakat menuju arah yang lebih baik (Gamayanti & Nulhaqim, 2019). Di sisi lain, dampak negatif muncul ketika konflik mengakibatkan kerusakan pada harta benda yang dimiliki masyarakat (Gamayanti & Nulhaqim, 2019). Meskipun konflik dapat memberikan dorongan untuk perubahan positif, tetapi konflik tetap berpotensi menimbulkan terjadinya

perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebagai respon terhadap dinamika konflik, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang ini menegaskan peran aktif pemerintah dalam penyelesaian berbagai bentuk konflik, termasuk benturan fisik dan kekerasan, yang dapat mengancam keamanan dan menyebabkan disintegrasi sosial yang mengganggu stabilitas nasional serta menghambat pembangunan nasional. Melalui regulasi tersebut diharapkan dapat memitigasi dampak negatif konflik dan mendukung terciptanya lingkungan yang stabil dan harmonis di masyarakat.

Beberapa strategi yang dianggap lebih efektif dalam mengelola konflik, antara lain: (1) pendekatan konsistensi damai, di mana konflik diatasi melalui pengaturan yang tidak merugikan dan mengganggu pihak lain, dengan menerapkan peraturan yang berlandaskan pada prinsip perdamaian dan diterapkan secara konsisten; dan (2) mediasi atau perantara. Strategi mediasi menjadi pilihan saat konflik mengalami kebuntuan, di mana pihak ketiga diangkat sebagai perantara yang bertindak secara objektif, jujur, dan tanpa keberpihakan (Gurr dalam Soetopo, 2001). Adanya variasi strategis ini memberikan fleksibilitas dalam penanganan konflik, memungkinkan penyesuaian terhadap dinamika dan kompleksitas situasi yang muncul. Pendekatan konsistensi damai dan mediasi tidak hanya menciptakan solusi yang adil, tetapi juga membuka jalan untuk pemahaman mendalam dan penyelesaian yang berkelanjutan terhadap konflik.

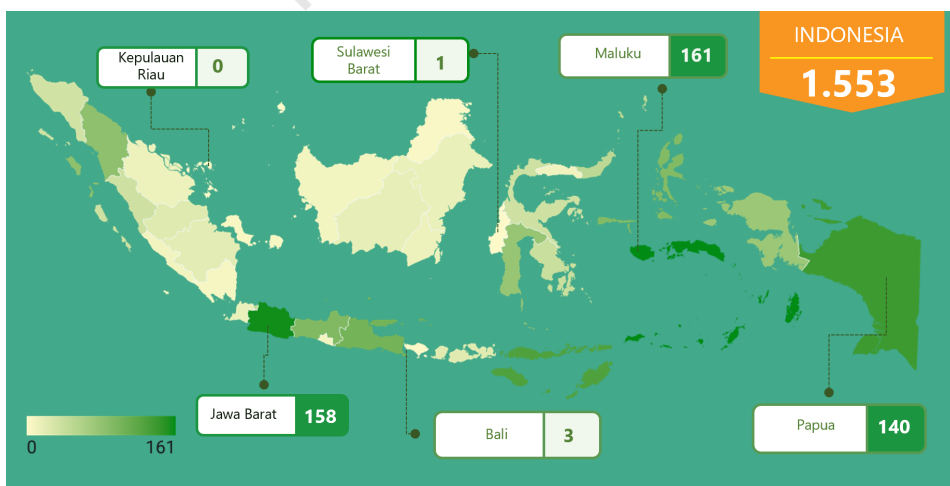


Sumber: Podes 2014, 2018, dan 2021

Gambar 2. 30 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Penyelesaiannya, 2014, 2018, dan 2021

Dari data yang tergambar pada Gambar 2.30, dapat diamati bahwa persentase penyelesaian kasus perkelahian massal menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2014, persentase kejadian tersebut mencapai 92,26 persen, meningkat menjadi 94,09 persen pada tahun 2018, dan terus melonjak hingga mencapai 95,49 persen pada tahun 2021. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam penanganan masalah perkelahian massal di Indonesia, menandakan adanya perbaikan dalam mekanisme penyelesaian konflik. Namun, perlu diingat bahwa sekitar 4,51 persen desa/kelurahan di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan kasus perkelahian massal pada tahun 2021. Oleh karena itu, untuk memastikan peningkatan yang berkelanjutan partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat sangat diperlukan. Masyarakat diharapkan ikut serta dalam upaya penyelesaian perkelahian massal di wilayah desa/kelurahan tempat tinggalnya, sehingga konflik yang masih belum terselesaikan dapat segera mendapatkan solusinya melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.

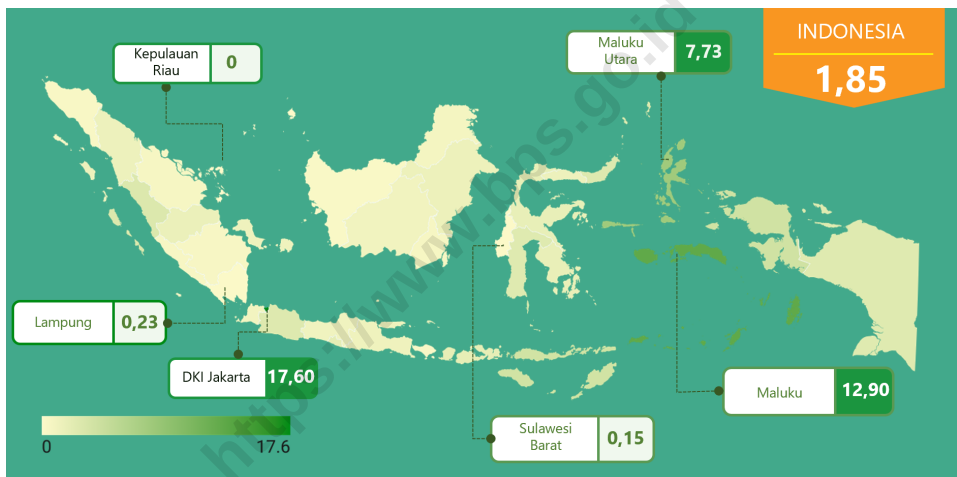
Jumlah insiden konflik massal bervariasi di setiap provinsi selama tahun 2021. Ketika melihat jumlah desa/kelurahan yang terlibat, provinsi-provinsi dengan jumlah terbanyak adalah Maluku (161 desa/kelurahan), Jawa Barat (158 desa/kelurahan), dan Papua (140 desa/kelurahan). Di sisi lain, provinsi-provinsi dengan jumlah desa/kelurahan terkecil yang mengalami perkelahian massal adalah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak melaporkan adanya kejadian di desa/kelurahan, diikuti oleh Sulawesi Barat dengan satu desa/kelurahan, dan Bali dengan tiga desa/kelurahan (Gambar 2.31).



Sumber: Podes 2021

Gambar 2. 31 Jumlah Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021

Provinsi DKI Jakarta (17,60 persen), Maluku (12,90 persen), dan Maluku Utara (7,73 persen), merupakan tiga provinsi dengan tingkat perkelahian massal di desa/kelurahan tertinggi pada tahun 2021. Di sisi lain, Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan angka nol persen, menjadikannya sebagai provinsi dengan tingkat perkelahian massal terendah, diikuti oleh Sulawesi Barat dengan 0,15 persen, dan Lampung dengan 0,23 persen (Gambar 2.32). Kondisi ini memberikan gambaran yang lebih rinci tentang konflik massal di berbagai provinsi, terutama terkait ketidaksetaraan yang signifikan dalam tingkat kejadian antarwilayah. Dengan memahami dinamika tersebut, langkah-langkah khusus dalam penanganan konflik massal dapat diambil untuk mengatasi tantangan yang spesifik di masing-masing provinsi.



Sumber: Podes 2021

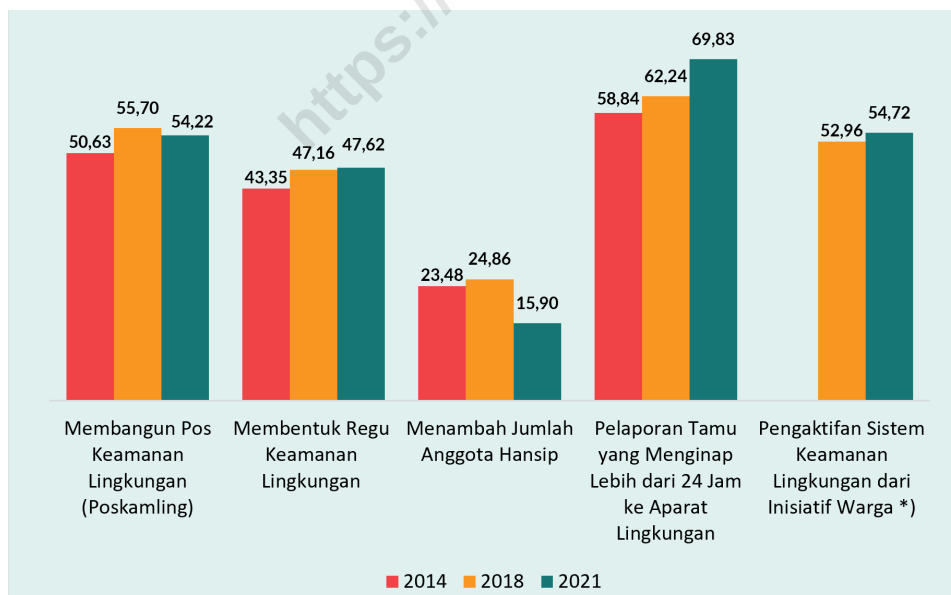
Gambar 2. 32 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021

2. 14 Upaya Menjaga Keamanan

Lingkungan di tingkat desa/kelurahan, seperti dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT), seringkali aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), seperti pencurian, pencurian kendaraan bermotor (curanmor), dan gangguan Kamtibmas lainnya melalui Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Bagian ini membahas upaya dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungan desa/kelurahan tempat tinggal dan perkembangannya selama satu dekade terakhir.

Data yang dianalisis untuk memahami upaya menjaga keamanan ini adalah data kewilayahan (*spatial data*) dari Pendataan Podes dengan seluruh desa/kelurahan di Indonesia sebagai unit observasi. Perkembangan upaya dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan akan dilihat dari cakupan dan perkembangan jumlah desa/kelurahan yang melibatkan diri dalam upaya tersebut. Upaya menjaga keamanan, seperti pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan (poskamling), pembentukan/pengaturan regu keamanan, penambahan jumlah anggota Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat (Hansip/Linmas), pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam kepada aparat lingkungan, serta pengaktifan sistem keamanan lingkungan yang berasal dari inisiatif warga, merupakan bagian dari hasil Podes.

Gambar 2.33 menunjukkan bahwa pada tahun 2021, pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam kepada aparat lingkungan menjadi upaya yang paling umum dilakukan oleh warga desa untuk menjaga keamanan (69,83 persen), diikuti oleh pengaktifan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga (54,72 persen) dan pembangunan pos keamanan lingkungan (poskamling) (54,22 persen). Meskipun demikian, terdapat penurunan dalam upaya pembangunan poskamling dan penambahan jumlah anggota hansip/linmas jika dibandingkan dengan hasil Podes 2018.

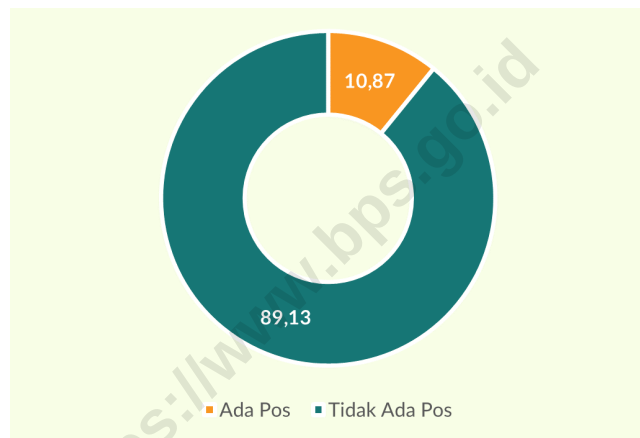


Catatan : *) Pengaktifan sistem keamanan lingkungan dari inisiatif warga baru tersedia pada Podes 2018 dan 2021

Sumber : Podes 2014, 2018, dan 2021

Gambar 2. 33 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2014, 2018, dan 2021

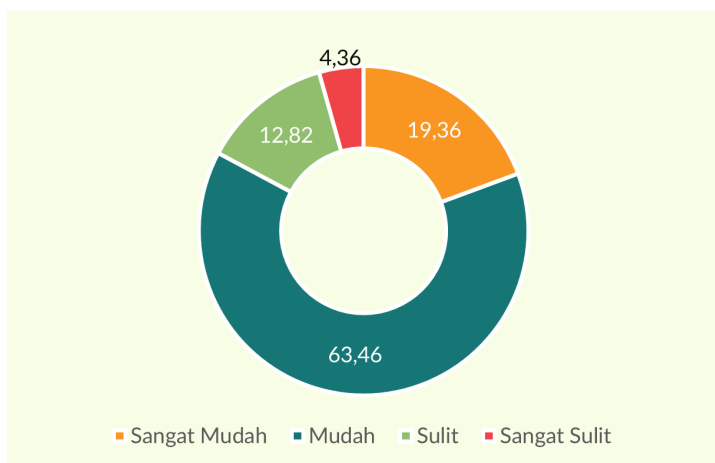
Menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab aparat berwenang, yang dalam konteks ini adalah kepolisian. Pendataan Podes menggunakan persentase desa/kelurahan yang memiliki pos polisi untuk mendapat gambaran terkait hal tersebut. Pos polisi, yang merupakan unit terkecil dari Kepolisian Sektor (Polsek), memiliki peran krusial dalam menjalankan fungsi kepolisian di tingkat lokal, terutama dalam memelihara Kamtibmas di wilayahnya. Fungsi utama pos polisi mencakup analisis masalah keamanan dan ketertiban di wilayahnya, serta upaya dan pembenahan sebelum masalah tersebut menjadi situasi yang memerlukan penanganan represif atau penegakan hukum (Sholichin, 2014).



Sumber: Podes 2021

Gambar 2. 34 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi, 2021

Gambar 2.34 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 hanya sekitar 10,87 persen dari total desa/kelurahan di Indonesia yang memiliki pos polisi (termasuk Polsek, Polres, dan Polda) di wilayahnya. Meskipun demikian, dari sekitar 89,13 persen desa/kelurahan yang tidak memiliki pos polisi, terdapat sekitar 19,36 persen desa/kelurahan yang menyatakan bahwa akses ke pos polisi terdekat dianggap mudah dan 63,46 persen menyatakan sangat mudah (Gambar 2.35). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun tidak semua desa/kelurahan memiliki pos polisi, sebagian besar dari mereka menganggap akses ke fasilitas kepolisian terdekat cukup mudah.



Sumber: Podes 2021

Gambar 2. 35 Persentase Desa/Kelurahan yang Tidak Memiliki Pos Polisi Menurut Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat, 2021

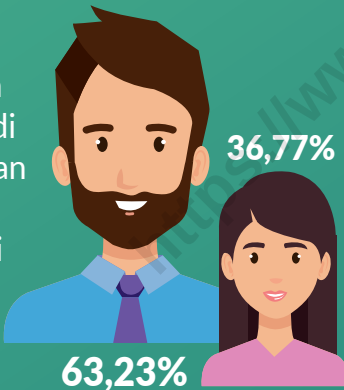
3

KORBAN KEJAHATAN

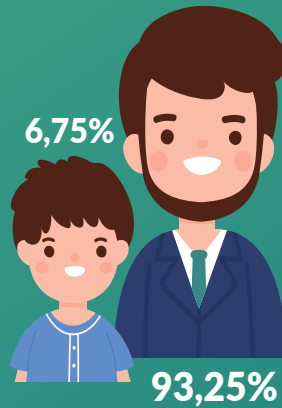
0,53% penduduk Indonesia mengalami kejadian kejahatan pada tahun 2022



Laki-laki lebih banyak menjadi korban kejahatan daripada perempuan di tahun 2022



6,75%



Sebagian besar korban kejahatan di tahun 2022 adalah penduduk dewasa



22,98% korban kejahatan pada tahun 2022 melaporkan kepada polisi



24,04% korban kejahatan yang melapor ke polisi mendapatkan/ditemani bantuan hukum pada tahun 2022

BAB III

Korban Kejahatan

3.1 Penduduk Korban Kejahatan

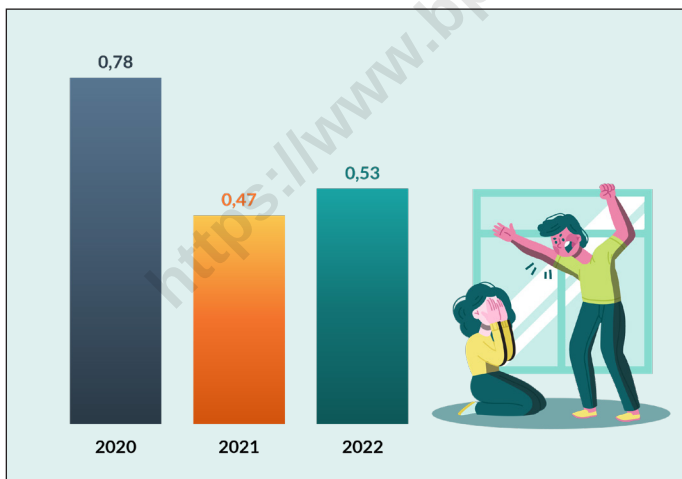
Korban adalah orang, baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, baik fisik, mental, emosional maupun pembusukan (*impairment*) terhadap hak-hak dasar mereka, baik melalui perbuatan maupun tidak namun merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional di samping juga berdasarkan norma-norma internasional diakui berkaitan dengan hak asasi manusia (*Handbook on Justice for Victims*, 1999: 118). Berdasarkan “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*” pada tanggal 6 September 1985 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985, ditegaskan bahwa korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif yang menderita kerugian baik secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka, yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban didefinisikan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Seseorang dikatakan menjadi korban kejahatan bila dalam satu tahun terakhir dirinya atau harta bendanya mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang dan harta bendanya, misalnya penipuan, pencurian, pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan dan perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan dan pencabulan), dan lainnya seperti penculikan, pemerasan, dan sebagainya.

Korban kejahatan yang dibahas dalam bagian ini, baik jumlah maupun karakteristiknya, diperoleh dari Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yakni pada Blok IX tentang Keterangan Bepergian dan Korban Kejahatan Susenas yang menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu satu tahun sebelum survei. Dengan demikian, Susenas 2021 menggambarkan pengalaman

responden pada kurun waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2020, Susenas 2022 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2021, dan Susenas 2023 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2022.

Berdasarkan hasil Susenas 2023, persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan pada tahun 2022 adalah sebesar 0,53 persen dari populasi penduduk Indonesia (Gambar 3.1). Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, persentase korban kejahatan di Indonesia mengalami fluktuasi. Persentase korban kejahatan sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari yang semula sebanyak 0,78 persen di tahun 2020 menjadi 0,47 persen di tahun 2021. Namun, cukup disayangkan bahwa nilai ini mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,53 persen di tahun 2022. Kenaikan persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan di tahun 2022 ini sejalan dengan kondisi indikator kriminalitas dari data administratif kepolisian, di mana terjadi kenaikan pada indikator *crime total* dan *crime rate* serta penurunan *crime clock*.

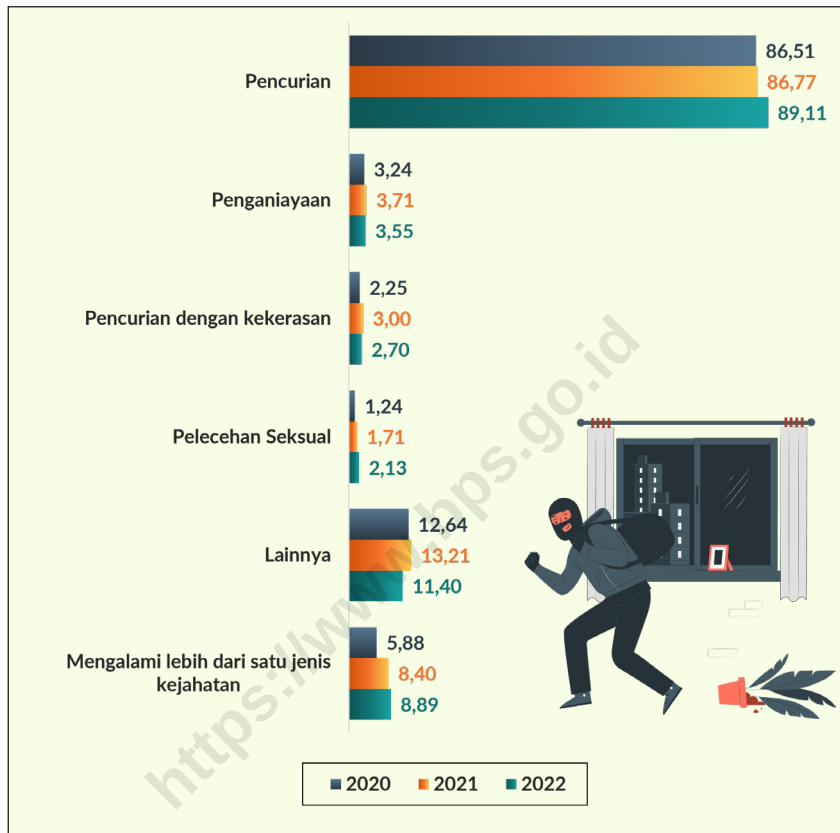


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021–2023

Gambar 3. 1 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan, 2020–2022

Berdasarkan jenis kejahatan selama tahun 2020–2022, sebagian besar penduduk korban kejahatan mengalami jenis kejahatan pencurian (Gambar 3.2). Persentase korban kejahatan pencurian terus meningkat dari 86,51 persen di tahun 2020 menjadi 86,77 persen di tahun 2021 kemudian meningkat lagi menjadi 89,11 persen di tahun 2022. Persentase korban kejahatan terendah terdapat pada jenis kejahatan pelecehan seksual. Pada tahun 2020, kejahatan pelecehan seksual yang dialami sebesar 1,24 persen, kemudian mengalami peningkatan menjadi 1,71

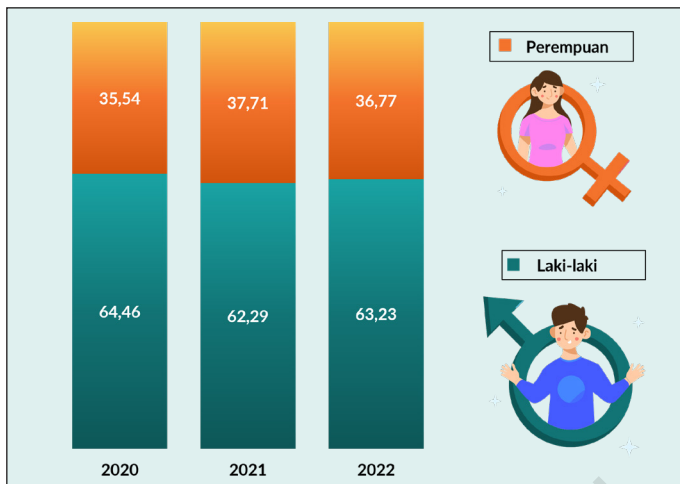
persen di tahun 2021 dan 2,13 persen di tahun 2022. Persentase korban kejahatan yang mengalami lebih dari satu jenis kejahatan juga meningkat dari 5,88 persen di tahun 2020 menjadi 8,40 persen di tahun 2021 dan 8,89 persen di tahun 2022.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021–2023

Gambar 3. 2 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan yang Dialami, 2020–2022

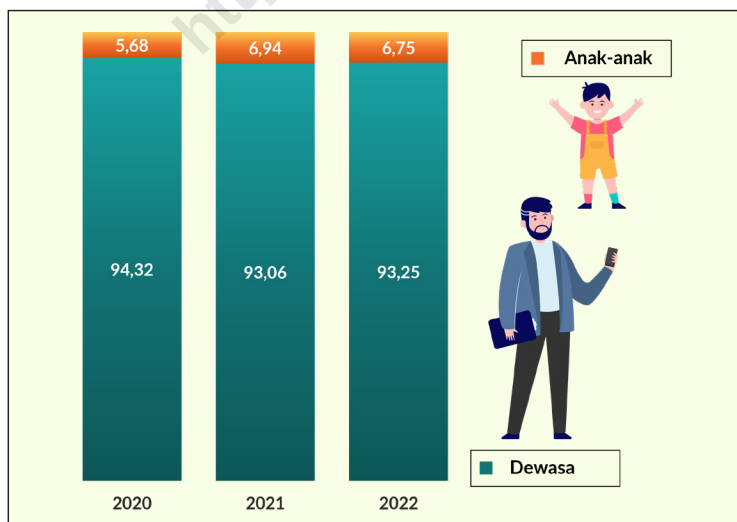
Penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dapat dilihat polanya berdasarkan jenis kelamin (Gambar 3.3) dan kelompok umur (Gambar 3.4). Selama tahun 2020–2022, sebagian besar penduduk yang menjadi korban kejahatan berjenis kelamin laki-laki dengan persentase lebih dari 60 persen. Sementara itu, persentase perempuan yang menjadi korban kejahatan berada pada kisaran 30 persen selama periode 2020–2022 dengan persentase sebesar 36,77 persen di tahun 2022.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021–2023

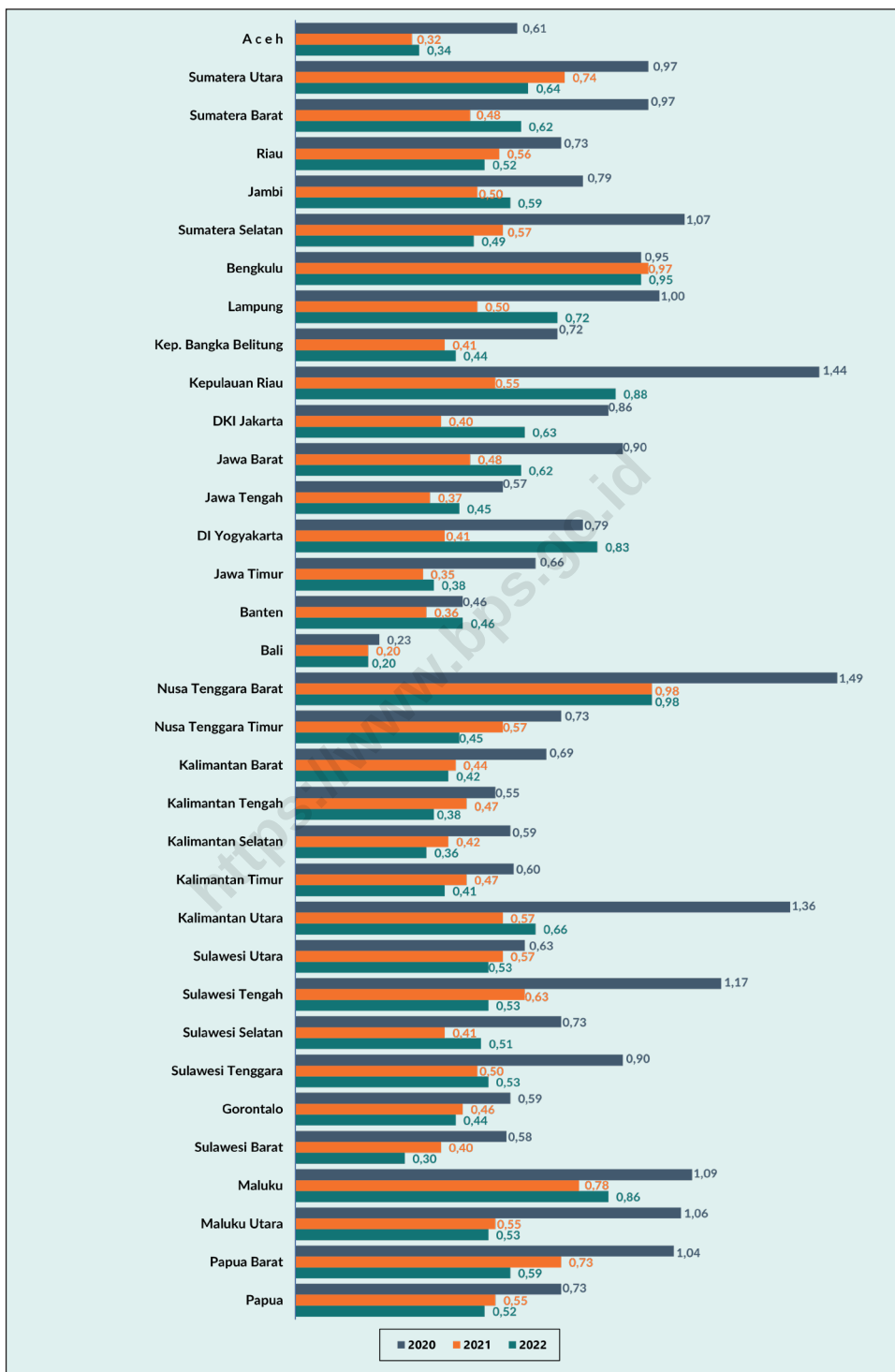
Gambar 3.3 Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin, 2020–2022

Berdasarkan kelompok umurnya, korban kejahatan yang berada pada kelompok umur dewasa selama tahun 2020–2022 cukup dominan dengan persentase lebih dari 90 persen. Sementara itu, persentase korban kejahatan pada kelompok umur anak-anak sempat mengalami peningkatan, dari yang semula sebesar 5,68 persen di tahun 2020 menjadi 6,94 persen di tahun 2021, kemudian menurun menjadi 6,75 persen di tahun 2022.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021–2023

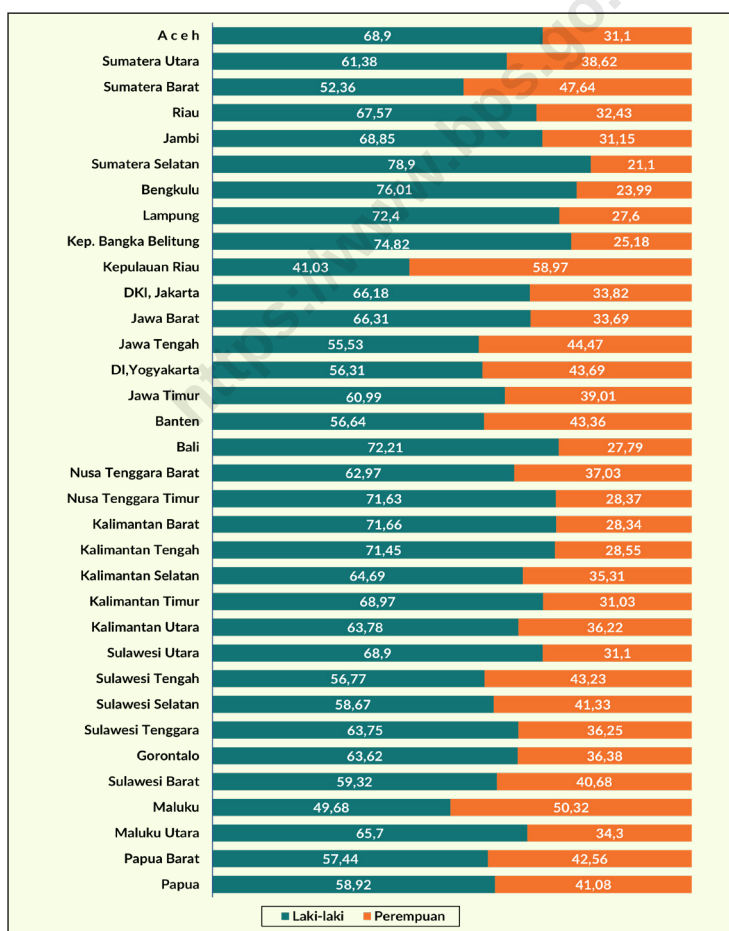
Gambar 3.4 Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Umur, 2020–2022



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021–2023

Gambar 3.5 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Provinsi, 2020–2022

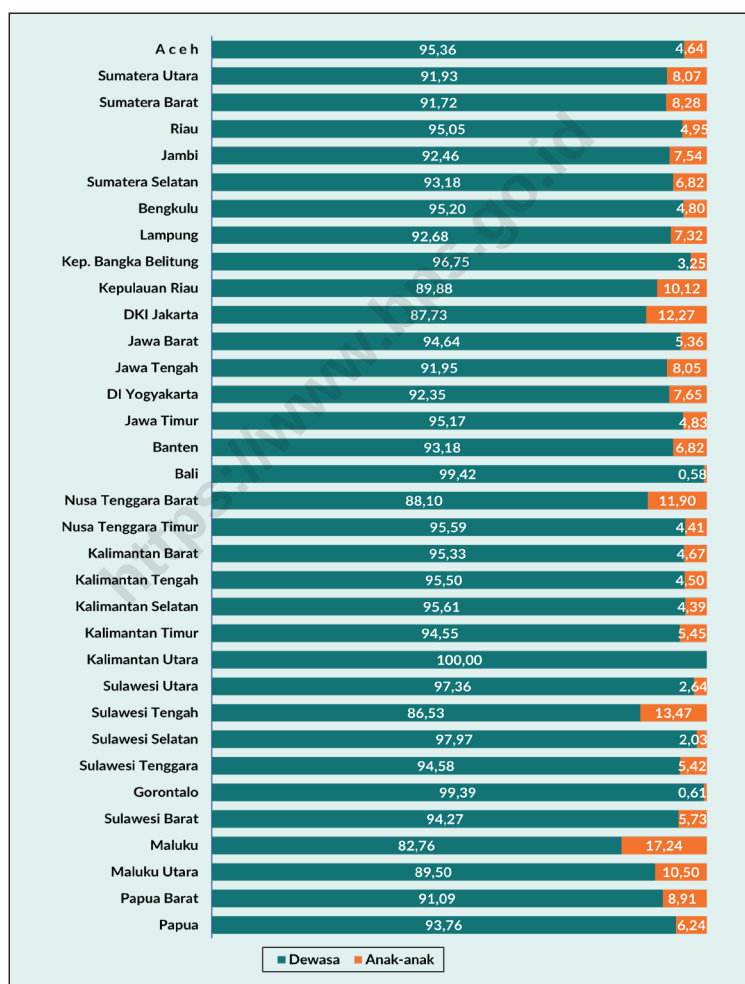
Berdasarkan Gambar 3.5, Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan persentase korban kejahatan terbanyak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu sebesar 1,49 persen di tahun 2020 serta 0,98 persen di tahun 2021 dan 2022. Di sisi lain, Provinsi Bali secara konsisten memiliki persentase penduduk korban kejahatan terendah, baik pada tahun 2020 (0,23 persen) maupun tahun 2021 dan 2022 (masing-masing 0,20 persen). Apabila dilihat dari perkembangannya, terdapat 18 provinsi di Indonesia yang mengalami kenaikan persentase korban kejahatan di tahun 2022, di mana kenaikan terbesar terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (+0,42 persen). Adapun berdasarkan jenis kelamin (Gambar 3.6), persentase korban kejahatan yang berjenis kelamin laki-laki di tahun 2022 cukup mendominasi di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Dua provinsi dengan persentase korban kejahatan berjenis kelamin perempuan yang lebih banyak adalah Provinsi Kepulauan Riau (58,97 persen) dan Provinsi Maluku (50,32 persen).



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023

Gambar 3. 6 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Provinsi, 2022

Komposisi penduduk korban kejahatan menurut kelompok umur secara keseluruhan untuk semua provinsi menunjukkan bahwa persentase korban kejahatan di tahun 2022 didominasi oleh penduduk dewasa dengan persentase di atas 80 persen (Gambar 3.7). Di sisi lain, perlu menjadi perhatian mengingat masih terdapat beberapa provinsi dengan persentase korban kejahatan pada kelompok anak-anak di atas 10 persen, yaitu Provinsi Maluku (17,24 persen), Provinsi Sulawesi Tengah (13,47 persen), Provinsi DKI Jakarta (12,17 persen), Provinsi Nusa Tenggara Barat (11,90 persen), dan Provinsi Kepulauan Riau (10,12 persen).



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023

Gambar 3.7 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Umur dan Provinsi, 2022

3.2 Tingkat Pelaporan kepada Polisi

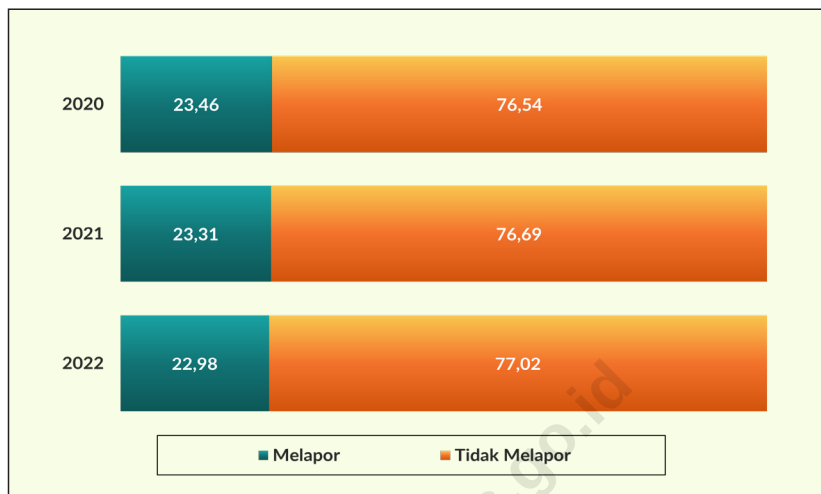
Berdasarkan KUHP Pasal 108 ayat 1, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik, baik lisan maupun tertulis. Pelaporan atau pengaduan ini merupakan salah satu upaya agar hak atas rasa adil bisa diperoleh. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil."

Pada tanggal 29 November 1985, Majelis Umum PBB mengadopsi "*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*" yang di dalamnya menegaskan bahwa korban berhak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan dan mendapatkan ganti rugi segera atas kerugian yang mereka derita. Lebih lanjut lagi, United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention/UNODCCP (sekarang menjadi United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC) mengeluarkan *Handbook on Justice for Victims* sebagai pedoman pelaksanaan program bantuan korban sebagai wujud pemenuhan hak korban untuk mendapatkan akses terhadap keadilan dengan membantu korban dalam menghadapi trauma, berpartisipasi dalam proses peradilan pidana, mendapatkan ganti rugi, dan mengatasi masalah lainnya terkait dengan viktimisasi.

Tersedianya indikator tingkat pelaporan kepada polisi dapat digunakan untuk melihat akses kepada keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak yang berwenang. Jika pihak yang berwenang tidak menerima laporan atau diperingatkan mengenai terjadinya korban kejahatan, maka tindakan penyelidikan dan pengadilan tidak dapat dilakukan. Selain itu, indikator ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum dalam membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dialami.

Berdasarkan Gambar 3.8, persentase korban kejahatan yang melapor ke polisi masih relatif rendah dan cenderung menurun selama tiga tahun terakhir, dari yang semula sebanyak 23,46 di tahun 2020 menjadi 23,31 persen di tahun 2021 dan terus menurun hingga menjadi 22,98 persen di tahun 2022. Rendahnya tingkat pelaporan masyarakat yang mengalami kejahatan sebagaimana disajikan pada Gambar 3.8 menunjukkan bahwa data registrasi polisi masih belum dapat

menggambarkan keseluruhan kejadian yang dialami oleh masyarakat. Dengan kata lain, angka gelap kejahatan (*dark number of crimes*) secara umum masih relatif tinggi.

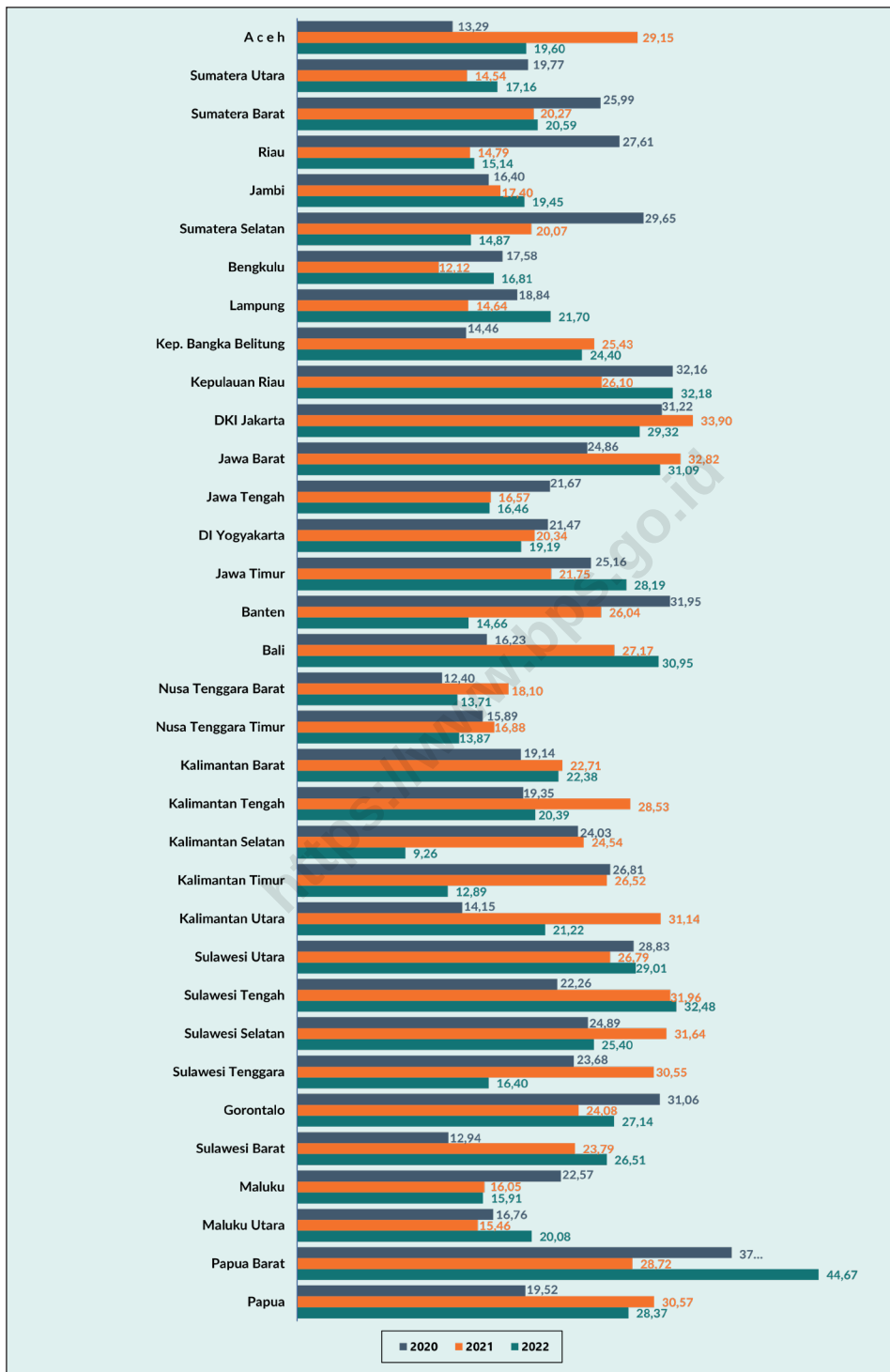


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021–2023

Gambar 3. 8 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi, 2020–2022

Apabila dilihat menurut wilayahnya, terdapat 19 provinsi yang mengalami penurunan persentase penduduk korban kejahatan yang melaporkan ke polisi di tahun 2022 (Gambar 3.9). Penurunan terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan (-15,28 persen) dan menjadikannya sebagai provinsi dengan persentase pelaporan ke polisi yang terendah di tahun 2022 (9,26 persen). Di sisi lain, persentase korban kejahatan yang melaporkan ke polisi tertinggi pada tahun 2022 terdapat di Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 44,67 persen. Capaian ini didukung dengan adanya kenaikan yang sangat signifikan dari nilai 28,72 persen di tahun 2021 (+15,95 persen).

Korban kejahatan berhak mendapatkan akses terhadap keadilan, salah satunya dengan cara melaporkan kejahatan yang dialaminya kepada polisi. Dari tahun 2020–2022, terjadi penurunan persentase korban kejahatan yang melapor ke polisi.



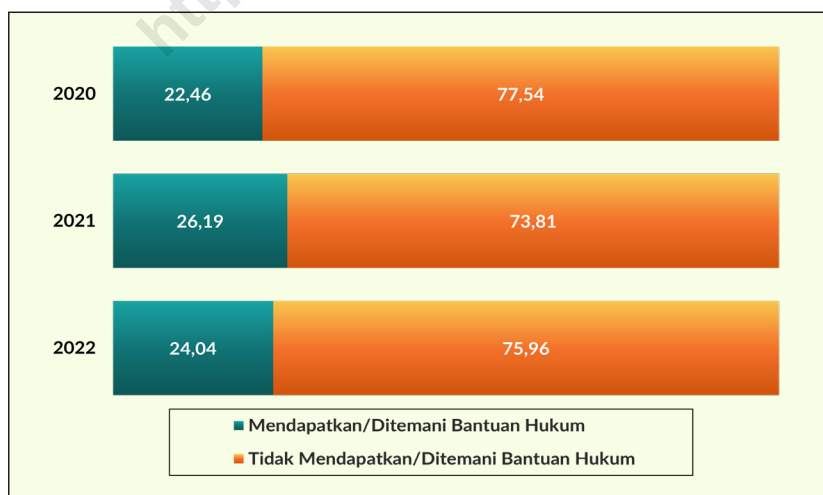
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021–2023

Gambar 3.9 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Berdasarkan Provinsi, 2020–2022

3.3 Bantuan Hukum bagi Korban Kejahatan

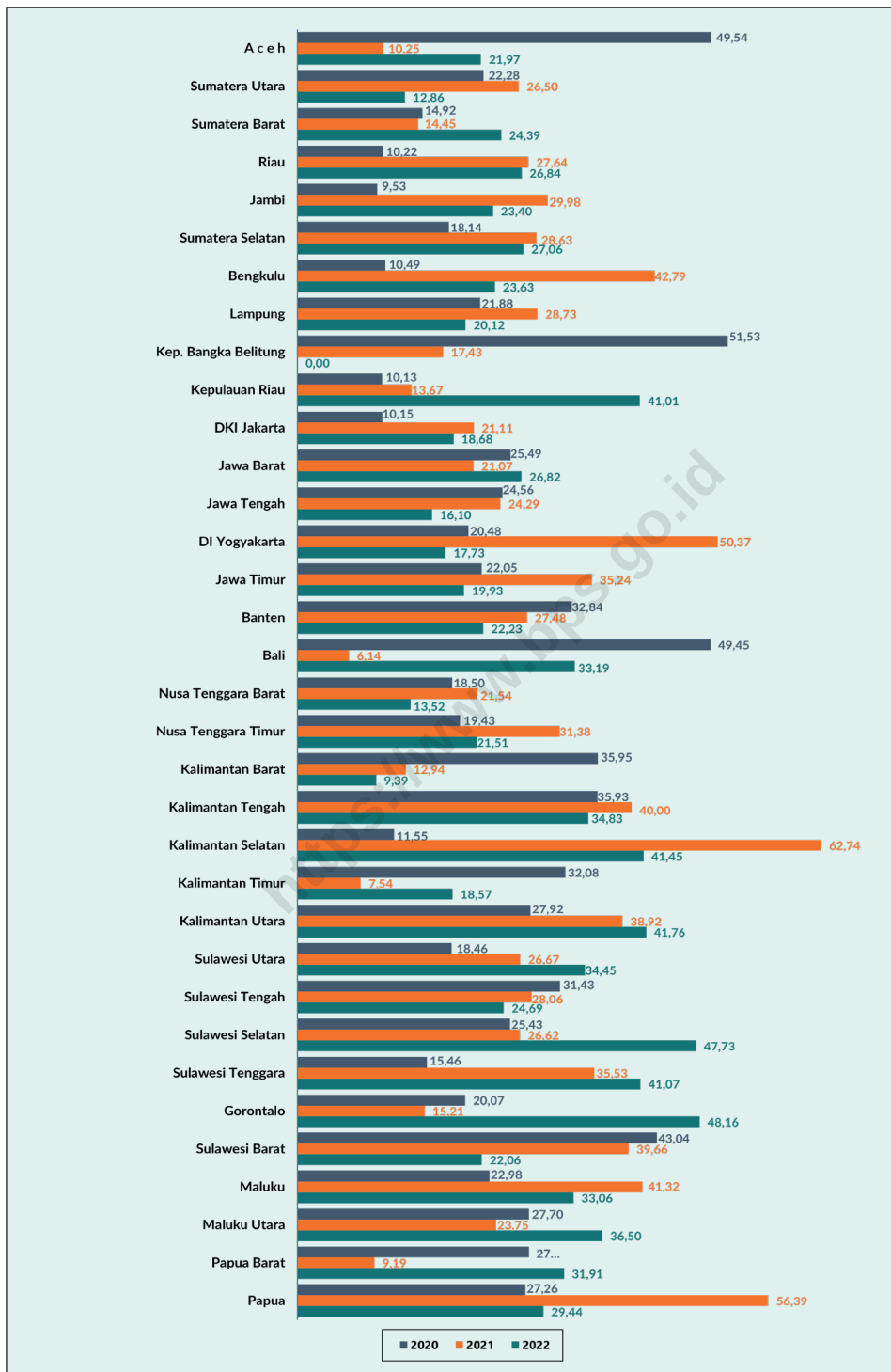
Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal dan dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Gambar 3.10 menunjukkan bahwa persentase penduduk korban kejahatan yang melaporkan ke polisi dan mendapatkan/ditemani bantuan hukum cukup fluktuatif selama tahun 2020–2022. Pada tahun 2021 persentasenya sebesar 26,19 persen, mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2020 (22,46 persen). Namun, persentase ini menurun menjadi 24,04 persen di tahun 2022.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021–2023

Gambar 3. 10 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi dan Mendapatkan/Ditemani Bantuan Hukum, 2020–2022



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021–2023

Gambar 3. 11 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi dan Mendapatkan/Ditemani Bantuan Hukum Berdasarkan Provinsi, 2020–2022

Berdasarkan wilayah, persentase penduduk korban kejahatan yang melaporkan ke polisi dan mendapatkan/ditemani bantuan hukum mengalami penurunan di 21 provinsi pada tahun 2022 (Gambar 3.11). Penurunan terbesar terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dari yang semula bernilai 50,37 persen di tahun 2021 menjadi 17,73 persen di tahun 2022 (-32,64 persen). Meskipun demikian, persentase terendah terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di mana tidak ada korban kejahatan yang mendapatkan/ditemani bantuan hukum setelah melaporkan ke polisi di tahun 2022. Di sisi lain, terdapat peningkatan yang cukup besar di Provinsi Gorontalo (+32,95 persen) dan menjadikannya sebagai provinsi dengan persentase tertinggi dalam hal penerimaan bantuan hukum bagi korban kejahatan di tahun 2022 (48,16 persen).

<https://www.bps.go.id>

4

INDIKATOR SDGs TERKAIT KEAMANAN

16.1.3.(a)

0,03% penduduk Indonesia
menjadi korban kejahatan kekerasan
dalam 12 bulan terakhir



16.3.1.(a)

57,75% penduduk yang menjadi
korban kejahatan kekerasan
melaporkan ke kepolisian

16.5.2*

17,40% pelaku usaha membayar
melebihi ketentuan ketika mengakses
layanan publik



BAB IV

Indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terkait Keamanan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda pembangunan global hingga 2030 yang telah diadopsi oleh PBB pada tahun 2015 menggantikan *Millenium Development Goals* (MDGs). SDGs merupakan rencana aksi global yang berlaku universal sebagai upaya untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan layak dengan berlandaskan prinsip “*Leave No One Behind*”. Dalam pelaksanaannya, SDGs dituangkan ke dalam 17 tujuan dan 169 target. Tujuan dan target SDGs menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi yang menjadi panduan bagi komunitas global selama 2016-2030 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global.

Pembangunan berkelanjutan tidak akan terwujud tanpa adanya kedamaian, stabilitas, perlindungan hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang efektif berdasarkan *rule of law*. Sejalan dengan itu, tujuan 16 SDGs (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) hadir untuk menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, serta membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level. Tujuan 16 SDGs ini memuat beberapa indikator SDGs yang berkaitan dengan kondisi keamanan yang menjadi cakupan dalam publikasi ini. Adapun target pada tujuan 16 terkait dengan publikasi ini antara lain secara signifikan mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan angka kematian terkait di mana pun, mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional dan akses keadilan yang sama untuk semua, serta secara substansial mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk.

Tabel 2. Indikator SDGs terkait Keamanan

Indikator	Sumber Data	Frekuensi Waktu Pengumpulan Data
(1)	(2)	(3)
16.1.1.(a). Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kepolisian Republik Indonesia	Tahunan
16.1.3.(a). Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Tahunan

Indikator	Sumber Data	Frekuensi Waktu Pengumpulan Data
(1)	(2)	(3)
16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial	Tiga Tahunan
16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Tahunan
16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)	Tahunan
16.5.1* Proporsi Penduduk yang Memiliki Paling Tidak Satu Kontak Hubungan dengan Petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir	Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)	Tahunan
16.5.2* Proporsi pelaku bisnis yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik, atau diminta untuk menerima suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir	Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)	Tahunan

4.1 Target 16.1.1.(a). Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan pada Satu Tahun Terakhir

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lebih lanjut, *Handbook on Governance Statistics* menjelaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak fundamental dan perlindungan efektif yang merupakan prasyarat untuk melindungi keselamatan dan keamanan seseorang sebagai pemegang hak. Sejalan dengan itu, *International Classification of Crime for Statistical Purposes* (ICCS) dan KUHP mengkategorikan kejahatan pembunuhan sebagai bentuk kejahatan yang paling ekstrem dan memiliki tingkat keseriusan paling tinggi. Dengan demikian, ketersediaan indikator tentang jumlah kasus kejahatan pembunuhan dapat mengindikasikan lemah dan kurangnya tingkat keamanan di masyarakat. Selain itu, indikator terkait jumlah

kasus kejahatan pembunuhan juga menunjukkan risiko yang dihadapi masyarakat terhadap kematian akibat pembunuhan.

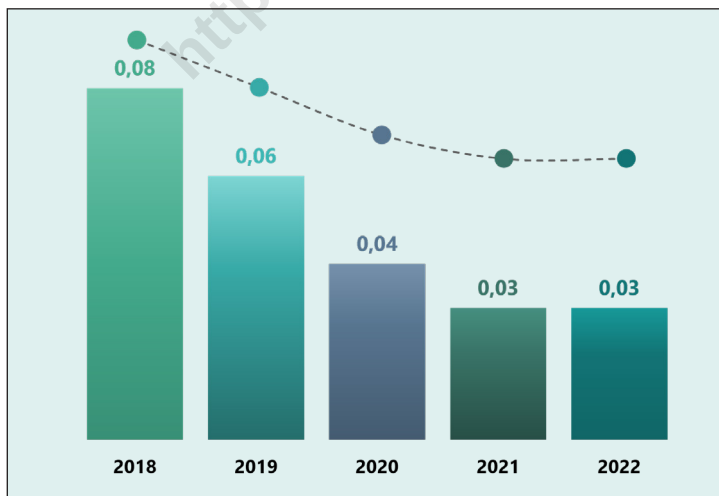
Berdasarkan buku Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia Edisi II Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, kasus pembunuhan adalah kasus-kasus yang terjadi akibat kejahatan tindakan pembunuhan, yang merujuk pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua–Kejahatan, Bab XIX tentang Kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian (Bappenas, 2020). Di Indonesia, jumlah kasus kejahatan pembunuhan ini digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur indikator 16.1.1 SDGs yang secara global seharusnya diukur menggunakan jumlah korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk. Pada indikator 16.1.1.(a) ini, jumlah kasus kejahatan pembunuhan yang diukur adalah dalam kurun waktu satu tahun terakhir atau 12 bulan terakhir.

Selama periode tahun 2018 hingga 2020, jumlah kasus kejahatan pembunuhan yang dicatat terus mengalami penurunan. Pada tahun 2018, terdapat 1.024 kejadian kejahatan pembunuhan; turun menjadi 964 kejadian di tahun 2019; dan terus menurun menjadi 898 di tahun 2020. Tren penurunan kasus kejahatan pembunuhan ini tidak terjadi di tahun 2021 karena terdapat kenaikan kasus kejahatan pembunuhan menjadi 927 kasus. Meskipun demikian, terjadi perbaikan yang cukup signifikan dengan menurunnya jumlah kasus kejahatan pembunuhan di tahun 2022 hingga mencapai 854 kasus dan menjadi jumlah kasus kejahatan pembunuhan terendah selama lima tahun terakhir (Gambar 2.5).

4.2 Target 16.1.3.(a). Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir

Berdasarkan buku Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia Edisi II Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola mendefinisikan bahwa korban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Adapun kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan dan perampokan), penganiayaan, dan pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya). Dalam konteks ini, cakupan kejahatan kekerasan yang dimaksud meliputi penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, dan pelecehan seksual.

- **Penganiayaan** adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.
- **Pencurian dengan kekerasan** adalah mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.
- **Pelecehan seksual** adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019-2023

Gambar 4.1 Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir, 2018-2022

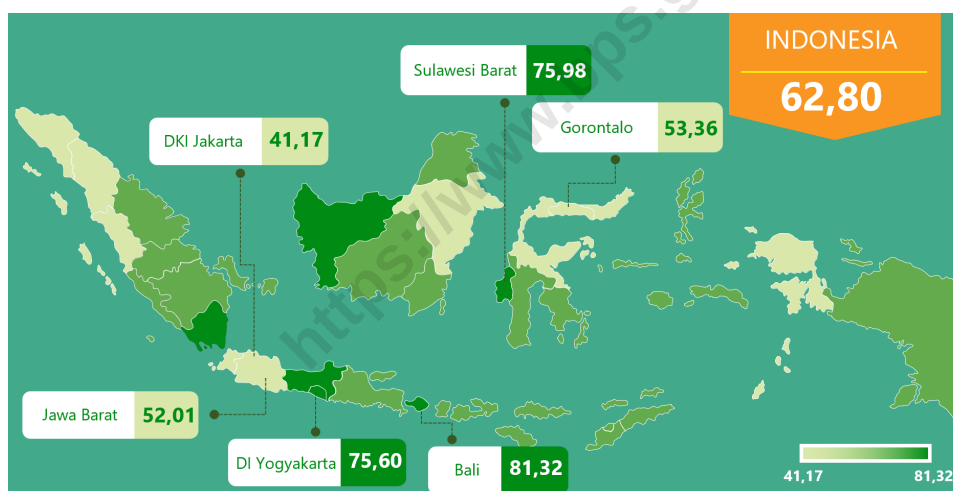
Indikator proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dihitung dari jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah penduduk tahun tersebut kemudian dikali 100 persen. Selama lima tahun terakhir, proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan menunjukkan tren penurunan (Gambar 4.1). Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan di tahun 2018 adalah sebanyak 0,08 persen, terus menurun dari tahun ke tahun hingga menjadi 0,03 di tahun 2021 kemudian mengalami stagnasi di angka tersebut hingga tahun 2022. Tren penurunan ini dapat menjadi indikasi awal bahwa terdapat peningkatan keamanan masyarakat berkaitan dengan kejahatan kekerasan dari tahun ke tahun.

4.3 Target 16.1.4*. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat 1 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Secara internasional, *Universal Declaration of Human Rights* juga mendeklarasikan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup serta hak akan kemerdekaan dan keamanan pribadi. Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang menempati posisi kedua dari hierarki kebutuhan Maslow. Berdasarkan *Handbook on Governance Statistics*, hak atas rasa aman menyangkut keamanan dan perlindungan dari bahaya, baik terhadap fisik, pikiran, maupun mental.

Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya merupakan target 16.1.4* dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Indikator ini merupakan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Rasa aman diukur dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga tahun. Berdasarkan buku Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia Edisi II Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, indikator 16.1.4* ini mengukur rasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari.

Pada tahun 2020, persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya sebesar 62,80 persen pada level nasional (Gambar 4.2). Berdasarkan angka tersebut dapat dikatakan bahwa lebih dari 60 persen masyarakat di Indonesia merasa tidak khawatir ketika berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Apabila dilihat lebih rinci pada level provinsi, terdapat variasi dalam persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya. Selama periode 2020, Provinsi Bali menempati posisi tertinggi sebagai provinsi dengan persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (81,32 persen), diikuti oleh Provinsi Sulawesi Barat (75,98 persen), dan Provinsi DI Yogyakarta (75,60 persen). Adapun provinsi dengan persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya terkecil adalah Provinsi DKI Jakarta (41,17 persen), diikuti oleh Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Gorontalo dengan persentase masing-masing adalah 52,01 persen dan 53,36 persen.



Sumber: Susenas Modul Ketahanan Sosial 2020

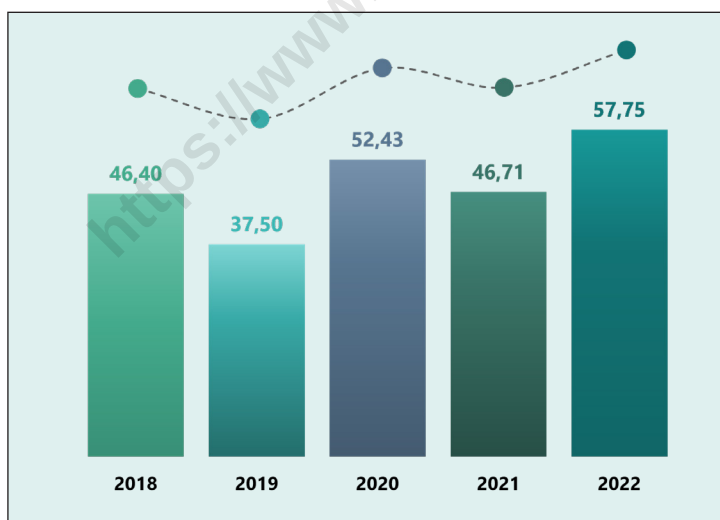
Gambar 4.2 Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, 2020

4.4 Target 16.3.1.(a). Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan kepada Polisi

Ketersediaan data SDGs indikator 16.3.1.(a) ini dimaksudkan untuk melihat akses terhadap keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak berwenang. Jika pihak berwenang tidak menerima laporan atau diperingatkan terjadinya korban, maka pihak berwenang tidak dapat mengambil tindakan yang

tepat untuk melakukan penyelidikan dan pengadilan. Selain itu, indikator ini juga digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga berwenang, baik polisi maupun lembaga penegak hukum lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya. Peningkatan jumlah pelapor dan laporan menunjukkan bahwa kekerasan tidak dapat diterima dan harus dilaporkan. Peningkatan nilai indikator ini juga menunjukkan bahwa sistem pelaporan, kesadaran untuk melapor, serta kepercayaan kepada pihak berwenang telah meningkat.

Indikator proporsi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi dihitung dari jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi dibagi dengan jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir dikalikan 100 persen. Selama periode 2018–2022, proporsi korban kejahatan kekerasan yang melaporkan kepada polisi sangat fluktuatif hingga mencapai nilai tertinggi pada tahun 2022 dengan persentase sebesar 57,75 persen (Gambar 4.3). Peningkatan ini merupakan capaian yang positif dan mengindikasikan adanya peningkatan dari segi kesadaran dan kepercayaan korban kekerasan untuk melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya kepada polisi.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019-2023

Gambar 4.3 Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan kepada Polisi, 2018–2022

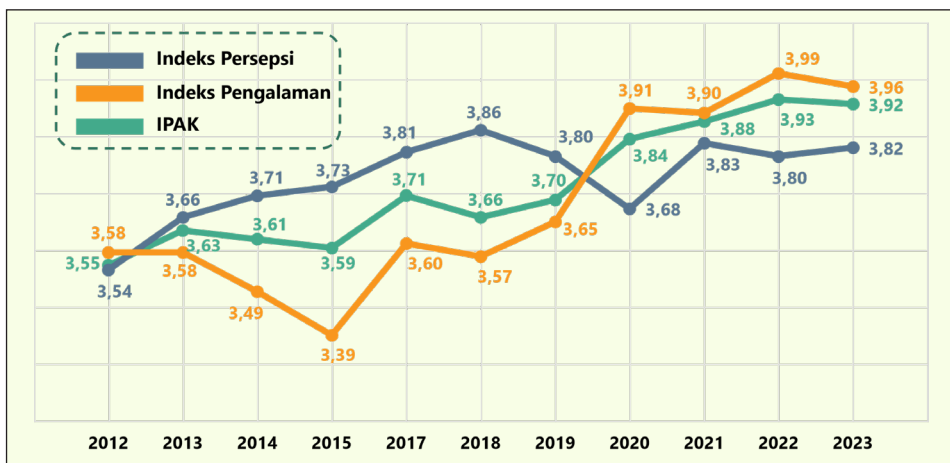
4.5 Target 16.5.1.(a). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Korupsi merupakan permasalahan global yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Salah satu akar penyebab berkembangnya praktik korupsi diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentatnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi. Melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK), pemerintah berupaya menyusun arah kebijakan nasional dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Dalam pemenuhan tujuan global untuk mencapai sasaran global secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu, korupsi juga menjadi sasaran nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) melalui Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Survei ini telah dilaksanakan setiap tahun sejak 2012 sampai dengan tahun 2023, kecuali tahun 2016. Pada tahun 2023, SPAK dilaksanakan di 34 provinsi dan 171 kabupaten/kota. Estimasi SPAK hanya dilakukan sampai level nasional.

Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) bertujuan mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei ini mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*).

Dimensi penyusun IPAK terdiri dari Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian/pendapat terhadap kebiasaan perilaku antikorupsi di masyarakat yang terdiri dari tiga subdimensi yaitu subdimensi persepsi keluarga, subdimensi persepsi komunitas, dan subdimensi persepsi publik. Dimensi Pengalaman berupa pengalaman antikorupsi di masyarakat yang terdiri atas subdimensi pengalaman publik dan subdimensi pengalaman lainnya.

Nilai IPAK berada pada rentang 0 sampai 5. Nilai IPAK yang semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. IPAK cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2012 sampai tahun 2023 (Gambar 4.4). IPAK 2023 sebesar 3,92 mengalami penurunan sebesar 0,01 poin dibandingkan IPAK 2022 (3,93).

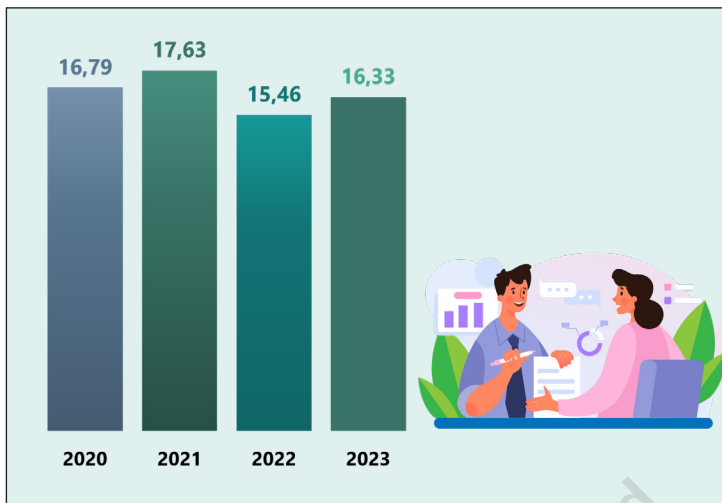


Sumber: Survei Perilaku Anti Korupsi 2012–2023

Gambar 4.4 Perkembangan IPAK Tahun 2012–2023

4.6 Target 16.5.1* Proporsi Penduduk yang Memiliki Paling Tidak Satu Kontak Hubungan dengan Petugas, yang Membayar Suap kepada Petugas atau Diminta untuk Menyupai Petugas Tersebut dalam 12 Bulan Terakhir

Pada tahun 2020, dilakukan perbaikan dalam kuesioner Survei Perilaku Anti Korupsi. Dari perbaikan tersebut, dihasilkan dua indikator baru yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan indikator global pada SDGs tujuan 16, yaitu indikator 16.5.1* dan 16.5.2*. Untuk data SDGs indikator 16.5.1*, terlihat bahwa persentase masyarakat yang mengeluarkan uang/barang/fasilitas melebihi ketentuan ketika berurusan dengan layanan publik mengalami fluktuasi sejak tahun 2020 hingga 2023 (Gambar 4.5). Hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2023 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 16,33 persen masyarakat mengeluarkan uang/barang/fasilitas melebihi ketentuan ketika berurusan dengan layanan publik. Nilai ini meningkat sebesar 0,87 persen dibandingkan tahun 2022, setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan dari yang semula sebesar 17,63 persen di tahun 2021 menjadi 15,46 di tahun 2022. Peningkatan yang terjadi di tahun 2023 ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin permisif terhadap perilaku antikorupsi, terutama dalam hal penyuapan (*bribery*).

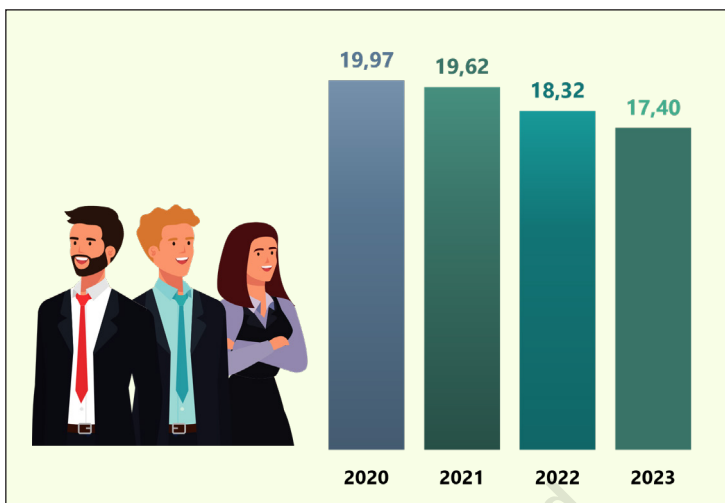


Sumber: Survei Perilaku Anti Korupsi 2020–2023

Gambar 4.5 Persentase Masyarakat yang pernah Berurusan dengan Layanan Publik dan Mengeluarkan Uang/Barang/Fasilitas Melebihi Ketentuan, 2020–2023

4.7 Target 16.5.2. Proporsi Pelaku Usaha yang Memiliki Setidaknya Satu Kontak Dengan Pejabat Publik dan yang Membayar Suap kepada Pejabat Publik, atau Diminta untuk Menerima Suap oleh Pejabat Publik Tersebut, Selama 12 Bulan Terakhir

Pelaku usaha juga merupakan salah satu aktor yang berpotensi terlibat dalam praktik penyuapan kepada petugas pelayanan publik atau diminta untuk melakukan suap oleh petugas. Selama periode 2020–2023, persentase pelaku usaha yang membayar melebihi ketentuan ketika berurusan dengan layanan publik menunjukkan tren yang terus menurun (Gambar 4.6). Pada tahun 2020, terdapat 19,97 persen pelaku usaha yang membayar melebihi ketentuan kepada petugas layanan publik, baik ketika mengakses layanan sendiri maupun melalui perantara. Angka ini sedikit menurun menjadi 19,62 persen di tahun 2021, kemudian turun menjadi 18,32 persen di tahun 2022, hingga mencapai nilai terendah di tahun 2023 dengan nilai 17,40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha semakin anti terhadap perilaku korupsi, dalam hal ini adalah penyuapan (*bribery*).



Sumber: Survei Perilaku Anti Korupsi 2020–2023

Gambar 4.6 Persentase Pelaku Usaha yang pernah Berurusan dengan Layanan Publik dan Mengeluarkan Uang/Barang/Fasilitas Melebihi Ketentuan, 2020–2023

DAFTAR PUSTAKA



Daftar Pustaka

- Anwar, Yesmil dan Andang. (2010). *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Statistik Potensi Desa Indonesia 2014*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Potensi Desa Indonesia 2018*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Potensi Desa Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.
- Gamayanti, Rosa dan Soni Akhmad Nulhaqim. (2019). Konflik antara PLTU Indramayu II dengan Warga Mekarsari Dilihat dari Teori Kebutuhan Manusia Simon Fisher. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1 (1).
- Hatta, Mohammad. (2008). *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*. Yogyakarta: Gallang Press.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola*. Jakarta: Bappenas.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2013). Bandung: Citra Umbara.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2019). *Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2018*. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2020). *Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2019*. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2021). *Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2020*. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2022). *Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2021*. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2023). *Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2022*. Jakarta: Mabes POLRI.
- Maslow, A.H. (1943). *A Theory of Human Motivation*. New York: Psychological Review.

Mulia, Aryago. dkk. (2007). *Manual Pengolahan Data Entry Program CSPRO 3.3*. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Savitz. (1978). *Official Police Statistics and Their Limitations*. In L.D. Savitz & N. Johnson (Eds.), *Crime and Society* (pp. 69-81). New York: John Wiley.

Soekanto. (2005), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.

Soetopo, H. (2001). *Manajemen Konflik*. Malang: Universitas Negeri Malang.

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Tahun 1966 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention (UNODCCP). (1999). *Handbook on Justice for Victims*. New York.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2020). *Handbook on Governance Statistics*. Switzerland.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2015). *International Classification Of Crimes For Statistical Purposes*. Version 1.0.

LAMPIRAN



DATA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA



Lampiran 1 Indikator Kriminalitas Nasional, 2020–2022

Jenis Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>)	247.218	239.481	372.965 ¹
Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>)	176.726	172.065	142.174
Persentase Penyelesaian Kejahatan (<i>Crime Clearance</i>)	71,49	71,85	38,12
Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (<i>Crime Clock</i>)	0 02'07"	0 02'11"	0.01'24"
Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>)	94	90	137

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan:

¹ Jumlah kejahatan (*crime total*) pada tahun 2022 mencakup data dari Mabes Polri.

Lampiran 2 Peringkat Kepolisian Daerah Menurut Jumlah Kejahatan dan Risiko Penduduk Terkena Kejahatan, 2022

No.	Kepolisian Daerah	Jumlah Kejahatan	No.	Kepolisian Daerah	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	Jawa Timur	51.905	1	Sulawesi Utara	364
2	Sumatera Utara	43.555	2	Papua Barat	353
3	Metro Jaya	32.534	3	Sulawesi Selatan	314
4	Jawa Tengah	30.060	4	Metro Jaya	307
5	Jawa Barat	29.485	5	Sumatera Utara	292
6	Sulawesi Selatan	28.679	6	DI Yogyakarta	285
7	Riau	12.389	7	Sulawesi Tengah	270
8	Sumatera Selatan	11.453	8	Gorontalo	211
9	Lampung	11.022	9	Riau	191
10	DI Yogyakarta	10.591	10	Aceh	190
11	Aceh	10.137	11	Bengkulu	179
12	Sulawesi Utara	9.618	12	Kalimantan Utara	179
13	Sumatera Barat	7.691	13	Papua	174
14	Papua	7.584	14	Kepulauan Riau	159
15	Bali	6.304	15	Jambi	149
16	Nusa Tenggara Timur	5.991	16	Bali	144
17	Sulawesi Tengah	5.453	17	Sulawesi Tenggara	144
18	Jambi	5.359	18	Sulawesi Barat	141
19	Nusa Tenggara Barat	5.296	19	Kep. Bangka Belitung	141
20	Banten	5.038	20	Sumatera Barat	138
21	Kalimantan Selatan	5.016	21	Sumatera Selatan	134
22	Kalimantan Timur	4.221	22	Maluku	128
23	Papua Barat	4.083	23	Jawa Timur	127
24	Kalimantan Barat	3.975	24	Kalimantan Selatan	122
25	Sulawesi Tenggara	3.828	25	Lampung	121
26	Bengkulu	3.613	26	Kalimantan Tengah	118
27	Kepulauan Riau	3.358	27	Nusa Tenggara Timur	111
28	Kalimantan Tengah	3.189	28	Kalimantan Timur	111
29	Gorontalo	2.488	29	Nusa Tenggara Barat	98
30	Maluku	2.383	30	Maluku Utara	94
31	Kep. Bangka Belitung	2.072	31	Jawa Tengah	82
32	Sulawesi Barat	2.027	32	Kalimantan Barat	73
33	Kalimantan Utara	1.280	33	Jawa Barat	60
34	Maluku Utara	1.220	34	Banten	42
Mabes Polri ¹		68	Mabes Polri		–
INDONESIA		372.965	INDONESIA		137

Catatan : ¹ Merupakan data pelaporan kejahatan yang dilakukan melalui Mabes Polri
 Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lampiran 3 Jumlah Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2020–2022

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	7.745	6.651	10.137
Sumatera Utara	32.990	36.534	43.555
Sumatera Barat	7.992	5.666	7.691
Riau	8.194	7.512	12.389
Jambi	4.709	3.701	5.359
Sumatera Selatan	12.189	13.037	11.453
Bengkulu	3.333	3.493	3.613
Lampung	7.594	9.764	11.022
Kep. Bangka Belitung	1.931	1.566	2.072
Kepulauan Riau	2.843	2.481	3.358
Metro Jaya	26.585	29.103	32.534
Jawa Barat	11.256	7.502	29.485
Jawa Tengah	10.712	8.909	30.060
DI Yogyakarta	7.721	4.774	10.591
Jawa Timur	17.642	19.257	51.905
Banten	4.250	3.434	5.038
Bali	2.597	2.404	6.304
Nusa Tenggara Barat	8.591	6.296	5.296
Nusa Tenggara Timur	4.790	4.909	5.991
Kalimantan Barat	3.858	4.048	3.975
Kalimantan Tengah	2.629	2.399	3.189
Kalimantan Selatan	5.206	4.973	5.016
Kalimantan Timur	3.609	4.564	4.221
Kalimantan Utara	1.015	971	1.280
Sulawesi Utara	6.274	6.215	9.618
Sulawesi Tengah	5.454	5.139	5.453
Sulawesi Selatan	12.815	14.636	28.679
Sulawesi Tenggara	2.148	2.431	3.828
Gorontalo	2.518	2.445	2.488
Sulawesi Barat	1.704	1.500	2.027
Maluku	5.350	3.139	2.383
Maluku Utara	850	1.008	1.220
Papua Barat	3.162	2.784	4.083
Papua	6.962	6.236	7.584
Mabes Polri	-	-	68
INDONESIA	247.218	239.481	372.965

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lampiran 4 Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan Menurut Kepolisian Daerah, 2020-2022

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	2.936	3.790	6.264
Sumatera Utara	22.665	24.978	6.937
Sumatera Barat	6.708	8.139	2.714
Riau	3.122	5.810	2.127
Jambi	4.028	2.931	999
Sumatera Selatan	9.356	9.647	5.937
Bengkulu	2.278	1.635	805
Lampung	4.873	6.280	2.067
Kep. Bangka Belitung	1.303	1.084	1.017
Kepulauan Riau	1.900	1.630	382
Metro Jaya	31.225	28.518	1.893
Jawa Barat	9.931	5.481	6.853
Jawa Tengah	3.894	6.306	24.613
DI Yogyakarta	7.383	6.605	4.630
Jawa Timur	9.305	10.659	53.652
Banten	3.106	2.613	2.577
Bali	2.344	2.036	1.496
Nusa Tenggara Barat	4.233	3.756	1.825
Nusa Tenggara Timur	2.360	1.623	286
Kalimantan Barat	3.933	3.702	878
Kalimantan Tengah	2.074	1.967	1.677
Kalimantan Selatan	4.284	3.907	2.088
Kalimantan Timur	3.224	2.893	2.141
Kalimantan Utara	827	842	330
Sulawesi Utara	4.860	3.607	2.211
Sulawesi Tengah	3.740	2.744	853
Sulawesi Selatan	10.632	9.405	1.953
Sulawesi Tenggara	567	1.493	817
Gorontalo	1.781	1.335	266
Sulawesi Barat	1.082	1.127	352
Maluku	1.421	1.372	334
Maluku Utara	470	589	473
Papua Barat	1.005	914	268
Papua	3.876	2.647	459
Mabes Polri	-	-	0
INDONESIA	176.726	172.065	142.174

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lampiran 5 Persentase Penyelesaian Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2020-2022

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	37,91	56,98	61,79
Sumatera Utara	68,70	68,37	15,93
Sumatera Barat	83,93	143,65 ^r	35,29
Riau	38,10	77,34	17,17
Jambi	85,54	79,19	18,64
Sumatera Selatan	76,76	74,00	51,84
Bengkulu	68,35	46,81	22,28
Lampung	64,17	64,32	18,75
Kep. Bangka Belitung	67,48	69,22	49,08
Kepulauan Riau	66,83	65,70	11,38
Metro Jaya	117,45 ^r	97,99	5,82
Jawa Barat	88,23	73,06	23,24
Jawa Tengah	36,35	70,78	81,88
DI Yogyakarta	95,62	138,35 ^r	43,72
Jawa Timur	52,74	55,35	103,37
Banten	73,08	76,09	51,15
Bali	90,26	84,69	23,73
Nusa Tenggara Barat	49,27	59,66	34,46
Nusa Tenggara Timur	49,27	33,06	4,77
Kalimantan Barat	101,94 ^r	91,45	22,09
Kalimantan Tengah	78,89	81,99	52,59
Kalimantan Selatan	82,29	78,56	41,63
Kalimantan Timur	89,33	63,39	50,72
Kalimantan Utara	81,48	86,71	25,78
Sulawesi Utara	77,46	58,04	22,99
Sulawesi Tengah	68,57	53,40	15,64
Sulawesi Selatan	82,97	64,26	6,81
Sulawesi Tenggara	26,40	61,42	21,34
Gorontalo	70,73	54,60	10,69
Sulawesi Barat	63,50	75,13	17,37
Maluku	26,56	43,71	14,02
Maluku Utara	55,29	58,43	38,77
Papua Barat	31,78	32,83	6,56
Papua	55,67	42,45	6,05
Mabes Polri	-	-	0,00
INDONESIA	71,49	71,85	38,12

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lampiran 6 Selang Waktu Terjadinya Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2020–2022

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	01.07'51"	01.19'01"	00.51'50"
Sumatera Utara	00.15'55"	00.14'23"	00.11'58"
Sumatera Barat	01.05'45"	01.32'45"	01.07'46"
Riau	01.04'08"	01.09'58"	00.42'04"
Jambi	01.51'36"	02.22'00"	01.37'16"
Sumatera Selatan	00.43'07"	00.40'18"	00.45'30"
Bengkulu	02.37'41"	02.30'28"	02.24'16"
Lampung	01.09'12"	00.53'49"	00.47'17"
Kep. Bangka Belitung	04.32'11"	05.35'37"	04.11'34"
Kepulauan Riau	03.04'52"	03.31'51"	02.35'14"
Metro Jaya	00.19'46"	00.18'03"	00.16'01"
Jawa Barat	00.46'41"	01.10'03"	00.17'40"
Jawa Tengah	00.49'03"	00.58'59"	00.17'20"
DI Yogyakarta	01.08'04"	01.50'05"	00.49'13"
Jawa Timur	00.29'47"	00.27'17"	00.10'02"
Banten	02.03'40"	02.33'03"	01.43'28"
Bali	03.22'23"	03.38'38"	01.22'41"
Nusa Tenggara Barat	01.01'10"	01.23'28"	01.38'25"
Nusa Tenggara Timur	01.49'43"	01.47'04"	01.27'00"
Kalimantan Barat	02.16'14"	02.09'50"	02.11'08"
Kalimantan Tengah	03.19'55"	03.39'05"	02.43'27"
Kalimantan Selatan	01.40'57"	01.45'41"	01.43'55"
Kalimantan Timur	02.25'38"	01.55'09"	02.03'29"
Kalimantan Utara	22.07'16"	09.01'17"	06.47'15"
Sulawesi Utara	01.23'46"	01.24'34"	00.54'11"
Sulawesi Tengah	01.36'22"	01.42'16"	01.35'35"
Sulawesi Selatan	00.41'00"	00.35'54"	00.18'10"
Sulawesi Tenggara	04.04'41"	03.36'12"	02.16'10"
Gorontalo	03.28'44"	03.34'58"	03.29'31"
Sulawesi Barat	05.08'27"	05.50'24"	04.17'10"
Maluku	01.38'14"	02.47'26"	03.38'44"
Maluku Utara	10.24'13"	08.41'25"	07.07'16"
Papua Barat	02.46'13"	03.08'47"	02.07'40"
Papua	01.15'29"	01.24'17"	01.08'44"
INDONESIA	00.02'07"	00.02'11"	00.01'24"

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lampiran 7 Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Daerah, 2020–2022

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	149	125	190
Sumatera Utara	231	250	292
Sumatera Barat	150	103	138
Riau	123	110	191
Jambi	134	104	149
Sumatera Selatan	147	153	134
Bengkulu	172	177	179
Lampung	92	115	121
Kep. Bangka Belitung	133	108	141
Kepulauan Riau	127	111	159
Metro Jaya	105	277	307
Jawa Barat	29	15	60
Jawa Tengah	31	26	82
DI Yogyakarta	200	123	285
Jawa Timur	44	48	127
Banten	63	27	42
Bali	60	55	144
Nusa Tenggara Barat	167	122	98
Nusa Tenggara Timur	88	90	111
Kalimantan Barat	76	80	73
Kalimantan Tengah	62	91	118
Kalimantan Selatan	196	118	122
Kalimantan Timur	100	126	111
Kalimantan Utara	146	140	179
Sulawesi Utara	252	249	364
Sulawesi Tengah	179	169	270
Sulawesi Selatan	145	166	314
Sulawesi Tenggara	81	91	144
Gorontalo	214	208	211
Sulawesi Barat	125	110	141
Maluku	303	177	128
Maluku Utara	69	82	94
Papua Barat	328	289	353
Papua	208	186	174
INDONESIA	94	90	137

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lampiran 8 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok Jenis Kejahatan, 2020–2022

Kelompok/Jenis Kejahatan	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	898	927	854
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penganiayaan Berat ¹	8.373	8.445	33.235
Penganiayaan Ringan	20.195	12.211	61
Kekerasan dalam Rumah Tangga	8.104	7.435	5.526
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
Perkosaan	1.336	1.164	1.443
Pencabulan	5.536	4.741	2.893
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	254	206	1.472
Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur ²	1.716	1.449	...
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	5.647	4.548	4.335
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api ³	151	108	...
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam ⁴	740	182	...
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
Pencurian	23.984	23.308	37.192
Pencurian dengan Pemberatan	25.686	23.422	37.870
Pencurian Kendaraan Bermotor	18.557	18.005	14.184
Pengrusakan/Penghancuran Barang	3.720	3.515	1.866
Pembakaran dengan Sengaja	518	478	552
Penadahan	799	619	228
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psikotropika	36.611	36.954	31.420
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	21.175	20.523	34.588
Penggelapan	15.546	14.206	11.689
Korupsi	376	364	261
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	3.662	2.532	7.570

Catatan : ¹ Pada tahun 2022, penganiayaan berat dimasukkan ke dalam istilah penganiayaan

² Data tidak tersedia di tahun 2022

³ Pada tahun 2022, Polri tidak menyajikan pencurian dengan kekerasan menurut senjata

⁴ Pada tahun 2022, Polri tidak menyajikan pencurian dengan kekerasan menurut senjata

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lampiran 9 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan, 2022

Kelompok/Jenis Kejahatan	Bulan		
	Januari	Februari	Maret
(1)	(2)	(3)	(4)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	82	65	121
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penganiayaan	2.390	2.040	2.370
Penganiayaan Ringan	-	2	5
Kekerasan dalam Rumah Tangga	205	153	201
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
Perkosaan	148	109	125
Pencabulan	189	145	158
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	155	160	164
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	373	311	339
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
Pencurian	3.223	2.988	3.375
Pencurian dengan Pemberatan	2.931	2.665	2.945
Pencurian Kendaraan Bermotor	1.178	982	1.034
Pengrusakan/Penghancuran Barang	-	-	-
Pembakaran dengan Sengaja	39	38	48
Penadahan	12	28	13
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psikotropika	1.973	2.002	2.145
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	2.872	2.484	2.920
Penggelapan	1	2	8
Korupsi	1	-	-
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	604	386	834

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 9

Kelompok/Jenis Kejahatan	Bulan		
	April	Mei	Juni
(1)	(5)	(6)	(7)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	74	43	46
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penganiayaan	2.134	2.750	2.786
Penganiayaan Ringan	3	9	11
Kekerasan dalam Rumah Tangga	213	405	437
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
Perkosaan	97	130	86
Pencabulan	125	182	87
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	119	110	102
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	334	289	299
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
Pencurian	2.947	2.901	2.939
Pencurian dengan Pemberatan	2.440	2.798	3.106
Pencurian Kendaraan Bermotor	932	1.085	1.165
Pengrusakan/Penghancuran Barang	-	1	-
Pembakaran dengan Sengaja	39	48	39
Penadahan	13	21	30
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psikotropika	1.889	1.966	3.188
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	2.555	2.307	2.920
Penggelapan	10	28	1.664
Korupsi	3	2	13
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	948	709	313

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 9

Kelompok/Jenis Kejahatan	Bulan		
	Juli	Agustus	September
(1)	(8)	(9)	(10)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	65	66	69
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penganiayaan	2.934	3.268	3.096
Penganiayaan Ringan	6	8	8
Kekerasan dalam Rumah Tangga	628	610	635
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
Perkosaan	138	153	124
Pencabulan	351	415	325
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	154	112	118
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	382	392	393
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
Pencurian	2.813	3.203	3.059
Pencurian dengan Pemberatan	2.917	3.352	3.342
Pencurian Kendaraan Bermotor	1.181	1.325	1.313
Pengrusakan/Penghancuran Barang	2	360	384
Pembakaran dengan Sengaja	56	69	66
Penadahan	11	31	19
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psikotropika	3.091	3.791	3.127
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	2.951	3.063	2.909
Penggelapan	1.553	1.740	1.659
Korupsi	30	57	47
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	640	713	660

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 9

Kelompok/Jenis Kejahatan	Bulan		
	Oktober	November	Desember
(1)	(11)	(12)	(13)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	75	80	68
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penganiayaan	3.255	3.072	3.140
Penganiayaan Ringan	4	3	2
Kekerasan dalam Rumah Tangga	697	665	677
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
Perkosaan	105	102	126
Pencabulan	299	324	293
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	93	111	74
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	434	415	374
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
Pencurian	3.237	3.384	3.123
Pencurian dengan Pemberatan	3.839	3.895	3.640
Pencurian Kendaraan Bermotor	1.348	1.423	1.218
Pengrusakan/Penghancuran Barang	375	408	336
Pembakaran dengan Sengaja	38	44	28
Penadahan	13	22	15
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psikotropika	3.093	2.980	2.175
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	3.120	3.483	3.004
Penggelapan	1.603	1.765	1.656
Korupsi	42	43	23
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	581	631	551

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lampiran 10 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2020

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Nyawa	Kejahatan terhadap Fisik		
	Pembunuhan	Penganiayaan Berat	Penganiayaan Ringan	KDRT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	15	327	677	202
Sumatera Utara	99	2.140	3.321	746
Sumatera Barat	20	263	1.255	206
Riau	21	213	500	300
Jambi	11	123	287	121
Sumatera Selatan	77	790	337	424
Bengkulu	33	241	93	145
Lampung	21	121	376	150
Kep. Bangka Belitung	10	75	43	32
Kepulauan Riau	13	87	280	147
Metro Jaya	32	489	213	747
Jawa Barat	20	583	424	438
Jawa Tengah	30	150	95	137
DI Yogyakarta	6	86	336	151
Jawa Timur	55	371	512	521
Banten	8	133	313	75
Bali	6	56	220	138
Nusa Tenggara Barat	11	73	139	434
Nusa Tenggara Timur	40	137	1.295	294
Kalimantan Barat	35	80	30	74
Kalimantan Tengah	17	34	214	57
Kalimantan Selatan	38	144	233	85
Kalimantan Timur	12	86	113	153
Kalimantan Utara	10	51	19	21
Sulawesi Utara	74	334	1.210	432
Sulawesi Tengah	18	119	952	320
Sulawesi Selatan	71	108	2.999	741
Sulawesi Tenggara	26	83	516	135
Gorontalo	13	23	868	152
Sulawesi Barat	8	47	389	69
Maluku	10	389	446	158
Maluku Utara	1	152	52	51
Papua Barat	10	132	454	69
Papua	27	133	984	179
INDONESIA	898	8.373	20.195	8.104

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 10

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Kesusilaan		Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Kejahatan	
	Perkosaan	Pencabulan	Penculikan	Mempekerjakan Anak di Bawah Umur
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
A c e h	61	171	18	11
Sumatera Utara	170	604	25	30
Sumatera Barat	35	259	3	94
Riau	122	21	6	5
Jambi	25	44	3	6
Sumatera Selatan	64	108	5	136
Bengkulu	16	92	1	-
Lampung	54	193	9	32
Kep. Bangka Belitung	10	42	2	45
Kepulauan Riau	6	103	1	-
Metro Jaya	36	77	22	9
Jawa Barat	67	304	10	1
Jawa Tengah	41	308	10	1
DI Yogyakarta	27	71	3	24
Jawa Timur	77	179	12	165
Banten	15	66	1	150
Bali	6	59	1	3
Nusa Tenggara Barat	59	36	4	42
Nusa Tenggara Timur	48	112	1	13
Kalimantan Barat	14	123	1	111
Kalimantan Tengah	14	101	-	1
Kalimantan Selatan	19	32	-	-
Kalimantan Timur	26	87	1	-
Kalimantan Utara	6	26	-	10
Sulawesi Utara	25	217	86	2
Sulawesi Tengah	49	126	-	22
Sulawesi Selatan	63	145	9	302
Sulawesi Tenggara	32	141	2	7
Gorontalo	19	110	1	72
Sulawesi Barat	11	53	1	6
Maluku	28	1.370	8	111
Maluku Utara	11	89	-	13
Papua Barat	29	18	2	122
Papua	51	49	6	170
INDONESIA	1.336	5.536	254	1.716

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 10

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
	Pencurian dengan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan (Senpi)	Pencurian dengan Kekerasan (Sajam)
(1)	(10)	(11)	(12)
A c e h	136	5	4
Sumatera Utara	706	4	70
Sumatera Barat	173	1	11
Riau	381	24	8
Jambi	79	6	2
Sumatera Selatan	498	21	44
Bengkulu	100	2	4
Lampung	300	52	47
Kep. Bangka Belitung	41	1	-
Kepulauan Riau	94	-	9
Metro Jaya	222	13	24
Jawa Barat	246	6	5
Jawa Tengah	207	4	25
DI Yogyakarta	122	-	4
Jawa Timur	336	2	3
Banten	87	7	-
Bali	52	2	-
Nusa Tenggara Barat	283	-	1
Nusa Tenggara Timur	42	-	-
Kalimantan Barat	54	-	-
Kalimantan Tengah	37	-	49
Kalimantan Selatan	111	-	256
Kalimantan Timur	50	-	101
Kalimantan Utara	9	-	10
Sulawesi Utara	62	-	10
Sulawesi Tengah	139	1	-
Sulawesi Selatan	325	-	23
Sulawesi Tenggara	42	-	-
Gorontalo	4	-	-
Sulawesi Barat	8	-	7
Maluku	23	-	-
Maluku Utara	14	-	-
Papua Barat	152	-	3
Papua	512	-	20
INDONESIA	5.647	151	740

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 10

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
	Pencurian	Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian Kendaraan Bermotor	Penadahan
(1)	(13)	(14)	(15)	(16)
A c e h	1.216	438	607	30
Sumatera Utara	3.290	4.338	2.470	24
Sumatera Barat	1.225	1.315	997	5
Riau	715	1.530	812	9
Jambi	455	753	488	4
Sumatera Selatan	419	1.727	637	5
Bengkulu	213	485	215	8
Lampung	393	1.260	772	9
Kep. Bangka Belitung	221	330	113	3
Kepulauan Riau	392	259	286	6
Metro Jaya	713	1.235	792	310
Jawa Barat	577	1.114	1.111	23
Jawa Tengah	767	1.741	1.231	73
DI Yogyakarta	627	676	388	4
Jawa Timur	1.184	2.176	1.429	36
Banten	176	629	801	5
Bali	348	251	177	2
Nusa Tenggara Barat	640	1.136	150	17
Nusa Tenggara Timur	942	191	152	2
Kalimantan Barat	427	483	312	3
Kalimantan Tengah	228	363	171	37
Kalimantan Selatan	321	521	267	52
Kalimantan Timur	242	335	267	2
Kalimantan Utara	118	184	24	3
Sulawesi Utara	1.002	106	92	16
Sulawesi Tengah	1.160	360	502	10
Sulawesi Selatan	2.744	651	589	9
Sulawesi Tenggara	303	65	208	1
Gorontalo	451	36	121	-
Sulawesi Barat	364	100	80	1
Maluku	542	91	143	2
Maluku Utara	69	14	7	5
Papua Barat	297	351	522	6
Papua	1.203	442	1.623	77
INDONESIA	23.984	25.686	18.557	799

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 10

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		Kejahatan terkait Narkotika
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	Pembakaran dengan Sengaja	Narkotika dan Psikotropika
(1)	(17)	(18)	(19)
A c e h	103	14	1.596
Sumatera Utara	693	101	5.932
Sumatera Barat	181	9	913
Riau	71	15	1.646
Jambi	52	18	619
Sumatera Selatan	103	20	2.554
Bengkulu	40	2	340
Lampung	82	16	1.521
Kep. Bangka Belitung	18	5	332
Kepulauan Riau	47	13	362
Metro Jaya	99	4	5.981
Jawa Barat	120	5	1.141
Jawa Tengah	55	15	1.601
DI Yogyakarta	72	2	460
Jawa Timur	136	15	2.629
Banten	44	2	634
Bali	39	4	668
Nusa Tenggara Barat	169	8	571
Nusa Tenggara Timur	179	28	41
Kalimantan Barat	24	5	755
Kalimantan Tengah	23	15	590
Kalimantan Selatan	36	11	1.582
Kalimantan Timur	14	2	1.354
Kalimantan Utara	8	3	245
Sulawesi Utara	169	9	100
Sulawesi Tengah	87	2	340
Sulawesi Selatan	414	21	1.013
Sulawesi Tenggara	22	33	192
Gorontalo	77	11	101
Sulawesi Barat	57	5	175
Maluku	102	14	142
Maluku Utara	15	2	120
Papua Barat	115	10	120
Papua	254	79	241
INDONESIA	3.720	518	36.611

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 10

Kepolisian Daerah	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			Kejahatan terhadap Ketertiban Umum
	Penipuan/ Perbuatan Curang	Penggelapan	Korupsi	Terhadap Ketertiban Umum
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)
A c e h	653	452	25	24
Sumatera Utara	2.809	2.740	13	249
Sumatera Barat	419	562	8	50
Riau	370	708	17	113
Jambi	327	421	19	182
Sumatera Selatan	905	857	4	100
Bengkulu	315	226	15	14
Lampung	890	469	14	30
Kep. Bangka Belitung	55	72	3	21
Kepulauan Riau	363	173	7	27
Metro Jaya	3.091	1.503	1	213
Jawa Barat	1.768	1.008	16	141
Jawa Tengah	1.050	742	22	120
DI Yogyakarta	802	420	3	126
Jawa Timur	1.897	907	13	213
Banten	420	295	3	51
Bali	208	195	5	29
Nusa Tenggara Barat	504	361	11	72
Nusa Tenggara Timur	378	191	5	632
Kalimantan Barat	162	239	30	24
Kalimantan Tengah	127	174	14	5
Kalimantan Selatan	212	174	14	5
Kalimantan Timur	105	239	12	58
Kalimantan Utara	35	37	–	4
Sulawesi Utara	455	481	9	31
Sulawesi Tengah	352	315	10	31
Sulawesi Selatan	1.084	692	10	36
Sulawesi Tenggara	62	40	20	17
Gorontalo	261	192	14	34
Sulawesi Barat	144	97	3	4
Maluku	223	82	2	342
Maluku Utara	27	19	3	2
Papua Barat	232	117	7	279
Papua	470	210	21	347
INDONESIA	21.175	15.546	376	3.662

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lampiran 11 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2021

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Nyawa	Kejahatan terhadap Fisik		
	Pembunuhan	Penganiayaan Berat	Penganiayaan Ringan	KDRT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	29	195	669	210
Sumatera Utara	96	2.260	1.190	837
Sumatera Barat	10	311	818	170
Riau	24	174	432	176
Jambi	15	120	173	97
Sumatera Selatan	69	874	102	277
Bengkulu	36	217	52	151
Lampung	22	91	32	188
Kep. Bangka Belitung	8	91	3	29
Kepulauan Riau	16	95	255	98
Metro Jaya	77	752	174	693
Jawa Barat	29	478	331	286
Jawa Tengah	48	169	9	117
DI Yogyakarta	4	42	200	110
Jawa Timur	53	610	455	651
Banten	4	136	237	76
Bali	6	7	199	106
Nusa Tenggara Barat	5	76	52	286
Nusa Tenggara Timur	44	145	864	313
Kalimantan Barat	21	69	-	67
Kalimantan Tengah	14	34	163	65
Kalimantan Selatan	54	184	213	78
Kalimantan Timur	28	83	99	107
Kalimantan Utara	4	8	-	16
Sulawesi Utara	58	283	411	315
Sulawesi Tengah	17	83	827	354
Sulawesi Selatan	44	93	2.191	812
Sulawesi Tenggara	20	56	501	143
Gorontalo	11	5	785	179
Sulawesi Barat	9	8	214	51
Maluku	13	169	39	122
Maluku Utara	-	29	-	48
Papua Barat	8	211	218	63
Papua	31	287	303	144
INDONESIA	927	8.445	12.211	7.435

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 11

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Kesusilaan		Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Kejahatan	
	Perkosaan	Pencabulan	Penculikan	Mempekerjakan Anak di Bawah Umur
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
A c e h	70	134	11	12
Sumatera Utara	202	702	28	58
Sumatera Barat	32	308	2	46
Riau	24	17	5	-
Jambi	9	37	2	1
Sumatera Selatan	46	43	1	106
Bengkulu	23	89	2	-
Lampung	61	214	8	70
Kep. Bangka Belitung	3	18	-	31
Kepulauan Riau	12	117	-	-
Metro Jaya	35	143	10	1
Jawa Barat	37	256	6	3
Jawa Tengah	32	388	5	1
DI Yogyakarta	15	33	1	12
Jawa Timur	51	257	9	101
Banten	6	87	-	77
Bali	4	56	3	4
Nusa Tenggara Barat	42	16	-	25
Nusa Tenggara Timur	80	136	-	63
Kalimantan Barat	23	85	3	132
Kalimantan Tengah	9	70	-	2
Kalimantan Selatan	18	47	1	1
Kalimantan Timur	22	94	1	-
Kalimantan Utara	-	20	-	12
Sulawesi Utara	22	128	90	1
Sulawesi Tengah	35	271	-	-
Sulawesi Selatan	74	228	9	366
Sulawesi Tenggara	32	205	3	-
Gorontalo	34	133	-	22
Sulawesi Barat	10	49	2	-
Maluku	14	178	2	68
Maluku Utara	10	96	2	1
Papua Barat	24	38	-	85
Papua	53	48	-	148
INDONESIA	1.164	4.741	206	1.449

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 11

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
	Pencurian dengan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan (Senpi)	Pencurian dengan Kekerasan (Sajam)
(1)	(10)	(11)	(12)
A c e h	97	3	7
Sumatera Utara	530	–	10
Sumatera Barat	95	1	2
Riau	239	10	6
Jambi	71	1	1
Sumatera Selatan	515	24	25
Bengkulu	83	2	–
Lampung	388	31	12
Kep. Bangka Belitung	22	1	–
Kepulauan Riau	58	–	5
Metro Jaya	314	9	23
Jawa Barat	151	7	1
Jawa Tengah	173	3	12
DI Yogyakarta	51	3	1
Jawa Timur	393	6	5
Banten	76	2	–
Bali	34	–	–
Nusa Tenggara Barat	196	1	–
Nusa Tenggara Timur	35	–	–
Kalimantan Barat	38	–	–
Kalimantan Tengah	15	–	5
Kalimantan Selatan	121	2	26
Kalimantan Timur	30	1	16
Kalimantan Utara	10	–	1
Sulawesi Utara	16	–	4
Sulawesi Tengah	71	–	–
Sulawesi Selatan	249	–	12
Sulawesi Tenggara	31	–	–
Gorontalo	1	–	–
Sulawesi Barat	11	–	–
Maluku	5	–	–
Maluku Utara	5	–	–
Papua Barat	113	–	1
Papua	311	1	7
INDONESIA	4.548	108	182

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 11

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
	Pencurian	Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian Kendaraan Bermotor	Penadahan
(1)	(13)	(14)	(15)	(16)
A c e h	1.207	410	632	13
Sumatera Utara	4.183	4.738	2.698	9
Sumatera Barat	623	683	507	6
Riau	821	1.136	585	12
Jambi	404	653	449	-
Sumatera Selatan	482	1.849	430	15
Bengkulu	219	507	266	11
Lampung	434	1.365	1.095	11
Kep. Bangka Belitung	217	223	89	-
Kepulauan Riau	294	198	323	4
Metro Jaya	1.070	1.472	909	316
Jawa Barat	396	648	1.035	15
Jawa Tengah	529	1.409	857	25
DI Yogyakarta	416	287	214	6
Jawa Timur	1.811	2.385	2.249	24
Banten	132	486	492	5
Bali	348	269	151	-
Nusa Tenggara Barat	502	805	47	12
Nusa Tenggara Timur	715	101	100	2
Kalimantan Barat	406	470	468	2
Kalimantan Tengah	226	320	126	38
Kalimantan Selatan	395	405	262	34
Kalimantan Timur	244	352	343	4
Kalimantan Utara	62	285	24	2
Sulawesi Utara	824	45	118	13
Sulawesi Tengah	1.030	290	536	6
Sulawesi Selatan	2.811	887	570	3
Sulawesi Tenggara	271	32	199	-
Gorontalo	375	30	74	-
Sulawesi Barat	285	59	57	-
Maluku	422	32	103	1
Maluku Utara	67	6	8	-
Papua Barat	226	236	459	-
Papua	861	349	1.530	30
INDONESIA	23.308	23.422	18.005	619

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 11

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		Kejahatan terkait Narkotika
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	Pembakaran dengan Sengaja	Narkotika dan Psikotropika
(1)	(17)	(18)	(19)
A c e h	103	15	1.208
Sumatera Utara	721	84	5.949
Sumatera Barat	144	8	994
Riau	49	19	1.670
Jambi	38	1	361
Sumatera Selatan	132	8	4.055
Bengkulu	28	1	350
Lampung	126	25	1.683
Kep. Bangka Belitung	13	1	330
Kepulauan Riau	45	-	236
Metro Jaya	110	31	5.810
Jawa Barat	43	4	757
Jawa Tengah	54	15	1.673
DI Yogyakarta	36	5	312
Jawa Timur	139	26	2.873
Banten	23	2	565
Bali	21	3	696
Nusa Tenggara Barat	121	3	315
Nusa Tenggara Timur	172	16	2
Kalimantan Barat	33	19	880
Kalimantan Tengah	17	25	620
Kalimantan Selatan	24	4	1.442
Kalimantan Timur	18	2	2.066
Kalimantan Utara	7	5	287
Sulawesi Utara	224	3	95
Sulawesi Tengah	66	2	422
Sulawesi Selatan	464	32	399
Sulawesi Tenggara	36	37	174
Gorontalo	66	9	45
Sulawesi Barat	33	3	200
Maluku	81	12	143
Maluku Utara	9	2	143
Papua Barat	119	5	13
Papua	200	51	186
INDONESIA	3.515	478	36.954

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 11

Kepolisian Daerah	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			Kejahatan terhadap Ketertiban Umum
	Penipuan/ Perbuatan Curang	Penggelapan	Korupsi	Terhadap Ketertiban Umum
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)
A c e h	489	513	21	6
Sumatera Utara	2.853	2.531	12	23
Sumatera Barat	357	376	6	1
Riau	361	564	21	-
Jambi	251	346	-	156
Sumatera Selatan	929	838	1	97
Bengkulu	322	214	25	6
Lampung	1.109	656	13	-
Kep. Bangka Belitung	38	69	3	-
Kepulauan Riau	371	153	9	1
Metro Jaya	3.716	1.717	6	220
Jawa Barat	1.339	629	12	63
Jawa Tengah	746	563	17	144
DI Yogyakarta	522	281	-	61
Jawa Timur	2.391	1.088	18	95
Banten	510	184	6	-
Bali	143	167	10	4
Nusa Tenggara Barat	239	228	11	-
Nusa Tenggara Timur	318	173	4	616
Kalimantan Barat	162	274	28	2
Kalimantan Tengah	106	201	9	-
Kalimantan Selatan	219	341	12	-
Kalimantan Timur	114	139	18	28
Kalimantan Utara	27	28	-	-
Sulawesi Utara	419	430	3	4
Sulawesi Tengah	322	348	13	13
Sulawesi Selatan	1.137	575	17	1
Sulawesi Tenggara	71	23	28	1
Gorontalo	157	147	10	3
Sulawesi Barat	103	74	1	-
Maluku	141	98	5	360
Maluku Utara	23	15	2	3
Papua Barat	212	88	7	276
Papua	306	135	16	348
INDONESIA	20.523	14.206	364	2.532

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lampiran 12 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2022

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Nyawa	Kejahatan terhadap Fisik		
	Pembunuhan	Penganiayaan	Penganiayaan Ringan	KDRT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	24	1.024	1	153
Sumatera Utara	84	5.142	-	792
Sumatera Barat	8	1.183	1	114
Riau	36	856	-	167
Jambi	15	502	-	80
Sumatera Selatan	51	1.188	1	211
Bengkulu	14	333	-	66
Lampung	30	783	-	141
Kep. Bangka Belitung	7	149	-	23
Kepulauan Riau	5	374	-	55
Metro Jaya	28	1.149	1	476
Jawa Barat	53	1.834	1	400
Jawa Tengah	52	604	3	89
DI Yogyakarta	11	450	-	75
Jawa Timur	102	2.774	10	725
Banten	7	284	-	68
Bali	7	371	1	89
Nusa Tenggara Barat	20	523	-	103
Nusa Tenggara Timur	20	1.263	36	206
Kalimantan Barat	10	169	-	29
Kalimantan Tengah	17	180	-	61
Kalimantan Selatan	35	306	-	53
Kalimantan Timur	22	304	3	53
Kalimantan Utara	7	97	-	24
Sulawesi Utara	33	2.504	-	261
Sulawesi Tengah	11	749	-	125
Sulawesi Selatan	46	3.950	-	405
Sulawesi Tenggara	9	748	3	100
Gorontalo	14	756	-	96
Sulawesi Barat	5	270	-	17
Maluku	12	582	-	66
Maluku Utara	1	307	-	40
Papua Barat	18	596	-	59
Papua	40	930	-	104
Mabes Polri	-	1	-	-
INDONESIA	854	33.235	61	5.526

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 12

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Kesusilaan		Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan
	Perkosaan	Pencabulan	Penculikan	Pencurian dengan Kekerasan
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
A c e h	135	82	51	57
Sumatera Utara	68	385	128	636
Sumatera Barat	27	130	30	52
Riau	45	131	46	322
Jambi	29	38	27	76
Sumatera Selatan	59	69	76	391
Bengkulu	24	34	14	62
Lampung	61	79	143	298
Kep. Bangka Belitung	11	24	4	13
Kepulauan Riau	9	69	6	67
Metro Jaya	59	113	233	290
Jawa Barat	114	266	104	360
Jawa Tengah	47	124	24	111
DI Yogyakarta	14	48	19	35
Jawa Timur	106	191	125	421
Banten	20	42	30	74
Bali	10	28	6	42
Nusa Tenggara Barat	60	39	9	94
Nusa Tenggara Timur	55	95	39	34
Kalimantan Barat	29	66	5	29
Kalimantan Tengah	13	23	8	23
Kalimantan Selatan	29	21	12	51
Kalimantan Timur	28	49	4	21
Kalimantan Utara	10	31	1	9
Sulawesi Utara	42	189	107	23
Sulawesi Tengah	44	82	16	75
Sulawesi Selatan	101	177	98	262
Sulawesi Tenggara	20	62	7	27
Gorontalo	25	73	14	6
Sulawesi Barat	18	22	9	4
Maluku	29	35	13	8
Maluku Utara	17	24	8	2
Papua Barat	34	30	27	122
Papua	51	22	29	237
Mabes Polri	-	-	-	1
INDONESIA	1.443	2.893	1.472	4.335

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 12

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
	Pencurian	Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian Kendaraan Bermotor	Penadahan
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
A c e h	1.585	561	417	16
Sumatera Utara	6.630	6.721	2.498	7
Sumatera Barat	801	509	168	1
Riau	1.600	2.249	968	7
Jambi	584	852	176	5
Sumatera Selatan	624	1.775	383	6
Bengkulu	406	499	153	1
Lampung	632	2.159	608	4
Kep. Bangka Belitung	286	333	36	1
Kepulauan Riau	280	267	220	1
Metro Jaya	1.722	3.302	873	17
Jawa Barat	1.488	4.852	2.426	6
Jawa Tengah	1.003	1.733	279	5
DI Yogyakarta	940	540	184	11
Jawa Timur	3.525	4.674	1.502	32
Banten	180	936	103	4
Bali	750	349	174	4
Nusa Tenggara Barat	548	642	213	4
Nusa Tenggara Timur	878	146	56	1
Kalimantan Barat	416	401	221	5
Kalimantan Tengah	364	375	48	28
Kalimantan Selatan	458	548	78	31
Kalimantan Timur	324	374	191	4
Kalimantan Utara	165	119	21	1
Sulawesi Utara	1.228	122	61	-
Sulawesi Tengah	1.108	289	285	3
Sulawesi Selatan	5.563	1.409	522	3
Sulawesi Tenggara	224	150	12	4
Gorontalo	288	13	33	1
Sulawesi Barat	313	69	46	1
Maluku	391	55	3	-
Maluku Utara	90	10	13	-
Papua Barat	657	338	374	-
Papua	1.141	499	839	14
Mabes Polri	-	-	-	-
INDONESIA	37.192	37.870	14.184	228

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 12

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		Kejahatan terkait Narkotika
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	Pembakaran dengan Sengaja	Narkotika dan Psikotropika
(1)	(14)	(15)	(16)
A c e h	53	27	1.207
Sumatera Utara	352	139	4.162
Sumatera Barat	46	13	922
Riau	60	39	1.470
Jambi	22	3	626
Sumatera Selatan	34	7	1.502
Bengkulu	14	5	290
Lampung	67	13	1.097
Kep. Bangka Belitung	3	4	321
Kepulauan Riau	6	4	297
Metro Jaya	87	7	2.519
Jawa Barat	100	9	1.340
Jawa Tengah	24	10	1.359
DI Yogyakarta	26	9	329
Jawa Timur	138	52	5.006
Banten	20	3	522
Bali	17	2	631
Nusa Tenggara Barat	23	10	454
Nusa Tenggara Timur	74	18	28
Kalimantan Barat	5	32	644
Kalimantan Tengah	9	5	584
Kalimantan Selatan	16	10	1.406
Kalimantan Timur	8	10	1.227
Kalimantan Utara	3	4	268
Sulawesi Utara	99	13	70
Sulawesi Tengah	31	6	377
Sulawesi Selatan	328	28	1.593
Sulawesi Tenggara	26	4	356
Gorontalo	9	1	49
Sulawesi Barat	3	2	138
Maluku	27	7	166
Maluku Utara	11	2	108
Papua Barat	46	6	99
Papua	79	48	230
Mabes Polri	-	-	23
INDONESIA	1.866	552	31.420

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 12

Kepolisian Daerah	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			Kejahatan terhadap Ketertiban Umum
	Penipuan/ Perbuatan Curang	Penggelapan	Korupsi	Terhadap Ketertiban Umum
(1)	(17)	(18)	(19)	(20)
Aceh	701	304	7	235
Sumatera Utara	3.449	1.920	7	835
Sumatera Barat	322	228	1	228
Riau	646	559	9	628
Jambi	225	242	2	110
Sumatera Selatan	1.230	417	6	314
Bengkulu	280	102	13	34
Lampung	1.258	506	10	257
Kep. Bangka Belitung	75	46	-	14
Kepulauan Riau	293	93	7	102
Metro Jaya	8.434	1.293	2	435
Jawa Barat	4.300	953	5	495
Jawa Tengah	840	425	11	594
DI Yogyakarta	1.046	320	-	148
Jawa Timur	3.668	1.012	31	1.184
Banten	621	199	10	135
Bali	402	164	2	94
Nusa Tenggara Barat	241	133	11	122
Nusa Tenggara Timur	392	139	8	136
Kalimantan Barat	144	152	15	68
Kalimantan Tengah	102	147	11	45
Kalimantan Selatan	259	210	6	83
Kalimantan Timur	151	147	12	126
Kalimantan Utara	39	40	5	24
Sulawesi Utara	502	326	7	167
Sulawesi Tengah	293	185	5	144
Sulawesi Selatan	3.333	915	13	442
Sulawesi Tenggara	200	112	8	76
Gorontalo	150	81	5	60
Sulawesi Barat	105	35	6	61
Maluku	159	42	15	10
Maluku Utara	60	24	4	28
Papua Barat	334	77	3	59
Papua	333	141	4	77
Mabes Polri	1	-	-	-
INDONESIA	34.588	11.689	261	7.570

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

DATA POTENSI DESA KEJADIAN KEJAHATAN



Lampiran 13 Jumlah Desa/Kelurahan, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	6.512	6.508	6.514
Sumatera Utara	6.104	6.132	6.132
Sumatera Barat	1.145	1.275	1.287
Riau	1.835	1.875	1.876
Jambi	1.551	1.562	1.562
Sumatera Selatan	3.237	3.262	3.292
Bengkulu	1.532	1.514	1.514
Lampung	2.632	2.654	2.654
Kep. Bangka Belitung	381	391	393
Kepulauan Riau	415	416	428
DKI Jakarta	267	267	267
Jawa Barat	5.962	5.957	5.957
Jawa Tengah	8.578	8.559	8.562
DI Yogyakarta	438	438	438
Jawa Timur	8.502	8.496	8.496
Banten	1.551	1.552	1.552
Bali	716	716	716
Nusa Tenggara Barat	1.141	1.143	1.151
Nusa Tenggara Timur	3.270	3.353	3.450
Kalimantan Barat	2.109	2.137	2.148
Kalimantan Tengah	1.569	1.576	1.576
Kalimantan Selatan	2.008	2.008	2.007
Kalimantan Timur	1.026	1.038	1.046
Kalimantan Utara	479	482	482
Sulawesi Utara	1.836	1.838	1.840
Sulawesi Tengah	1.986	2.020	2.020
Sulawesi Selatan	3.030	3.049	3.051
Sulawesi Tenggara	2.272	2.354	2.309
Gorontalo	736	734	734
Sulawesi Barat	648	650	650
Maluku	1.088	1.240	1.248
Maluku Utara	1.196	1.196	1.203
Papua Barat	1.567	1.987	1.986
Papua	4.871	5.552	5.555
INDONESIA	82.190	83.931	84.096

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Catatan: Desa pada tabel ini termasuk nagari, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait.

Lampiran 14 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, 2014, 2018, dan 2021

Jenis Kejahatan	Jumlah			Persentase		
	2014	2018	2021	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembunuhan	1.739	1.799	916	2,12	2,14	1,09
Penganiayaan	4.047	5.092	2.284	4,92	6,07	2,72
Perkosaan	2.050	2.851	1.209	2,49	3,40	1,44
Pencurian dengan Kekerasan	2.963	2.821	1.455	3,61	3,36	1,73
Pencurian	33.739	37.778	22.285	41,05	45,01	26,50
Penipuan/Penggelapan	7.244	8.620	4.284	8,81	10,27	5,09
Pembakaran	874	1.050	463	1,06	1,25	0,55
Perdagangan Orang	122	124	49	0,15	0,15	0,06
Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba	5.931	12.579	9.019	7,22	14,99	10,72
Perjudian	11.079	12.842	7.473	13,48	15,30	8,89

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 15 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	26	33	21
Sumatera Utara	130	122	64
Sumatera Barat	39	43	20
Riau	56	72	28
Jambi	30	33	18
Sumatera Selatan	140	114	65
Bengkulu	27	21	11
Lampung	50	66	29
Kep. Bangka Belitung	14	8	9
Kepulauan Riau	14	5	5
DKI Jakarta	29	14	11
Jawa Barat	142	130	51
Jawa Tengah	86	93	37
DI Yogyakarta	16	13	7
Jawa Timur	163	150	90
Banten	32	38	14
Bali	17	9	12
Nusa Tenggara Barat	37	37	23
Nusa Tenggara Timur	80	82	57
Kalimantan Barat	41	29	32
Kalimantan Tengah	51	41	19
Kalimantan Selatan	64	58	40
Kalimantan Timur	31	32	20
Kalimantan Utara	8	4	3
Sulawesi Utara	61	57	29
Sulawesi Tengah	41	41	22
Sulawesi Selatan	99	95	46
Sulawesi Tenggara	26	39	25
Gorontalo	17	25	12
Sulawesi Barat	8	8	11
Maluku	17	15	9
Maluku Utara	13	21	5
Papua Barat	22	27	19
Papua	112	224	52
INDONESIA	1.739	1.799	916

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 16 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	99	141	62
Sumatera Utara	264	295	162
Sumatera Barat	107	112	49
Riau	74	139	36
Jambi	50	81	30
Sumatera Selatan	168	173	77
Bengkulu	46	57	41
Lampung	110	157	53
Kep. Bangka Belitung	50	47	20
Kepulauan Riau	20	30	11
DKI Jakarta	66	30	27
Jawa Barat	425	598	251
Jawa Tengah	274	328	163
DI Yogyakarta	54	61	44
Jawa Timur	429	519	224
Banten	84	123	43
Bali	54	64	33
Nusa Tenggara Barat	107	134	97
Nusa Tenggara Timur	166	209	98
Kalimantan Barat	85	78	44
Kalimantan Tengah	68	66	24
Kalimantan Selatan	110	105	51
Kalimantan Timur	52	71	36
Kalimantan Utara	11	18	5
Sulawesi Utara	161	181	80
Sulawesi Tengah	102	138	59
Sulawesi Selatan	261	263	123
Sulawesi Tenggara	158	140	57
Gorontalo	64	105	44
Sulawesi Barat	17	22	10
Maluku	50	60	28
Maluku Utara	48	46	25
Papua Barat	21	62	28
Papua	192	439	149
INDONESIA	4.047	5.092	2.284

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 17 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	91	93	42
Sumatera Utara	115	178	75
Sumatera Barat	66	106	60
Riau	59	95	25
Jambi	35	54	22
Sumatera Selatan	78	72	35
Bengkulu	57	39	33
Lampung	57	96	41
Kep. Bangka Belitung	16	19	7
Kepulauan Riau	19	13	11
DKI Jakarta	25	9	6
Jawa Barat	175	206	96
Jawa Tengah	148	159	67
DI Yogyakarta	11	15	11
Jawa Timur	215	210	99
Banten	39	52	27
Bali	9	9	7
Nusa Tenggara Barat	39	54	40
Nusa Tenggara Timur	104	111	80
Kalimantan Barat	63	65	42
Kalimantan Tengah	32	30	21
Kalimantan Selatan	25	44	16
Kalimantan Timur	23	45	26
Kalimantan Utara	9	14	7
Sulawesi Utara	54	95	42
Sulawesi Tengah	56	67	29
Sulawesi Selatan	47	90	31
Sulawesi Tenggara	40	51	21
Gorontalo	36	58	25
Sulawesi Barat	5	15	13
Maluku	27	40	22
Maluku Utara	26	35	20
Papua Barat	23	41	14
Papua	226	571	96
INDONESIA	2.050	2.851	1.209

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 18 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	47	59	44
Sumatera Utara	141	182	141
Sumatera Barat	71	53	47
Riau	101	103	89
Jambi	76	85	27
Sumatera Selatan	430	323	119
Bengkulu	40	52	15
Lampung	255	233	102
Kep. Bangka Belitung	15	8	9
Kepulauan Riau	17	20	4
DKI Jakarta	73	38	32
Jawa Barat	344	342	172
Jawa Tengah	176	155	60
DI Yogyakarta	20	17	14
Jawa Timur	419	295	159
Banten	49	76	49
Bali	23	22	12
Nusa Tenggara Barat	146	76	30
Nusa Tenggara Timur	67	68	35
Kalimantan Barat	37	34	40
Kalimantan Tengah	27	20	7
Kalimantan Selatan	73	48	17
Kalimantan Timur	37	32	22
Kalimantan Utara	9	8	1
Sulawesi Utara	21	30	12
Sulawesi Tengah	23	24	37
Sulawesi Selatan	47	73	30
Sulawesi Tenggara	16	18	9
Gorontalo	3	9	9
Sulawesi Barat	7	4	4
Maluku	20	12	6
Maluku Utara	7	9	9
Papua Barat	13	34	24
Papua	113	259	68
INDONESIA	2.963	2.821	1.455

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 19 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	1.744	2.225	982
Sumatera Utara	2.116	2.776	1.642
Sumatera Barat	574	779	597
Riau	942	1.169	667
Jambi	661	915	641
Sumatera Selatan	1.939	2.016	1.124
Bengkulu	635	743	449
Lampung	1.621	1.875	1.251
Kep. Bangka Belitung	203	206	146
Kepulauan Riau	133	159	91
DKI Jakarta	229	184	153
Jawa Barat	4.390	4.394	2.803
Jawa Tengah	4.064	4.068	2.185
DI Yogyakarta	283	294	202
Jawa Timur	4.122	3.919	2.385
Banten	1.079	1.104	723
Bali	202	254	159
Nusa Tenggara Barat	782	730	509
Nusa Tenggara Timur	724	863	437
Kalimantan Barat	648	808	502
Kalimantan Tengah	409	562	330
Kalimantan Selatan	889	926	567
Kalimantan Timur	354	456	347
Kalimantan Utara	62	134	87
Sulawesi Utara	676	705	382
Sulawesi Tengah	578	777	451
Sulawesi Selatan	1.206	1.309	744
Sulawesi Tenggara	489	733	297
Gorontalo	179	253	114
Sulawesi Barat	171	195	95
Maluku	225	266	132
Maluku Utara	297	352	203
Papua Barat	149	227	170
Papua	964	1.402	718
INDONESIA	33.739	37.778	22.285

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 20 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	229	356	141
Sumatera Utara	378	512	211
Sumatera Barat	138	204	93
Riau	204	235	131
Jambi	109	180	79
Sumatera Selatan	334	287	142
Bengkulu	77	106	53
Lampung	284	422	194
Kep. Bangka Belitung	62	55	32
Kepulauan Riau	39	45	12
DKI Jakarta	100	62	43
Jawa Barat	1.111	1.187	620
Jawa Tengah	952	986	578
DI Yogyakarta	96	121	70
Jawa Timur	1.001	1.100	645
Banten	227	292	115
Bali	42	54	37
Nusa Tenggara Barat	136	178	130
Nusa Tenggara Timur	163	154	62
Kalimantan Barat	141	153	97
Kalimantan Tengah	95	72	37
Kalimantan Selatan	150	172	66
Kalimantan Timur	84	91	52
Kalimantan Utara	10	28	10
Sulawesi Utara	89	138	60
Sulawesi Tengah	107	143	51
Sulawesi Selatan	305	458	166
Sulawesi Tenggara	87	157	49
Gorontalo	35	56	31
Sulawesi Barat	27	62	17
Maluku	52	49	34
Maluku Utara	49	52	21
Papua Barat	37	55	28
Papua	294	398	177
INDONESIA	7.244	8.620	4.284

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 21 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	48	32	19
Sumatera Utara	53	61	16
Sumatera Barat	18	27	5
Riau	78	60	26
Jambi	26	28	19
Sumatera Selatan	30	54	28
Bengkulu	15	8	19
Lampung	11	20	5
Kep. Bangka Belitung	6	2	2
Kepulauan Riau	10	13	5
DKI Jakarta	10	3	4
Jawa Barat	54	57	14
Jawa Tengah	39	37	12
DI Yogyakarta	5	5	3
Jawa Timur	68	65	37
Banten	13	6	8
Bali	7	9	2
Nusa Tenggara Barat	14	13	12
Nusa Tenggara Timur	98	100	65
Kalimantan Barat	23	38	16
Kalimantan Tengah	34	34	13
Kalimantan Selatan	18	32	16
Kalimantan Timur	11	12	10
Kalimantan Utara	10	10	4
Sulawesi Utara	17	11	11
Sulawesi Tengah	21	16	9
Sulawesi Selatan	32	28	13
Sulawesi Tenggara	9	15	3
Gorontalo	5	9	6
Sulawesi Barat	6	5	0
Maluku	9	19	7
Maluku Utara	7	22	2
Papua Barat	8	17	11
Papua	61	182	41
INDONESIA	874	1.050	463

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 22 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	2	3	–
Sumatera Utara	11	5	2
Sumatera Barat	–	1	1
Riau	2	6	–
Jambi	–	3	–
Sumatera Selatan	5	6	–
Bengkulu	2	1	–
Lampung	1	6	1
Kep. Bangka Belitung	2	4	1
Kepulauan Riau	2	2	1
DKI Jakarta	2	–	2
Jawa Barat	25	17	19
Jawa Tengah	11	3	1
DI Yogyakarta	–	–	–
Jawa Timur	11	14	7
Banten	2	6	2
Bali	1	–	–
Nusa Tenggara Barat	2	3	1
Nusa Tenggara Timur	14	27	2
Kalimantan Barat	7	–	3
Kalimantan Tengah	3	1	1
Kalimantan Selatan	–	1	1
Kalimantan Timur	–	1	–
Kalimantan Utara	1	–	–
Sulawesi Utara	6	6	2
Sulawesi Tengah	1	–	–
Sulawesi Selatan	4	2	1
Sulawesi Tenggara	1	–	–
Gorontalo	1	–	1
Sulawesi Barat	–	–	–
Maluku	1	1	–
Maluku Utara	–	–	–
Papua Barat	–	–	–
Papua	2	5	–
INDONESIA	122	124	49

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

**Lampiran 23 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/
Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi,
2014, 2018, dan 2021**

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	508	1.212	562
Sumatera Utara	1.033	1.795	1.373
Sumatera Barat	168	481	411
Riau	315	683	546
Jambi	167	387	298
Sumatera Selatan	409	783	596
Bengkulu	74	115	138
Lampung	186	466	341
Kep. Bangka Belitung	58	112	86
Kepulauan Riau	27	63	29
DKI Jakarta	126	92	89
Jawa Barat	558	952	631
Jawa Tengah	263	495	316
DI Yogyakarta	37	73	72
Jawa Timur	639	1.480	1.165
Banten	155	259	184
Bali	34	65	57
Nusa Tenggara Barat	93	216	232
Nusa Tenggara Timur	18	9	12
Kalimantan Barat	61	241	165
Kalimantan Tengah	81	229	160
Kalimantan Selatan	312	675	340
Kalimantan Timur	148	301	253
Kalimantan Utara	32	94	57
Sulawesi Utara	25	56	29
Sulawesi Tengah	144	316	257
Sulawesi Selatan	128	506	340
Sulawesi Tenggara	25	84	79
Gorontalo	21	43	21
Sulawesi Barat	20	60	67
Maluku	15	28	20
Maluku Utara	21	28	22
Papua Barat	8	34	26
Papua	22	146	45
INDONESIA	5.931	12.579	9.019

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 24 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	401	598	283
Sumatera Utara	1.665	1.947	1.227
Sumatera Barat	267	458	276
Riau	329	510	284
Jambi	157	297	158
Sumatera Selatan	683	662	386
Bengkulu	67	107	54
Lampung	393	546	246
Kep. Bangka Belitung	71	60	28
Kepulauan Riau	31	48	14
DKI Jakarta	83	35	25
Jawa Barat	692	776	574
Jawa Tengah	770	1.153	711
DI Yogyakarta	59	74	29
Jawa Timur	1.502	1.295	692
Banten	180	231	131
Bali	81	67	45
Nusa Tenggara Barat	198	205	168
Nusa Tenggara Timur	293	389	198
Kalimantan Barat	303	416	230
Kalimantan Tengah	250	217	106
Kalimantan Selatan	283	230	118
Kalimantan Timur	129	145	111
Kalimantan Utara	39	44	30
Sulawesi Utara	377	300	158
Sulawesi Tengah	337	297	122
Sulawesi Selatan	377	458	263
Sulawesi Tenggara	126	235	106
Gorontalo	116	115	76
Sulawesi Barat	95	60	31
Maluku	165	125	168
Maluku Utara	147	93	75
Papua Barat	57	61	82
Papua	356	588	268
INDONESIA	11.079	12.842	7.473

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 25 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	0,40	0,51	0,32
Sumatera Utara	2,13	1,99	1,04
Sumatera Barat	3,41	3,37	1,55
Riau	3,05	3,84	1,49
Jambi	1,93	2,11	1,15
Sumatera Selatan	4,32	3,49	1,97
Bengkulu	1,76	1,39	0,73
Lampung	1,90	2,49	1,09
Kep. Bangka Belitung	3,67	2,05	2,29
Kepulauan Riau	3,37	1,20	1,17
DKI Jakarta	10,86	5,24	4,12
Jawa Barat	2,38	2,18	0,86
Jawa Tengah	1,00	1,09	0,43
DI Yogyakarta	3,65	2,97	1,60
Jawa Timur	1,92	1,77	1,06
Banten	2,06	2,45	0,90
Bali	2,37	1,26	1,68
Nusa Tenggara Barat	3,24	3,24	2,00
Nusa Tenggara Timur	2,45	2,45	1,65
Kalimantan Barat	1,94	1,36	1,49
Kalimantan Tengah	3,25	2,60	1,21
Kalimantan Selatan	3,19	2,89	1,99
Kalimantan Timur	3,02	3,08	1,91
Kalimantan Utara	1,67	0,83	0,62
Sulawesi Utara	3,32	3,10	1,58
Sulawesi Tengah	2,06	2,03	1,09
Sulawesi Selatan	3,27	3,12	1,51
Sulawesi Tenggara	1,14	1,66	1,08
Gorontalo	2,31	3,41	1,63
Sulawesi Barat	1,23	1,23	1,69
Maluku	1,56	1,21	0,72
Maluku Utara	1,09	1,76	0,42
Papua Barat	1,40	1,36	0,96
Papua	2,30	4,03	0,94
INDONESIA	2,12	2,14	1,09

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 26 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	1,52	2,17	0,95
Sumatera Utara	4,33	4,81	2,64
Sumatera Barat	9,34	8,78	3,81
Riau	4,03	7,41	1,92
Jambi	3,22	5,19	1,92
Sumatera Selatan	5,19	5,30	2,34
Bengkulu	3,00	3,76	2,71
Lampung	4,18	5,92	2,00
Kep. Bangka Belitung	13,12	12,02	5,09
Kepulauan Riau	4,82	7,21	2,57
DKI Jakarta	24,72	11,24	10,11
Jawa Barat	7,13	10,04	4,21
Jawa Tengah	3,19	3,83	1,90
DI Yogyakarta	12,33	13,93	10,05
Jawa Timur	5,05	6,11	2,64
Banten	5,42	7,93	2,77
Bali	7,54	8,94	4,61
Nusa Tenggara Barat	9,38	11,72	8,43
Nusa Tenggara Timur	5,08	6,23	2,84
Kalimantan Barat	4,03	3,65	2,05
Kalimantan Tengah	4,33	4,19	1,52
Kalimantan Selatan	5,48	5,23	2,54
Kalimantan Timur	5,07	6,84	3,44
Kalimantan Utara	2,30	3,73	1,04
Sulawesi Utara	8,77	9,85	4,35
Sulawesi Tengah	5,14	6,83	2,92
Sulawesi Selatan	8,61	8,63	4,03
Sulawesi Tenggara	6,95	5,95	2,47
Gorontalo	8,70	14,31	5,99
Sulawesi Barat	2,62	3,38	1,54
Maluku	4,60	4,84	2,24
Maluku Utara	4,01	3,85	2,08
Papua Barat	1,34	3,12	1,41
Papua	3,94	7,91	2,68
INDONESIA	4,92	6.07	2,72

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 27 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	1,40	1,43	0,64
Sumatera Utara	1,88	2,90	1,22
Sumatera Barat	5,76	8,31	4,66
Riau	3,22	5,07	1,33
Jambi	2,26	3,46	1,41
Sumatera Selatan	2,41	2,21	1,06
Bengkulu	3,72	2,58	2,18
Lampung	2,17	3,62	1,54
Kep. Bangka Belitung	4,20	4,86	1,78
Kepulauan Riau	4,58	3,13	2,57
DKI Jakarta	9,36	3,37	2,25
Jawa Barat	2,94	3,46	1,61
Jawa Tengah	1,73	1,86	0,78
DI Yogyakarta	2,51	3,42	2,51
Jawa Timur	2,53	2,47	1,17
Banten	2,51	3,35	1,74
Bali	1,26	1,26	0,98
Nusa Tenggara Barat	3,42	4,72	3,48
Nusa Tenggara Timur	3,18	3,31	2,32
Kalimantan Barat	2,99	3,04	1,96
Kalimantan Tengah	2,04	1,90	1,33
Kalimantan Selatan	1,25	2,19	0,80
Kalimantan Timur	2,24	4,34	2,49
Kalimantan Utara	1,88	2,90	1,45
Sulawesi Utara	2,94	5,17	2,28
Sulawesi Tengah	2,82	3,32	1,44
Sulawesi Selatan	1,55	2,95	1,02
Sulawesi Tenggara	1,76	2,17	0,91
Gorontalo	4,89	7,90	3,41
Sulawesi Barat	0,77	2,31	2,00
Maluku	2,48	3,23	1,76
Maluku Utara	2,17	2,93	1,66
Papua Barat	1,47	2,06	0,70
Papua	4,64	10,28	1,73
INDONESIA	2,49	3,40	1,44

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 28 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	0,72	0,91	0,68
Sumatera Utara	2,31	2,97	2,30
Sumatera Barat	6,20	4,16	3,65
Riau	5,50	5,49	4,74
Jambi	4,90	5,44	1,73
Sumatera Selatan	13,28	9,90	3,61
Bengkulu	2,61	3,43	0,99
Lampung	9,69	8,78	3,84
Kep. Bangka Belitung	3,94	2,05	2,29
Kepulauan Riau	4,10	4,81	0,93
DKI Jakarta	27,34	14,23	11,99
Jawa Barat	5,77	5,74	2,89
Jawa Tengah	2,05	1,81	0,70
DI Yogyakarta	4,57	3,88	3,20
Jawa Timur	4,93	3,47	1,87
Banten	3,16	4,90	3,16
Bali	3,21	3,07	1,68
Nusa Tenggara Barat	12,80	6,65	2,61
Nusa Tenggara Timur	2,05	2,03	1,01
Kalimantan Barat	1,75	1,59	1,86
Kalimantan Tengah	1,72	1,27	0,44
Kalimantan Selatan	3,64	2,39	0,85
Kalimantan Timur	3,61	3,08	2,10
Kalimantan Utara	1,88	1,66	0,21
Sulawesi Utara	1,14	1,63	0,65
Sulawesi Tengah	1,16	1,19	1,83
Sulawesi Selatan	1,55	2,39	0,98
Sulawesi Tenggara	0,70	0,76	0,39
Gorontalo	0,41	1,23	1,23
Sulawesi Barat	1,08	0,62	0,62
Maluku	1,84	0,97	0,48
Maluku Utara	0,59	0,75	0,75
Papua Barat	0,83	1,71	1,21
Papua	2,32	4,66	1,22
INDONESIA	3,61	3,36	1,73

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 29 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	26,78	34,19	15,08
Sumatera Utara	34,67	45,27	26,78
Sumatera Barat	50,13	61,10	46,39
Riau	51,34	62,35	35,55
Jambi	42,62	58,58	41,04
Sumatera Selatan	59,90	61,80	34,14
Bengkulu	41,45	49,08	29,66
Lampung	61,59	70,65	47,14
Kep. Bangka Belitung	53,28	52,69	37,15
Kepulauan Riau	32,05	38,22	21,26
DKI Jakarta	85,77	68,91	57,30
Jawa Barat	73,63	73,76	47,05
Jawa Tengah	47,38	47,53	25,52
DI Yogyakarta	64,61	67,12	46,12
Jawa Timur	48,48	46,13	28,07
Banten	69,57	71,13	46,59
Bali	28,21	35,47	22,21
Nusa Tenggara Barat	68,54	63,87	44,22
Nusa Tenggara Timur	22,14	25,74	12,67
Kalimantan Barat	30,73	37,81	23,37
Kalimantan Tengah	26,07	35,66	20,94
Kalimantan Selatan	44,27	46,12	28,25
Kalimantan Timur	34,50	43,93	33,17
Kalimantan Utara	12,94	27,80	18,05
Sulawesi Utara	36,82	38,36	20,76
Sulawesi Tengah	29,10	38,47	22,33
Sulawesi Selatan	39,80	42,93	24,39
Sulawesi Tenggara	21,52	31,14	12,86
Gorontalo	24,32	34,47	15,53
Sulawesi Barat	26,39	30,00	14,62
Maluku	20,68	21,45	10,58
Maluku Utara	24,83	29,43	16,87
Papua Barat	9,51	11,42	8,56
Papua	19,79	25,25	12,93
INDONESIA	41,05	45,01	26,50

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 30 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/ Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	3,52	5,47	2,16
Sumatera Utara	6,19	8,35	3,44
Sumatera Barat	12,05	16,00	7,23
Riau	11,12	12,53	6,98
Jambi	7,03	11,52	5,06
Sumatera Selatan	10,32	8,80	4,31
Bengkulu	5,03	7,00	3,50
Lampung	10,79	15,90	7,31
Kep. Bangka Belitung	16,27	14,07	8,14
Kepulauan Riau	9,40	10,82	2,80
DKI Jakarta	37,45	23,22	16,10
Jawa Barat	18,63	19,93	10,41
Jawa Tengah	11,10	11,52	6,75
DI Yogyakarta	21,92	27,63	15,98
Jawa Timur	11,77	12,95	7,59
Banten	14,64	18,81	7,41
Bali	5,87	7,54	5,17
Nusa Tenggara Barat	11,92	15,57	11,29
Nusa Tenggara Timur	4,98	4,59	1,80
Kalimantan Barat	6,69	7,16	4,52
Kalimantan Tengah	6,05	4,57	2,35
Kalimantan Selatan	7,47	8,57	3,29
Kalimantan Timur	8,19	8,77	4,97
Kalimantan Utara	2,09	5,81	2,07
Sulawesi Utara	4,85	7,51	3,26
Sulawesi Tengah	5,39	7,08	2,52
Sulawesi Selatan	10,07	15,02	5,44
Sulawesi Tenggara	3,83	6,67	2,12
Gorontalo	4,76	7,63	4,22
Sulawesi Barat	4,17	9,54	2,62
Maluku	4,78	3,95	2,72
Maluku Utara	4,10	4,35	1,75
Papua Barat	2,36	2,77	1,41
Papua	6,04	7,17	3,19
INDONESIA	8,81	10,27	5,09

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 31 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	0,74	0,49	0,29
Sumatera Utara	0,87	0,99	0,26
Sumatera Barat	1,57	2,12	0,39
Riau	4,25	3,20	1,39
Jambi	1,68	1,79	1,22
Sumatera Selatan	0,93	1,66	0,85
Bengkulu	0,98	0,53	1,25
Lampung	0,42	0,75	0,19
Kep. Bangka Belitung	1,57	0,51	0,51
Kepulauan Riau	2,41	3,13	1,17
DKI Jakarta	3,75	1,12	1,50
Jawa Barat	0,91	0,96	0,24
Jawa Tengah	0,45	0,43	0,14
DI Yogyakarta	1,14	1,14	0,68
Jawa Timur	0,80	0,77	0,44
Banten	0,84	0,39	0,52
Bali	0,98	1,26	0,28
Nusa Tenggara Barat	1,23	1,14	1,04
Nusa Tenggara Timur	3,00	2,98	1,88
Kalimantan Barat	1,09	1,78	0,74
Kalimantan Tengah	2,17	2,16	0,82
Kalimantan Selatan	0,90	1,59	0,80
Kalimantan Timur	1,07	1,16	0,96
Kalimantan Utara	2,09	2,07	0,83
Sulawesi Utara	0,93	0,60	0,60
Sulawesi Tengah	1,06	0,79	0,45
Sulawesi Selatan	1,06	0,92	0,43
Sulawesi Tenggara	0,40	0,64	0,13
Gorontalo	0,68	1,23	0,82
Sulawesi Barat	0,93	0,77	0,00
Maluku	0,83	1,53	0,56
Maluku Utara	0,59	1,84	0,17
Papua Barat	0,51	0,86	0,55
Papua	1,25	3,28	0,74
INDONESIA	1,06	1,25	0,55

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 32 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	0,03	0,05	–
Sumatera Utara	0,18	0,08	0,03
Sumatera Barat	–	0,08	0,08
Riau	0,11	0,32	–
Jambi	–	0,19	–
Sumatera Selatan	0,15	0,18	–
Bengkulu	0,13	0,07	–
Lampung	0,04	0,23	0,04
Kep. Bangka Belitung	0,52	1,02	0,25
Kepulauan Riau	0,48	0,48	0,23
DKI Jakarta	0,75	–	0,75
Jawa Barat	0,42	0,29	0,32
Jawa Tengah	0,13	0,04	0,01
DI Yogyakarta	–	–	–
Jawa Timur	0,13	0,16	0,08
Banten	0,13	0,39	0,13
Bali	0,14	–	–
Nusa Tenggara Barat	0,18	0,26	0,09
Nusa Tenggara Timur	0,43	0,81	0,06
Kalimantan Barat	0,33	–	0,14
Kalimantan Tengah	0,19	0,06	0,06
Kalimantan Selatan	–	0,05	0,05
Kalimantan Timur	–	0,10	–
Kalimantan Utara	0,21	–	–
Sulawesi Utara	0,33	0,33	0,11
Sulawesi Tengah	0,05	–	–
Sulawesi Selatan	0,13	0,07	0,03
Sulawesi Tenggara	0,04	–	–
Gorontalo	0,14	–	0,14
Sulawesi Barat	–	–	–
Maluku	0,09	0,08	–
Maluku Utara	–	–	–
Papua Barat	–	–	–
Papua	0,04	0,09	–
INDONESIA	0,15	0,15	0,06

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 33 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	7,80	18,62	8,63
Sumatera Utara	16,92	29,27	22,39
Sumatera Barat	14,67	37,73	31,93
Riau	17,17	36,43	29,10
Jambi	10,77	24,78	19,08
Sumatera Selatan	12,64	24,00	18,10
Bengkulu	4,83	7,60	9,11
Lampung	7,07	17,56	12,85
Kep. Bangka Belitung	15,22	28,64	21,88
Kepulauan Riau	6,51	15,14	6,78
DKI Jakarta	47,19	34,46	33,33
Jawa Barat	9,36	15,98	10,59
Jawa Tengah	3,07	5,78	3,69
DI Yogyakarta	8,45	16,67	16,44
Jawa Timur	7,52	17,42	13,71
Banten	9,99	16,69	11,86
Bali	4,75	9,08	7,96
Nusa Tenggara Barat	8,15	18,90	20,16
Nusa Tenggara Timur	0,55	0,27	0,35
Kalimantan Barat	2,89	11,28	7,68
Kalimantan Tengah	5,16	14,53	10,15
Kalimantan Selatan	15,54	33,62	16,94
Kalimantan Timur	14,42	29,00	24,19
Kalimantan Utara	6,68	19,50	11,83
Sulawesi Utara	1,36	3,05	1,58
Sulawesi Tengah	7,25	15,64	12,72
Sulawesi Selatan	4,22	16,60	11,14
Sulawesi Tenggara	1,10	3,57	3,42
Gorontalo	2,85	5,86	2,86
Sulawesi Barat	3,09	9,23	10,31
Maluku	1,38	2,26	1,60
Maluku Utara	1,76	2,34	1,83
Papua Barat	0,51	1,71	1,31
Papua	0,45	2,63	0,81
INDONESIA	7,22	14,99	10,72

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 34 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	6,16	9,19	4,34
Sumatera Utara	27,28	31,75	20,01
Sumatera Barat	23,32	35,92	21,45
Riau	17,93	27,20	15,14
Jambi	10,12	19,01	10,12
Sumatera Selatan	21,10	20,29	11,73
Bengkulu	4,37	7,07	3,57
Lampung	14,93	20,57	9,27
Kep. Bangka Belitung	18,64	15,35	7,12
Kepulauan Riau	7,47	11,54	3,27
DKI Jakarta	31,09	13,11	9,36
Jawa Barat	11,61	13,03	9,64
Jawa Tengah	8,98	13,47	8,30
DI Yogyakarta	13,47	16,89	6,62
Jawa Timur	17,67	15,24	8,15
Banten	11,61	14,88	8,44
Bali	11,31	9,36	6,28
Nusa Tenggara Barat	17,35	17,94	14,60
Nusa Tenggara Timur	8,96	11,60	5,74
Kalimantan Barat	14,37	19,47	10,71
Kalimantan Tengah	15,93	13,77	6,73
Kalimantan Selatan	14,09	11,45	5,88
Kalimantan Timur	12,57	13,97	10,61
Kalimantan Utara	8,14	9,13	6,22
Sulawesi Utara	20,53	16,32	8,59
Sulawesi Tengah	16,97	14,70	6,04
Sulawesi Selatan	12,44	15,02	8,62
Sulawesi Tenggara	5,55	9,98	4,59
Gorontalo	15,76	15,67	10,35
Sulawesi Barat	14,66	9,23	4,77
Maluku	15,17	10,08	13,46
Maluku Utara	12,29	7,78	6,23
Papua Barat	3,64	3,07	4,13
Papua	7,31	10,59	4,82
INDONESIA	13,48	15,30	8,89

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

DATA POTENSI DESA KONFLIK MASSAL



Lampiran 35 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia Menurut Beberapa Karakteristik Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014, 2018, dan 2021

Kelompok/Jenis Kejahatan	2014		2018		2021	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Keberadaan Kejadian Perkelahian Massal						
1 Ada kejadian	2.779	3,38	3.147	3,75	1.553	1,85
2 Tidak ada kejadian	79.411	96,47	80.784	96,25	82.543	98,15
Total desa/kelurahan	82.190	100,00	83.931	100,00	84.096	100,00
B Jenis Perkelahian Massal						
1 Antar Kelompok Warga	1.404	1,71	1.674	1,99	845	1,00
2 Warga Antar Desa/ Kelurahan	1.128	1,37	1.078	1,28	542	0,64
3 Warga dengan Aparat Keamanan	108	0,13	91	0,11	45	0,05
4 Warga dengan Aparat Keamanan	99	0,12	132	0,16	77	0,09
5 Antar Pelajar/Mahasiswa	327	0,40	548	0,65	188	0,22
6 Antar Suku	70	0,09	112	0,13	34	0,04
7 Lainnya	160	0,19	171	0,20	120	0,14
C Penyelesaian Perkelahian Massal						
1 Diselesaikan secara damai	2.564	92,26	2.961	94,09	1.483	95,49
2 Tidak dapat diselesaikan	215	7,74	186	5,91	70	4,51
Total desa/kelurahan yang ada kejadian perkelahian massal	2.779	100,00	3.147	100,00	1.553	100,00

Sumber: Diolah dari Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 36 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	2014		2018		2021	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	61	0,94	90	1,38	34	0,52
Sumatera Utara	118	1,93	176	2,87	84	1,37
Sumatera Barat	45	3,93	80	6,27	36	2,80
Riau	38	2,07	51	2,72	13	0,69
Jambi	40	2,58	41	2,62	24	1,54
Sumatera Selatan	67	2,07	37	1,13	20	0,61
Bengkulu	27	1,76	28	1,85	9	0,59
Lampung	34	1,29	44	1,66	6	0,23
Kep. Bangka Belitung	24	6,30	3	0,77	5	1,27
Kepulauan Riau	3	0,72	4	0,96	-	-
DKI Jakarta	72	26,97	55	20,60	47	17,60
Jawa Barat	259	4,34	291	4,89	158	2,65
Jawa Tengah	252	2,94	233	2,72	95	1,11
DI Yogyakarta	12	2,74	14	3,20	9	2,05
Jawa Timur	132	1,55	185	2,18	104	1,22
Banten	40	2,58	58	3,74	15	0,97
Bali	6	0,84	5	0,70	3	0,42
Nusa Tenggara Barat	76	6,66	81	7,09	22	1,91
Nusa Tenggara Timur	174	5,32	205	6,11	129	3,74
Kalimantan Barat	39	1,85	30	1,40	8	0,37
Kalimantan Tengah	36	2,29	13	0,83	17	1,08
Kalimantan Selatan	26	1,29	21	1,05	13	0,65
Kalimantan Timur	20	1,95	17	1,64	15	1,43
Kalimantan Utara	6	1,25	5	1,04	4	0,83
Sulawesi Utara	165	8,99	111	6,04	49	2,66
Sulawesi Tengah	149	7,50	98	4,85	36	1,78
Sulawesi Selatan	145	4,79	130	4,26	78	2,56
Sulawesi Tenggara	73	3,21	84	3,57	40	1,73
Gorontalo	24	3,26	18	2,45	10	1,36
Sulawesi Barat	14	2,16	15	2,31	1	0,15
Maluku	160	14,71	199	16,05	161	12,90
Maluku Utara	186	15,55	164	13,71	93	7,73
Papua Barat	59	3,77	114	5,74	75	3,78
Papua	197	4,04	447	8,05	140	2,52
INDONESIA	2.779	3,38	3.147	3,75	1.553	1,85

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 37 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	26	24	1	2
Sumatera Utara	58	43	10	7
Sumatera Barat	29	10	5	–
Riau	14	13	3	1
Jambi	8	22	–	1
Sumatera Selatan	34	23	9	4
Bengkulu	7	8	–	–
Lampung	11	20	1	1
Kep. Bangka Belitung	12	11	–	1
Kepulauan Riau	2	–	–	–
DKI Jakarta	34	7	–	–
Jawa Barat	103	91	4	4
Jawa Tengah	120	120	4	5
DI Yogyakarta	5	4	–	–
Jawa Timur	62	51	3	2
Banten	14	12	1	–
Bali	3	–	–	–
Nusa Tenggara Barat	33	42	4	2
Nusa Tenggara Timur	90	64	1	12
Kalimantan Barat	29	8	3	–
Kalimantan Tengah	27	1	1	–
Kalimantan Selatan	9	11	–	1
Kalimantan Timur	12	1	1	2
Kalimantan Utara	3	3	–	–
Sulawesi Utara	83	99	8	4
Sulawesi Tengah	54	102	2	1
Sulawesi Selatan	71	68	5	–
Sulawesi Tenggara	34	44	5	3
Gorontalo	14	7	2	4
Sulawesi Barat	6	8	–	–
Maluku	99	68	5	7
Maluku Utara	125	76	5	5
Papua Barat	36	23	6	2
Papua	137	44	19	28
INDONESIA	1.404	1.128	108	99

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Lanjutan Lampiran 37

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	7	2	4
Sumatera Utara	8	2	11
Sumatera Barat	7	1	2
Riau	1	2	8
Jambi	10	1	2
Sumatera Selatan	7	-	4
Bengkulu	11	1	2
Lampung	1	2	3
Kep. Bangka Belitung	2	1	1
Kepulauan Riau	1	1	-
DKI Jakarta	47	-	2
Jawa Barat	89	3	19
Jawa Tengah	11	-	10
DI Yogyakarta	2	1	5
Jawa Timur	12	-	9
Banten	12	-	2
Bali	-	-	3
Nusa Tenggara Barat	9	3	3
Nusa Tenggara Timur	10	6	8
Kalimantan Barat	4	-	2
Kalimantan Tengah	6	-	4
Kalimantan Selatan	2	-	4
Kalimantan Timur	6	-	2
Kalimantan Utara	-	-	1
Sulawesi Utara	10	1	4
Sulawesi Tengah	3	2	8
Sulawesi Selatan	18	1	5
Sulawesi Tenggara	3	-	1
Gorontalo	3	-	1
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	8	2	1
Maluku Utara	7	2	13
Papua Barat	1	4	3
Papua	9	32	13
INDONESIA	327	70	160

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Lampiran 38 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	43	39	4	8
Sumatera Utara	95	64	3	9
Sumatera Barat	27	14	1	–
Riau	17	18	3	3
Jambi	7	22	–	2
Sumatera Selatan	16	11	2	–
Bengkulu	8	8	–	1
Lampung	21	16	1	1
Kep. Bangka Belitung	1	–	–	–
Kepulauan Riau	1	1	1	–
DKI Jakarta	32	18	–	–
Jawa Barat	122	60	4	8
Jawa Tengah	107	99	1	2
DI Yogyakarta	5	1	–	–
Jawa Timur	82	58	7	3
Banten	25	20	1	2
Bali	5	–	–	–
Nusa Tenggara Barat	36	48	3	2
Nusa Tenggara Timur	123	78	3	4
Kalimantan Barat	16	9	–	1
Kalimantan Tengah	8	4	–	–
Kalimantan Selatan	9	12	3	2
Kalimantan Timur	7	3	–	–
Kalimantan Utara	2	1	–	–
Sulawesi Utara	65	50	4	6
Sulawesi Tengah	46	50	–	–
Sulawesi Selatan	71	39	2	1
Sulawesi Tenggara	34	46	1	–
Gorontalo	4	11	1	1
Sulawesi Barat	13	2	1	–
Maluku	117	80	10	13
Maluku Utara	71	85	6	11
Papua Barat	85	28	8	8
Papua	353	83	21	44
INDONESIA	1.674	1.078	91	132

Sumber: Diolah dari Podes 2018

Lanjutan Lampiran 38

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	10	2	6
Sumatera Utara	25	–	12
Sumatera Barat	41	1	5
Riau	18	–	2
Jambi	11	1	4
Sumatera Selatan	9	–	4
Bengkulu	10	–	2
Lampung	6	–	4
Kep. Bangka Belitung	1	1	–
Kepulauan Riau	1	–	–
DKI Jakarta	18	–	–
Jawa Barat	118	5	21
Jawa Tengah	36	–	15
DI Yogyakarta	5	1	2
Jawa Timur	18	3	28
Banten	14	1	4
Bali	–	–	–
Nusa Tenggara Barat	12	–	–
Nusa Tenggara Timur	37	5	10
Kalimantan Barat	3	–	3
Kalimantan Tengah	1	–	–
Kalimantan Selatan	1	–	1
Kalimantan Timur	6	–	2
Kalimantan Utara	–	–	2
Sulawesi Utara	9	–	5
Sulawesi Tengah	13	–	2
Sulawesi Selatan	33	2	4
Sulawesi Tenggara	15	–	4
Gorontalo	3	–	–
Sulawesi Barat	2	–	–
Maluku	29	1	3
Maluku Utara	26	1	2
Papua Barat	8	12	4
Papua	9	76	20
INDONESIA	548	112	171

Sumber: Diolah dari Podes 2018

Lampiran 39 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2021

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	12	18	–	1
Sumatera Utara	38	17	2	3
Sumatera Barat	14	13	–	3
Riau	9	3	–	–
Jambi	5	14	–	–
Sumatera Selatan	9	5	1	2
Bengkulu	3	1	1	–
Lampung	5	1	1	1
Kep. Bangka Belitung	4	–	1	1
Kepulauan Riau ¹				
DKI Jakarta	24	7	1	1
Jawa Barat	83	45	2	1
Jawa Tengah	50	29	1	–
DI Yogyakarta	6	2	–	–
Jawa Timur	49	34	3	2
Banten	6	9	–	–
Bali	1	2	–	–
Nusa Tenggara Barat	9	14	–	2
Nusa Tenggara Timur	78	38	4	4
Kalimantan Barat	5	1	–	–
Kalimantan Tengah	14	1	1	–
Kalimantan Selatan	8	5	–	–
Kalimantan Timur	8	4	–	–
Kalimantan Utara	2	1	–	1
Sulawesi Utara	24	31	–	–
Sulawesi Tengah	17	16	1	–
Sulawesi Selatan	39	36	1	3
Sulawesi Tenggara	24	19	–	1
Gorontalo	7	6	–	2
Sulawesi Barat	1	–	–	–
Maluku	87	77	6	16
Maluku Utara	54	40	1	5
Papua Barat	56	23	6	6
Papua	94	30	12	22
INDONESIA	845	542	45	77

Catatan : ¹Tidak terjadi perkelahian massal di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021

Sumber : Diolah dari Podes 2021

Lanjutan Lampiran 39

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
Aceh	7	–	2
Sumatera Utara	15	–	17
Sumatera Barat	7	–	4
Riau	–	1	2
Jambi	5	–	–
Sumatera Selatan	5	–	1
Bengkulu	3	–	1
Lampung	1	–	1
Kep. Bangka Belitung	–	–	–
Kepulauan Riau ¹			
DKI Jakarta	13	–	5
Jawa Barat	37	1	19
Jawa Tengah	10	–	10
DI Yogyakarta	1	–	–
Jawa Timur	11	1	18
Banten	–	–	–
Bali	–	–	–
Nusa Tenggara Barat	4	–	1
Nusa Tenggara Timur	14	5	8
Kalimantan Barat	1	–	1
Kalimantan Tengah	–	–	1
Kalimantan Selatan	2	–	–
Kalimantan Timur	3	1	2
Kalimantan Utara	–	–	–
Sulawesi Utara	3	–	2
Sulawesi Tengah	5	–	4
Sulawesi Selatan	7	–	1
Sulawesi Tenggara	2	1	–
Gorontalo	–	–	–
Sulawesi Barat	–	–	1
Maluku	15	2	3
Maluku Utara	11	–	2
Papua Barat	3	5	4
Papua	3	17	10
INDONESIA	188	34	120

Catatan : ¹ Tidak terjadi perkelahian massal di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021

Sumber : Diolah dari Podes 2021

Lampiran 40 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	0,40	0,37	0,02	0,03
Sumatera Utara	0,95	0,70	0,16	0,11
Sumatera Barat	2,53	0,87	0,44	-
Riau	0,76	0,71	0,16	0,05
Jambi	0,52	1,42	-	0,06
Sumatera Selatan	1,05	0,71	0,28	0,12
Bengkulu	0,46	0,52	-	-
Lampung	0,42	0,76	0,04	0,04
Kep. Bangka Belitung	3,15	2,89	-	0,26
Kepulauan Riau	0,48	-	-	-
DKI Jakarta	12,73	2,62	-	-
Jawa Barat	1,73	1,53	0,07	0,07
Jawa Tengah	1,40	1,40	0,05	0,06
DI Yogyakarta	1,14	0,91	-	-
Jawa Timur	0,73	0,60	0,04	0,02
Banten	0,90	0,77	0,06	-
Bali	0,42	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	2,89	3,68	0,35	0,18
Nusa Tenggara Timur	2,75	1,96	0,03	0,37
Kalimantan Barat	1,38	0,38	0,14	-
Kalimantan Tengah	1,72	0,06	0,06	-
Kalimantan Selatan	0,45	0,55	-	0,05
Kalimantan Timur	1,17	0,10	0,10	0,19
Kalimantan Utara	0,63	0,63	-	-
Sulawesi Utara	4,52	5,39	0,44	0,22
Sulawesi Tengah	2,72	5,14	0,10	0,05
Sulawesi Selatan	2,34	2,24	0,17	-
Sulawesi Tenggara	1,50	1,94	0,22	0,13
Gorontalo	1,90	0,95	0,27	0,54
Sulawesi Barat	0,93	1,23	-	-
Maluku	9,10	6,25	0,46	0,64
Maluku Utara	10,45	6,35	0,42	0,42
Papua Barat	2,30	1,47	0,38	0,13
Papua	2,81	0,90	0,39	0,57
INDONESIA	1,71	1,37	0,13	0,12

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Lanjutan Lampiran 40

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	0,11	0,03	0,06
Sumatera Utara	0,13	0,03	0,18
Sumatera Barat	0,61	0,09	0,17
Riau	0,05	0,11	0,44
Jambi	0,64	0,06	0,13
Sumatera Selatan	0,22	-	0,12
Bengkulu	0,72	0,07	0,13
Lampung	0,04	0,08	0,11
Kep. Bangka Belitung	0,52	0,26	0,26
Kepulauan Riau	0,24	0,24	-
DKI Jakarta	17,60	-	0,75
Jawa Barat	1,49	0,05	0,32
Jawa Tengah	0,13	-	0,12
DI Yogyakarta	0,46	0,23	1,14
Jawa Timur	0,14	-	0,11
Banten	0,77	-	0,13
Bali	-	-	0,42
Nusa Tenggara Barat	0,79	0,26	0,26
Nusa Tenggara Timur	0,31	0,18	0,24
Kalimantan Barat	0,19	-	0,09
Kalimantan Tengah	0,38	-	0,25
Kalimantan Selatan	0,10	-	0,20
Kalimantan Timur	0,58	-	0,19
Kalimantan Utara	-	-	0,21
Sulawesi Utara	0,54	0,05	0,22
Sulawesi Tengah	0,15	0,10	0,40
Sulawesi Selatan	0,59	0,03	0,17
Sulawesi Tenggara	0,13	-	0,04
Gorontalo	0,41	-	0,14
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	0,74	0,18	0,09
Maluku Utara	0,59	0,17	1,09
Papua Barat	0,06	0,26	0,19
Papua	0,18	0,66	0,27
INDONESIA	0,40	0,09	0,19

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Lampiran 41 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	0,66	0,60	0,06	0,12
Sumatera Utara	1,55	1,04	0,05	0,15
Sumatera Barat	2,12	1,10	0,08	-
Riau	0,91	0,96	0,16	0,16
Jambi	0,45	1,41	-	0,13
Sumatera Selatan	0,49	0,34	0,06	-
Bengkulu	0,53	0,53	-	0,07
Lampung	0,79	0,60	0,04	0,04
Kep. Bangka Belitung	0,26	-	-	-
Kepulauan Riau	0,24	0,24	0,24	-
DKI Jakarta	11,99	6,74	-	-
Jawa Barat	2,05	1,01	0,07	0,13
Jawa Tengah	1,25	1,16	0,01	0,02
DI Yogyakarta	1,14	0,23	-	-
Jawa Timur	0,97	0,68	0,08	0,04
Banten	1,61	1,29	0,06	0,13
Bali	0,70	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	3,15	4,20	0,26	0,17
Nusa Tenggara Timur	3,67	2,33	0,09	0,12
Kalimantan Barat	0,75	0,42	-	0,05
Kalimantan Tengah	0,51	0,25	-	-
Kalimantan Selatan	0,45	0,60	0,15	0,10
Kalimantan Timur	0,67	0,29	-	-
Kalimantan Utara	0,41	0,21	-	-
Sulawesi Utara	3,54	2,72	0,22	0,33
Sulawesi Tengah	2,28	2,48	-	-
Sulawesi Selatan	2,33	1,28	0,07	0,03
Sulawesi Tenggara	1,44	1,95	0,04	-
Gorontalo	0,54	1,50	0,14	0,14
Sulawesi Barat	2,00	0,31	0,15	-
Maluku	9,44	6,45	0,81	1,05
Maluku Utara	5,94	7,11	0,50	0,92
Papua Barat	4,28	1,41	0,40	0,40
Papua	6,36	1,49	0,38	0,79
INDONESIA	1,99	1,28	0,11	0,16

Sumber: Diolah dari Podes 2018

Lanjutan Lampiran 41

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	0,15	0,03	0,09
Sumatera Utara	0,41	–	0,20
Sumatera Barat	3,22	0,08	0,39
Riau	0,96	–	0,11
Jambi	0,70	0,06	0,26
Sumatera Selatan	0,28	–	0,12
Bengkulu	0,66	–	0,13
Lampung	0,23	–	0,15
Kep. Bangka Belitung	0,26	0,26	–
Kepulauan Riau	0,24	–	–
DKI Jakarta	6,74	–	–
Jawa Barat	1,98	0,08	0,35
Jawa Tengah	0,42	–	0,18
DI Yogyakarta	1,14	0,23	0,46
Jawa Timur	0,21	0,04	0,33
Banten	0,90	0,06	0,26
Bali	–	–	–
Nusa Tenggara Barat	1,05	–	–
Nusa Tenggara Timur	1,10	0,15	0,30
Kalimantan Barat	0,14	–	0,14
Kalimantan Tengah	0,06	–	–
Kalimantan Selatan	0,05	–	0,05
Kalimantan Timur	0,58	–	0,19
Kalimantan Utara	–	–	0,41
Sulawesi Utara	0,49	–	0,27
Sulawesi Tengah	0,64	–	0,10
Sulawesi Selatan	1,08	0,07	0,13
Sulawesi Tenggara	0,64	–	0,17
Gorontalo	0,41	–	–
Sulawesi Barat	0,31	–	–
Maluku	2,34	0,08	0,24
Maluku Utara	2,17	0,08	0,17
Papua Barat	0,40	0,60	0,20
Papua	0,16	1,37	0,36
INDONESIA	0,65	0,13	0,20

Sumber: Diolah dari Podes 2018

Lampiran 42 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2021

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	0,18	0,28	–	0,02
Sumatera Utara	0,62	0,28	0,03	0,05
Sumatera Barat	1,09	1,01	–	0,23
Riau	0,48	0,16	–	–
Jambi	0,32	0,90	–	–
Sumatera Selatan	0,27	0,15	0,03	0,06
Bengkulu	0,20	0,07	0,07	–
Lampung	0,19	0,04	0,04	0,04
Kep. Bangka Belitung	1,02	–	0,25	0,25
Kepulauan Riau ¹				
DKI Jakarta	8,99	2,62	0,37	0,37
Jawa Barat	1,39	0,76	0,03	0,02
Jawa Tengah	0,58	0,34	0,01	–
DI Yogyakarta	1,37	0,46	–	–
Jawa Timur	0,58	0,40	0,04	0,02
Banten	0,39	0,58	–	–
Bali	0,14	0,28	–	–
Nusa Tenggara Barat	0,78	1,22	–	0,17
Nusa Tenggara Timur	2,26	1,10	0,12	0,12
Kalimantan Barat	0,23	0,05	–	–
Kalimantan Tengah	0,89	0,06	0,06	–
Kalimantan Selatan	0,40	0,25	–	–
Kalimantan Timur	0,76	0,38	–	–
Kalimantan Utara	0,41	0,21	–	0,21
Sulawesi Utara	1,30	1,68	–	–
Sulawesi Tengah	0,84	0,79	0,05	–
Sulawesi Selatan	1,28	1,18	0,03	0,10
Sulawesi Tenggara	1,04	0,82	–	0,04
Gorontalo	0,95	0,82	–	0,27
Sulawesi Barat	0,15	–	–	–
Maluku	6,97	6,17	0,48	1,28
Maluku Utara	4,49	3,33	0,08	0,42
Papua Barat	2,82	1,16	0,30	0,30
Papua	1,69	0,54	0,22	0,40
INDONESIA	1,00	0,64	0,05	0,09

Catatan : ¹Tidak terjadi perkelahian massal di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021

Sumber : Diolah dari Podes 2021

Lanjutan Lampiran 42

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	0,11	–	0,03
Sumatera Utara	0,24	–	0,28
Sumatera Barat	0,54	–	0,31
Riau	–	0,05	0,11
Jambi	0,32	–	–
Sumatera Selatan	0,15	–	0,03
Bengkulu	0,20	–	0,07
Lampung	0,04	–	0,04
Kep. Bangka Belitung	–	–	–
Kepulauan Riau ¹			
DKI Jakarta	4,87	–	1,87
Jawa Barat	0,62	0,02	0,32
Jawa Tengah	0,12	–	0,12
DI Yogyakarta	0,23	–	–
Jawa Timur	0,13	0,01	0,21
Banten	–	–	–
Bali	–	–	–
Nusa Tenggara Barat	0,35	–	0,09
Nusa Tenggara Timur	0,41	0,14	0,23
Kalimantan Barat	0,05	–	0,05
Kalimantan Tengah	–	–	0,06
Kalimantan Selatan	0,10	–	–
Kalimantan Timur	0,29	0,10	0,19
Kalimantan Utara	–	–	–
Sulawesi Utara	0,16	–	0,11
Sulawesi Tengah	0,25	–	0,20
Sulawesi Selatan	0,23	–	0,03
Sulawesi Tenggara	0,09	0,04	–
Gorontalo	–	–	–
Sulawesi Barat	–	–	0,15
Maluku	1,20	0,16	0,24
Maluku Utara	0,91	–	0,17
Papua Barat	0,15	0,25	0,20
Papua	0,05	0,31	0,18
INDONESIA	0.22	0.04	0.14

Catatan : ¹ Tidak terjadi perkelahian massal di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021

Sumber : Diolah dari Podes 2021

Lampiran 43 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal dan Mampu Menyelesaikannya Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	2014		2018		2021	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	54	88,52	70	77,78	33	97,06
Sumatera Utara	103	87,29	170	96,59	82	97,62
Sumatera Barat	44	97,78	72	90,00	34	94,44
Riau	32	84,21	44	86,27	13	100,00
Jambi	39	97,50	38	92,68	23	95,83
Sumatera Selatan	62	92,54	33	89,19	19	95,00
Bengkulu	24	88,89	28	100,00	9	100,00
Lampung	30	88,24	41	93,18	6	100,00
Kep. Bangka Belitung	24	100,00	3	100,00	5	100,00
Kepulauan Riau ¹	2	66,67	4	100,00		
DKI Jakarta	69	95,83	52	94,55	45	95,74
Jawa Barat	246	94,98	280	96,22	146	92,41
Jawa Tengah	237	94,05	226	96,58	94	98,95
DI Yogyakarta	12	100,00	14	100,00	8	88,89
Jawa Timur	121	91,67	179	96,76	101	97,12
Banten	36	90,00	56	96,55	15	100,00
Bali	5	83,33	4	80,00	3	100,00
Nusa Tenggara Barat	73	96,05	78	96,30	22	100,00
Nusa Tenggara Timur	143	82,18	184	89,76	117	90,70
Kalimantan Barat	38	97,44	28	93,33	8	100,00
Kalimantan Tengah	33	91,67	14	100,00	16	94,12
Kalimantan Selatan	24	92,31	18	85,71	13	100,00
Kalimantan Timur	15	75,00	18	105,88	14	93,33
Kalimantan Utara	6	100,00	4	80,00	4	100,00
Sulawesi Utara	151	91,52	106	95,50	45	91,84
Sulawesi Tengah	142	95,30	96	97,96	36	100,00
Sulawesi Selatan	140	96,55	118	90,77	78	100,00
Sulawesi Tenggara	68	93,15	80	95,24	39	97,50
Gorontalo	19	79,17	18	100,00	10	100,00
Sulawesi Barat	10	71,43	14	93,33	1	100,00
Maluku	147	91,88	185	92,96	153	95,03
Maluku Utara	178	95,70	157	95,73	89	95,70
Papua Barat	56	94,92	106	92,98	72	96,00
Papua	181	91,88	426	95,30	130	92,86
INDONESIA	2.564	92,26	2.964	94,13	1.483	95,49

Catatan : ¹Tidak terjadi perkelahian massal di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021

Sumber : Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

DATA POTENSI DESA UPAYA MENJAGA KEAMANAN



Lampiran 44 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2014, 2018, dan 2021

Jenis Upaya yang Dilakukan untuk Menjaga Keamanan	2014		2018		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1, Membangun Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling)	41.611	50,63	46.752	55,70	45.600	54,22
2, Membentuk Regu Keamanan Lingkungan	35.629	43,35	39.585	47,16	40.043	47,62
3, Menambah Jumlah Anggota Hansip	19.299	23,48	20.869	24,86	13.374	15,90
4, Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan	48.357	58,84	52.240	62,24	58.728	69,83
5, Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga ¹	...	...	44.451	52,96	46.014	54,72

Catatan : ¹ Pengaktifan sistem keamanan lingkungan dari inisiatif warga baru tersedia pada Podes 2018 dan 2021

Sumber : Diolah dari Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 45 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2014

Provinsi	Jenis.Upaya.untuk.Menjaga.Keamanan			
	Membangun. Poskamling	Membentuk. Regu. Kamling	Menambah.. Anggota. Hansip	Pelaporan. Tamu. Menginap. (1x24.jam)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.c.e.h	2.819	1927	656	5.375
Sumatera.Utara	1.368	1.056	324	2.248
Sumatera.Barat	813	563	236	770
Riau	1.083	915	357	1.118
Jambi	1.010	750	328	1.002
Sumatera.Selatan	1.902	1.636	738	2.044
Bengkulu	1.118	1.019	402	1.003
Lampung	2.032	1.933	1.118	1.982
Kep..Bangka.Belitung	210	157	113	272
Kepulauan.Riau	193	176	165	294
DKI.Jakarta	227	223	138	245
Jawa.Barat	4.976	4.610	2.445	5.029
Jawa.Tengah	5.098	4.595	2.269	6.218
DI.Yogyakarta	365	310	195	329
Jawa.Timur	5.171	4.469	2.890	6.268
Banten	1.181	906	497	1.044
Bali	374	445	97	499
Nusa.Tenggara.Barat	826	677	324	597
Nusa.Tenggara.Timur	772	858	622	746
Kalimantan.Barat	548	488	433	952
Kalimantan.Tengah	991	734	467	1.035
Kalimantan.Selatan	1.167	640	368	1.124
Kalimantan.Timur	758	664	351	796
Kalimantan.Utara	177	134	73	250
Sulawesi.Utara	1.090	1.166	611	1.517
Sulawesi.Tengah	1.105	1.129	612	1.296
Sulawesi.Selatan	1.941	1.256	792	1.322
Sulawesi.Tenggara	1.040	802	403	885
Gorontalo	253	401	254	483
Sulawesi.Barat	342	227	173	258
Maluku	183	200	188	470
Maluku.Utara	159	197	183	450
Papua.Barat	132	145	143	213
Papua	187	221	334	223
INDONESIA	41.611	35.629	19.299	48.357

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Lampiran 46 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2018

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan		
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	2.329	1.404	614
Sumatera Utara	1.903	1.396	594
Sumatera Barat	971	723	351
Riau	1.196	985	416
Jambi	1.112	749	426
Sumatera Selatan	2.243	2.003	917
Bengkulu	1.051	888	323
Lampung	2.198	2.071	863
Kep. Bangka Belitung	245	209	128
Kepulauan Riau	194	181	108
DKI Jakarta	190	199	125
Jawa Barat	5.409	4.709	2.375
Jawa Tengah	5.999	5.140	2.511
DI Yogyakarta	392	347	222
Jawa Timur	6.321	5.245	3.086
Banten	1.280	1.035	602
Bali	395	380	123
Nusa Tenggara Barat	916	724	400
Nusa Tenggara Timur	1.085	1.244	867
Kalimantan Barat	963	838	521
Kalimantan Tengah	1.042	911	464
Kalimantan Selatan	1.243	799	425
Kalimantan Timur	744	594	267
Kalimantan Utara	241	177	101
Sulawesi Utara	1.167	1.136	429
Sulawesi Tengah	1.168	1.155	518
Sulawesi Selatan	1.896	1.325	825
Sulawesi Tenggara	1.055	901	522
Gorontalo	254	281	255
Sulawesi Barat	358	230	168
Maluku	252	316	226
Maluku Utara	248	348	317
Papua Barat	251	295	185
Papua	441	647	595
INDONESIA	46.752	39.585	20.869

Sumber: Diolah dari Podes 2018

Lanjutan Lampiran 46

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan	
	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga
(1)	(5)	(6)
A c e h	5.083	2.356
Sumatera Utara	2.516	1.987
Sumatera Barat	962	866
Riau	1.292	1.071
Jambi	1.029	887
Sumatera Selatan	2.201	1.994
Bengkulu	1.089	829
Lampung	2.114	1.974
Kep. Bangka Belitung	304	191
Kepulauan Riau	309	205
DKI Jakarta	242	226
Jawa Barat	5.134	4.970
Jawa Tengah	6.437	6.337
DI Yogyakarta	376	388
Jawa Timur	6.614	5.824
Banten	1.258	1.197
Bali	556	426
Nusa Tenggara Barat	634	799
Nusa Tenggara Timur	979	1.440
Kalimantan Barat	1.208	854
Kalimantan Tengah	1.028	735
Kalimantan Selatan	1.240	979
Kalimantan Timur	742	579
Kalimantan Utara	286	212
Sulawesi Utara	1.636	1.230
Sulawesi Tengah	1.347	974
Sulawesi Selatan	1.623	1.606
Sulawesi Tenggara	947	947
Gorontalo	500	213
Sulawesi Barat	314	290
Maluku	647	415
Maluku Utara	723	395
Papua Barat	239	334
Papua	631	721
INDONESIA	52.240	44.451

Sumber: Diolah dari Podes 2018

Lampiran 47 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2021

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan		
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	1.921	1.061	281
Sumatera Utara	2.006	1.424	425
Sumatera Barat	822	621	167
Riau	1.055	918	244
Jambi	962	795	239
Sumatera Selatan	2.229	2.039	490
Bengkulu	681	731	184
Lampung	1.959	1.951	393
Kep. Bangka Belitung	186	21	49
Kepulauan Riau	179	184	103
DKI Jakarta	205	211	90
Jawa Barat	5.218	4.750	1.623
Jawa Tengah	6.447	5.960	2.063
DI Yogyakarta	375	355	161
Jawa Timur	6.588	5.759	2.266
Banten	1.246	1.049	318
Bali	383	401	120
Nusa Tenggara Barat	823	761	321
Nusa Tenggara Timur	1.137	1.326	383
Kalimantan Barat	1.318	1.087	403
Kalimantan Tengah	983	839	258
Kalimantan Selatan	1.015	656	181
Kalimantan Timur	770	630	218
Kalimantan Utara	249	190	49
Sulawesi Utara	1.254	1.193	401
Sulawesi Tengah	1.151	1.051	270
Sulawesi Selatan	1.571	1.094	362
Sulawesi Tenggara	912	691	221
Gorontalo	248	277	100
Sulawesi Barat	329	236	94
Maluku	407	494	297
Maluku Utara	256	312	183
Papua Barat	258	281	104
Papua	457	495	313
INDONESIA	45.600	40.043	13.374

Sumber: Diolah dari Podes 2021

Lanjutan Lampiran 47

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan	
	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga
(1)	(5)	(6)
A c e h	5.692	2.237
Sumatera Utara	3.356	1.951
Sumatera Barat	908	852
Riau	1.477	1.141
Jambi	1.196	965
Sumatera Selatan	2.659	2.177
Bengkulu	1.107	627
Lampung	2.378	2.030
Kep. Bangka Belitung	329	154
Kepulauan Riau	330	205
DKI Jakarta	250	253
Jawa Barat	5.557	5.239
Jawa Tengah	7.333	7.087
DI Yogyakarta	405	418
Jawa Timur	7.186	6.703
Banten	1.357	1.355
Bali	627	436
Nusa Tenggara Barat	694	846
Nusa Tenggara Timur	1.220	1.314
Kalimantan Barat	1.473	1.005
Kalimantan Tengah	1.156	720
Kalimantan Selatan	1.347	912
Kalimantan Timur	851	626
Kalimantan Utara	339	243
Sulawesi Utara	1.680	1.209
Sulawesi Tengah	1.487	878
Sulawesi Selatan	1.882	1.478
Sulawesi Tenggara	1.058	776
Gorontalo	592	268
Sulawesi Barat	359	255
Maluku	764	485
Maluku Utara	762	346
Papua Barat	379	328
Papua	538	495
INDONESIA	58.728	46.014

Sumber: Diolah dari Podes 2021

Lampiran 48 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2014

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan			
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	43,29	29,59	10,07	82,54
Sumatera Utara	22,41	17,30	5,31	36,83
Sumatera Barat	71,00	49,17	20,61	67,25
Riau	59,02	49,86	19,46	60,93
Jambi	65,12	48,36	21,15	64,60
Sumatera Selatan	58,76	50,54	22,80	63,14
Bengkulu	72,98	66,51	26,24	65,47
Lampung	77,20	73,44	42,48	75,30
Kep. Bangka Belitung	55,12	41,21	29,66	71,39
Kepulauan Riau	46,51	42,41	39,76	70,84
DKI Jakarta	85,02	83,52	51,69	91,76
Jawa Barat	83,46	77,32	41,01	84,35
Jawa Tengah	59,43	53,57	26,45	72,49
DI Yogyakarta	83,33	70,78	44,52	75,11
Jawa Timur	60,82	52,56	33,99	73,72
Banten	76,14	58,41	32,04	67,31
Bali	52,23	62,15	13,55	69,69
Nusa Tenggara Barat	72,39	59,33	28,40	52,32
Nusa Tenggara Timur	23,61	26,24	19,02	22,81
Kalimantan Barat	25,98	23,14	20,53	45,14
Kalimantan Tengah	63,16	46,78	29,76	65,97
Kalimantan Selatan	58,12	31,87	18,33	55,98
Kalimantan Timur	73,88	64,72	34,21	77,58
Kalimantan Utara	36,95	27,97	15,24	52,19
Sulawesi Utara	59,37	63,51	33,28	82,63
Sulawesi Tengah	55,64	56,85	30,82	65,26
Sulawesi Selatan	64,06	41,45	26,14	43,63
Sulawesi Tenggara	45,77	35,30	17,74	38,95
Gorontalo	34,38	54,48	34,51	65,63
Sulawesi Barat	52,78	35,03	26,70	39,81
Maluku	16,82	18,38	17,28	43,20
Maluku Utara	13,29	16,47	15,30	37,63
Papua Barat	8,42	9,25	9,13	13,59
Papua	3,84	4,54	6,86	4,58
INDONESIA	50,63	43,35	23,48	58,84

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Lampiran 49 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2018

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan		
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	35,79	21,57	9,43
Sumatera Utara	31,03	22,77	9,69
Sumatera Barat	76,16	56,71	27,53
Riau	63,79	52,53	22,19
Jambi	71,19	47,95	27,27
Sumatera Selatan	68,76	61,40	28,11
Bengkulu	69,42	58,65	21,33
Lampung	82,82	78,03	32,52
Kep. Bangka Belitung	62,66	53,45	32,74
Kepulauan Riau	46,63	43,51	25,96
DKI Jakarta	71,16	74,53	46,82
Jawa Barat	90,80	79,05	39,87
Jawa Tengah	70,09	60,05	29,34
DI Yogyakarta	89,50	79,22	50,68
Jawa Timur	74,40	61,73	36,32
Banten	82,47	66,69	38,79
Bali	55,17	53,07	17,18
Nusa Tenggara Barat	80,14	63,34	35,00
Nusa Tenggara Timur	32,36	37,10	25,86
Kalimantan Barat	45,06	39,21	24,38
Kalimantan Tengah	66,12	57,80	29,44
Kalimantan Selatan	61,90	39,79	21,17
Kalimantan Timur	71,68	57,23	25,72
Kalimantan Utara	50,00	36,72	20,95
Sulawesi Utara	63,49	61,81	23,34
Sulawesi Tengah	57,82	57,18	25,64
Sulawesi Selatan	62,18	43,46	27,06
Sulawesi Tenggara	44,82	38,28	22,18
Gorontalo	34,60	38,28	34,74
Sulawesi Barat	55,08	35,38	25,85
Maluku	20,32	25,48	18,23
Maluku Utara	20,74	29,10	26,51
Papua Barat	12,63	14,85	9,31
Papua	7,94	11,65	10,72
INDONESIA	55,70	47,16	24,86

Sumber: Diolah dari Podes 2018

Lanjutan Lampiran 49

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan	
	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga
(1)	(5)	(6)
Aceh	78,10	36,20
Sumatera Utara	41,03	32,40
Sumatera Barat	75,45	67,92
Riau	68,91	57,12
Jambi	65,88	56,79
Sumatera Selatan	67,47	61,13
Bengkulu	71,93	54,76
Lampung	79,65	74,38
Kep. Bangka Belitung	77,75	48,85
Kepulauan Riau	74,28	49,28
DKI Jakarta	90,64	84,64
Jawa Barat	86,18	83,43
Jawa Tengah	75,21	74,04
DI Yogyakarta	85,84	88,58
Jawa Timur	77,85	68,55
Banten	81,06	77,13
Bali	77,65	59,50
Nusa Tenggara Barat	55,47	69,90
Nusa Tenggara Timur	29,20	42,95
Kalimantan Barat	56,53	39,96
Kalimantan Tengah	65,23	46,64
Kalimantan Selatan	61,75	48,75
Kalimantan Timur	71,48	55,78
Kalimantan Utara	59,34	43,98
Sulawesi Utara	89,01	66,92
Sulawesi Tengah	66,68	48,22
Sulawesi Selatan	53,23	52,67
Sulawesi Tenggara	40,23	40,23
Gorontalo	68,12	29,02
Sulawesi Barat	48,31	44,62
Maluku	52,18	33,47
Maluku Utara	60,45	33,03
Papua Barat	12,03	16,81
Papua	11,37	12,99
INDONESIA	62,24	52,96

Sumber: Diolah dari Podes 2018

Lampiran 50 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2021

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan		
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	29,49	16,29	4,31
Sumatera Utara	32,71	23,22	6,93
Sumatera Barat	63,87	48,25	12,98
Riau	56,24	48,93	13,01
Jambi	61,59	50,90	15,30
Sumatera Selatan	67,71	61,94	14,88
Bengkulu	44,98	48,28	12,15
Lampung	73,81	73,51	14,81
Kep. Bangka Belitung	47,33	56,23	12,47
Kepulauan Riau	41,82	42,99	24,07
DKI Jakarta	76,78	79,03	33,71
Jawa Barat	87,59	79,74	27,25
Jawa Tengah	75,30	69,61	24,09
DI Yogyakarta	85,62	81,05	36,76
Jawa Timur	77,54	67,78	26,67
Banten	80,28	67,59	20,49
Bali	53,49	56,01	16,76
Nusa Tenggara Barat	71,50	66,12	27,89
Nusa Tenggara Timur	32,96	38,43	11,10
Kalimantan Barat	61,36	50,61	18,76
Kalimantan Tengah	62,37	53,24	16,37
Kalimantan Selatan	50,57	32,69	9,02
Kalimantan Timur	73,61	60,23	20,84
Kalimantan Utara	51,66	39,42	10,17
Sulawesi Utara	68,15	64,84	21,79
Sulawesi Tengah	56,98	52,03	13,37
Sulawesi Selatan	51,49	35,86	11,86
Sulawesi Tenggara	39,50	29,93	9,57
Gorontalo	33,79	37,74	13,62
Sulawesi Barat	50,62	36,31	14,46
Maluku	32,61	39,58	23,80
Maluku Utara	21,28	25,94	15,21
Papua Barat	12,99	14,15	5,24
Papua	8,23	8,91	5,63
INDONESIA	54,22	47,62	15,90

Sumber: Diolah dari Podes 2021

Lanjutan Lampiran 50

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan	
	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga
(1)	(5)	(6)
Aceh	87,38	34,34
Sumatera Utara	54,73	31,82
Sumatera Barat	70,55	66,20
Riau	78,73	60,82
Jambi	76,57	61,78
Sumatera Selatan	80,77	66,13
Bengkulu	73,12	41,41
Lampung	89,60	76,49
Kep. Bangka Belitung	83,72	39,19
Kepulauan Riau	77,10	47,90
DKI Jakarta	93,63	94,76
Jawa Barat	93,29	87,95
Jawa Tengah	85,65	82,77
DI Yogyakarta	92,47	95,43
Jawa Timur	84,58	78,90
Banten	87,44	87,31
Bali	87,57	60,89
Nusa Tenggara Barat	60,30	73,50
Nusa Tenggara Timur	35,36	38,09
Kalimantan Barat	68,58	46,79
Kalimantan Tengah	73,35	45,69
Kalimantan Selatan	67,12	45,44
Kalimantan Timur	81,36	59,85
Kalimantan Utara	70,33	50,41
Sulawesi Utara	91,30	65,71
Sulawesi Tengah	73,61	43,47
Sulawesi Selatan	61,68	48,44
Sulawesi Tenggara	45,82	33,61
Gorontalo	80,65	36,51
Sulawesi Barat	55,23	39,23
Maluku	61,22	38,86
Maluku Utara	63,34	28,76
Papua Barat	19,08	16,52
Papua	9,68	8,91
INDONESIA	69,83	54,72

Sumber: Diolah dari Podes 2021

Lampiran 51 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membangun Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2014	2018	2021	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	2.819	2.329	1.921	43,29	35,79	29,49
Sumatera Utara	1.368	1.903	2.006	22,41	31,03	32,71
Sumatera Barat	813	971	822	71,00	76,16	63,87
Riau	1.083	1.196	1.055	59,02	63,79	56,24
Jambi	1.010	1.112	962	65,12	71,19	61,59
Sumatera Selatan	1.902	2.243	2.229	58,76	68,76	67,71
Bengkulu	1.118	1.051	681	72,98	69,42	44,98
Lampung	2.032	2.198	1.959	77,20	82,82	73,81
Kep. Bangka Belitung	210	245	186	55,12	62,66	47,33
Kepulauan Riau	193	194	179	46,51	46,63	41,82
DKI Jakarta	227	190	205	85,02	71,16	76,78
Jawa Barat	4.976	5.409	5.218	83,46	90,80	87,59
Jawa Tengah	5.098	5.999	6.447	59,43	70,09	75,30
DI Yogyakarta	365	392	375	83,33	89,50	85,62
Jawa Timur	5.171	6.321	6.588	60,82	74,40	77,54
Banten	1.181	1.280	1.246	76,14	82,47	80,28
Bali	374	395	383	52,23	55,17	53,49
Nusa Tenggara Barat	826	916	823	72,39	80,14	71,50
Nusa Tenggara Timur	772	1.085	1.137	23,61	32,36	32,96
Kalimantan Barat	548	963	1.318	25,98	45,06	61,36
Kalimantan Tengah	991	1.042	983	63,16	66,12	62,37
Kalimantan Selatan	1.167	1.243	1.015	58,12	61,90	50,57
Kalimantan Timur	758	744	770	73,88	71,68	73,61
Kalimantan Utara	177	241	249	36,95	50,00	51,66
Sulawesi Utara	1.090	1.167	1.254	59,37	63,49	68,15
Sulawesi Tengah	1.105	1.168	1.151	55,64	57,82	56,98
Sulawesi Selatan	1.941	1.896	1.571	64,06	62,18	51,49
Sulawesi Tenggara	1.040	1.055	912	45,77	44,82	39,50
Gorontalo	253	254	248	34,38	34,60	33,79
Sulawesi Barat	342	358	329	52,78	55,08	50,62
Maluku	183	252	407	16,82	20,32	32,61
Maluku Utara	159	248	256	13,29	20,74	21,28
Papua Barat	132	251	258	8,42	12,63	12,99
Papua	187	441	457	3,84	7,94	8,23
INDONESIA	41.611	46.752	45.600	50,63	55,70	54,22

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 52 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membentuk Regu Keamanan Lingkungan Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2014	2018	2021	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	1.927	1.404	1.061	29,59	21,57	16,29
Sumatera Utara	1.056	1.396	1.424	17,30	22,77	23,22
Sumatera Barat	563	723	621	49,17	56,71	48,25
Riau	915	985	918	49,86	52,53	48,93
Jambi	750	749	795	48,36	47,95	50,90
Sumatera Selatan	1.636	2.003	2.039	50,54	61,40	61,94
Bengkulu	1.019	888	731	66,51	58,65	48,28
Lampung	1.933	2.071	1.951	73,44	78,03	73,51
Kep. Bangka Belitung	157	209	221	41,21	53,45	56,23
Kepulauan Riau	176	181	184	42,41	43,51	42,99
DKI Jakarta	223	199	211	83,52	74,53	79,03
Jawa Barat	4.610	4.709	4.750	77,32	79,05	79,74
Jawa Tengah	4.595	5.140	5.960	53,57	60,05	69,61
DI Yogyakarta	310	347	355	70,78	79,22	81,05
Jawa Timur	4.469	5.245	5.759	52,56	61,73	67,78
Banten	906	1.035	1.049	58,41	66,69	67,59
Bali	445	380	401	62,15	53,07	56,01
Nusa Tenggara Barat	677	724	761	59,33	63,34	66,12
Nusa Tenggara Timur	858	1.244	1.326	26,24	37,10	38,43
Kalimantan Barat	488	838	1.087	23,14	39,21	50,61
Kalimantan Tengah	734	911	839	46,78	57,80	53,24
Kalimantan Selatan	640	799	656	31,87	39,79	32,69
Kalimantan Timur	664	594	630	64,72	57,23	60,23
Kalimantan Utara	134	177	190	27,97	36,72	39,42
Sulawesi Utara	1.166	1.136	1.193	63,51	61,81	64,84
Sulawesi Tengah	1.129	1.155	1.051	56,85	57,18	52,03
Sulawesi Selatan	1.256	1.325	1.094	41,45	43,46	35,86
Sulawesi Tenggara	802	901	691	35,30	38,28	29,93
Gorontalo	401	281	277	54,48	38,28	37,74
Sulawesi Barat	227	230	236	35,03	35,38	36,31
Maluku	200	316	494	18,38	25,48	39,58
Maluku Utara	197	348	312	16,47	29,10	25,94
Papua Barat	145	295	281	9,25	14,85	14,15
Papua	221	647	495	4,54	11,65	8,91
INDONESIA	35.629	39.585	40.043	43,35	47,16	47,62

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 53 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Menambah Anggota Hansip/Linmas Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2014	2018	2021	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	656	614	281	10,07	9,43	4,31
Sumatera Utara	324	594	425	5,31	9,69	6,93
Sumatera Barat	236	351	167	20,61	27,53	12,98
Riau	357	416	244	19,46	22,19	13,01
Jambi	328	426	239	21,15	27,27	15,30
Sumatera Selatan	738	917	490	22,80	28,11	14,88
Bengkulu	402	323	184	26,24	21,33	12,15
Lampung	1.118	863	393	42,48	32,52	14,81
Kep. Bangka Belitung	113	128	49	29,66	32,74	12,47
Kepulauan Riau	165	108	103	39,76	25,96	24,07
DKI Jakarta	138	125	90	51,69	46,82	33,71
Jawa Barat	2.445	2.375	1.623	41,01	39,87	27,25
Jawa Tengah	2.269	2.511	2.063	26,45	29,34	24,09
DI Yogyakarta	195	222	161	44,52	50,68	36,76
Jawa Timur	2.890	3.086	2.266	33,99	36,32	26,67
Banten	497	602	318	32,04	38,79	20,49
Bali	97	123	120	13,55	17,18	16,76
Nusa Tenggara Barat	324	400	321	28,40	35,00	27,89
Nusa Tenggara Timur	622	867	383	19,02	25,86	11,10
Kalimantan Barat	433	521	403	20,53	24,38	18,76
Kalimantan Tengah	467	464	258	29,76	29,44	16,37
Kalimantan Selatan	368	425	181	18,33	21,17	9,02
Kalimantan Timur	351	267	218	34,21	25,72	20,84
Kalimantan Utara	73	101	49	15,24	20,95	10,17
Sulawesi Utara	611	429	401	33,28	23,34	21,79
Sulawesi Tengah	612	518	270	30,82	25,64	13,37
Sulawesi Selatan	792	825	362	26,14	27,06	11,86
Sulawesi Tenggara	403	522	221	17,74	22,18	9,57
Gorontalo	254	255	100	34,51	34,74	13,62
Sulawesi Barat	173	168	94	26,70	25,85	14,46
Maluku	188	226	297	17,28	18,23	23,80
Maluku Utara	183	317	183	15,30	26,51	15,21
Papua Barat	143	185	104	9,13	9,31	5,24
Papua	334	595	313	6,86	10,72	5,63
INDONESIA	19.299	20.869	13.374	23,48	24,86	15,90

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 54 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Memeriksa Setiap Warga Luar Desa yang Masuk (Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2014	2018	2021	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	5.375	5.083	5.692	82,54	78,10	87,38
Sumatera Utara	2.248	2.516	3.356	36,83	41,03	54,73
Sumatera Barat	770	962	908	67,25	75,45	70,55
Riau	1.118	1.292	1.477	60,93	68,91	78,73
Jambi	1.002	1.029	1.196	64,60	65,88	76,57
Sumatera Selatan	2.044	2.201	2.659	63,14	67,47	80,77
Bengkulu	1.003	1.089	1.107	65,47	71,93	73,12
Lampung	1.982	2.114	2.378	75,30	79,65	89,60
Kep. Bangka Belitung	272	304	329	71,39	77,75	83,72
Kepulauan Riau	294	309	330	70,84	74,28	77,10
DKI Jakarta	245	242	250	91,76	90,64	93,63
Jawa Barat	5.029	5.134	5.557	84,35	86,18	93,29
Jawa Tengah	6.218	6.437	7.333	72,49	75,21	85,65
DI Yogyakarta	329	376	405	75,11	85,84	92,47
Jawa Timur	6.268	6.614	7.186	73,72	77,85	84,58
Banten	1.044	1.258	1.357	67,31	81,06	87,44
Bali	499	556	627	69,69	77,65	87,57
Nusa Tenggara Barat	597	634	694	52,32	55,47	60,30
Nusa Tenggara Timur	746	979	1.220	22,81	29,20	35,36
Kalimantan Barat	952	1.208	1.473	45,14	56,53	68,58
Kalimantan Tengah	1.035	1.028	1.156	65,97	65,23	73,35
Kalimantan Selatan	1.124	1.240	1.347	55,98	61,75	67,12
Kalimantan Timur	796	742	851	77,58	71,48	81,36
Kalimantan Utara	250	286	339	52,19	59,34	70,33
Sulawesi Utara	1.517	1.636	1.680	82,63	89,01	91,30
Sulawesi Tengah	1.296	1.347	1.487	65,26	66,68	73,61
Sulawesi Selatan	1.322	1.623	1.882	43,63	53,23	61,68
Sulawesi Tenggara	885	947	1.058	38,95	40,23	45,82
Gorontalo	483	500	592	65,63	68,12	80,65
Sulawesi Barat	258	314	359	39,81	48,31	55,23
Maluku	470	647	764	43,20	52,18	61,22
Maluku Utara	450	723	762	37,63	60,45	63,34
Papua Barat	213	239	379	13,59	12,03	19,08
Papua	223	631	538	4,58	11,37	9,68
INDONESIA	48.357	52.240	58.728	58,84	62,24	69,83

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Lampiran 55 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel. yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	355	6.157	1.118	4.353	582	104
Sumatera Utara	432	5.672	786	3.485	1.114	287
Sumatera Barat	210	935	201	650	66	18
Riau	380	1.455	295	891	243	26
Jambi	202	1.349	287	894	145	23
Sumatera Selatan	313	2.924	393	2.162	329	40
Bengkulu	105	1.427	290	940	175	22
Lampung	269	2.363	386	1.649	282	46
Kep. Bangka Belitung	69	312	103	198	10	1
Kepulauan Riau	101	314	77	168	55	14
DKI Jakarta	182	85	42	43	-	-
Jawa Barat	813	5.149	1.163	3.583	365	38
Jawa Tengah	755	7.823	1.949	5.641	213	20
DI Yogyakarta	117	321	125	196	-	-
Jawa Timur	949	7.553	2.472	4.835	220	26
Banten	201	1.350	295	887	150	18
Bali	144	572	230	342	-	-
Nusa Tenggara Barat	156	985	294	596	72	23
Nusa Tenggara Timur	310	2.960	350	1.487	900	223
Kalimantan Barat	294	1.815	176	884	577	178
Kalimantan Tengah	187	1.382	115	692	457	118
Kalimantan Selatan	217	1.791	350	1.193	210	38
Kalimantan Timur	180	846	153	387	239	67
Kalimantan Utara	61	418	44	164	139	71
Sulawesi Utara	168	1.668	463	1.007	165	33
Sulawesi Tengah	277	1.709	350	975	275	109
Sulawesi Selatan	360	2.670	632	1.566	361	111
Sulawesi Tenggara	167	2.105	404	1.298	324	79
Gorontalo	59	677	226	365	68	18
Sulawesi Barat	59	589	94	266	163	66
Maluku	125	963	118	392	328	125
Maluku Utara	107	1.089	212	481	292	104
Papua Barat	108	1.459	127	416	648	268
Papua	280	4.591	247	966	1.602	1.776
INDONESIA	8.712	73.478	14.567	44.052	10.769	4.090

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Lampiran 56 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2018

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	353	6.155	940	4.769	399	47
Sumatera Utara	481	5.651	621	3.629	1.215	186
Sumatera Barat	226	1.049	259	729	53	8
Riau	550	1.325	232	888	190	15
Jambi	207	1.355	270	906	159	20
Sumatera Selatan	381	2.881	320	2.135	391	35
Bengkulu	130	1.384	299	918	151	16
Lampung	280	2.374	403	1.698	244	30
Kep. Bangka Belitung	91	300	112	183	5	-
Kepulauan Riau	113	303	49	182	63	9
DKI Jakarta	222	45	30	15	-	-
Jawa Barat	910	5.047	1.085	3.666	294	2
Jawa Tengah	930	7.629	1.994	5.511	120	4
DI Yogyakarta	114	324	105	219	-	-
Jawa Timur	1.127	7.369	2.250	4.941	168	10
Banten	209	1.343	258	939	135	11
Bali	140	576	236	340	-	-
Nusa Tenggara Barat	176	967	241	659	53	14
Nusa Tenggara Timur	327	3.026	250	1.734	949	93
Kalimantan Barat	283	1.854	189	906	600	159
Kalimantan Tengah	201	1.375	121	748	421	85
Kalimantan Selatan	235	1.773	388	1.206	145	34
Kalimantan Timur	203	835	134	432	253	16
Kalimantan Utara	66	416	47	155	124	90
Sulawesi Utara	174	1.664	445	1.082	126	11
Sulawesi Tengah	293	1.727	316	1.087	265	59
Sulawesi Selatan	381	2.668	660	1.628	319	61
Sulawesi Tenggara	205	2.149	391	1.406	315	37
Gorontalo	77	657	183	381	88	5
Sulawesi Barat	62	588	86	299	152	51
Maluku	135	1.105	115	493	350	147
Maluku Utara	121	1.075	161	549	298	67
Papua Barat	113	1.874	127	619	752	376
Papua	243	5.309	205	1.323	1.960	1.821
INDONESIA	9.759	74.172	13.521	46.375	10.757	3.519

Sumber: Diolah dari Podes 2018

Lampiran 57 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	337	6.177	1.204	4.657	274	42
Sumatera Utara	409	5.723	602	3.826	1.109	186
Sumatera Barat	215	1.072	320	690	55	7
Riau	517	1.359	211	939	186	23
Jambi	172	1.390	239	1.017	125	9
Sumatera Selatan	341	2.951	508	2.189	236	18
Bengkulu	123	1.391	302	983	93	13
Lampung	287	2.367	316	1.877	164	10
Kep. Bangka Belitung	82	311	152	151	7	1
Kepulauan Riau	110	318	58	175	69	16
DKI Jakarta	185	82	49	33	-	-
Jawa Barat	922	5.035	1.078	3.850	98	9
Jawa Tengah	801	7.761	1.905	5.814	38	4
DI Yogyakarta	134	304	64	239	1	-
Jawa Timur	1.052	7.444	2.549	4.785	102	8
Banten	195	1.357	222	1.028	101	6
Bali	156	560	317	243	-	-
Nusa Tenggara Barat	157	994	375	571	35	13
Nusa Tenggara Timur	304	3.146	446	1.824	824	52
Kalimantan Barat	268	1.880	147	958	649	126
Kalimantan Tengah	207	1.369	99	768	405	97
Kalimantan Selatan	251	1.756	529	1.076	128	23
Kalimantan Timur	193	853	135	460	230	28
Kalimantan Utara	67	415	60	167	131	57
Sulawesi Utara	167	1.673	422	1.142	102	7
Sulawesi Tengah	255	1.765	283	1.146	268	68
Sulawesi Selatan	343	2.708	453	1.930	279	46
Sulawesi Tenggara	177	2.132	461	1.421	227	23
Gorontalo	65	669	284	330	49	6
Sulawesi Barat	52	598	60	317	197	24
Maluku	126	1.122	107	558	355	102
Maluku Utara	108	1.095	186	544	309	56
Papua Barat	108	1.878	109	680	747	342
Papua	252	5.303	262	1.178	2.016	1.847
INDONESIA	9.138	7.4958	14.514	47.566	9.609	3.269

Sumber: Diolah dari Podes 2021

Lampiran 58 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	5,45	94,55	17,17	66,85	8,94	1,60
Sumatera Utara	7,08	92,92	12,88	57,09	18,25	4,70
Sumatera Barat	18,34	81,66	17,55	56,77	5,76	1,57
Riau	20,71	79,29	16,08	48,56	13,24	1,42
Jambi	13,02	86,98	18,50	57,64	9,35	1,48
Sumatera Selatan	9,67	90,33	12,14	66,79	10,16	1,24
Bengkulu	6,85	93,15	18,93	61,36	11,42	1,44
Lampung	10,22	89,78	14,67	62,65	10,71	1,75
Kep. Bangka Belitung	18,11	81,89	27,03	51,97	2,62	0,26
Kepulauan Riau	24,34	75,66	18,55	40,48	13,25	3,37
DKI Jakarta	68,16	31,84	15,73	16,10	–	–
Jawa Barat	13,64	86,36	19,51	60,10	6,12	0,64
Jawa Tengah	8,80	91,20	22,72	65,76	2,48	0,23
DI Yogyakarta	26,71	73,29	28,54	44,75	–	–
Jawa Timur	11,16	88,84	29,08	56,87	2,59	0,31
Banten	12,96	87,04	19,02	57,19	9,67	1,16
Bali	20,11	79,89	32,12	47,77	–	–
Nusa Tenggara Barat	13,67	86,33	25,77	52,23	6,31	2,02
Nusa Tenggara Timur	9,48	90,52	10,70	45,47	27,52	6,82
Kalimantan Barat	13,94	86,06	8,35	41,92	27,36	8,44
Kalimantan Tengah	11,92	88,08	7,33	44,10	29,13	7,52
Kalimantan Selatan	10,81	89,19	17,43	59,41	10,46	1,89
Kalimantan Timur	17,54	82,46	14,91	37,72	23,29	6,53
Kalimantan Utara	12,73	87,27	9,19	34,24	29,02	14,82
Sulawesi Utara	9,15	90,85	25,22	54,85	8,99	1,80
Sulawesi Tengah	13,95	86,05	17,62	49,09	13,85	5,49
Sulawesi Selatan	11,88	88,12	20,86	51,68	11,91	3,66
Sulawesi Tenggara	7,35	92,65	17,78	57,13	14,26	3,48
Gorontalo	8,02	91,98	30,71	49,59	9,24	2,45
Sulawesi Barat	9,10	90,90	14,51	41,05	25,15	10,19
Maluku	11,49	88,51	10,85	36,03	30,15	11,49
Maluku Utara	8,95	91,05	17,73	40,22	24,41	8,70
Papua Barat	6,89	93,11	8,10	26,55	41,35	17,10
Papua	5,75	94,25	5,07	19,83	32,89	36,46
INDONESIA	10,60	89,40	17,72	53,60	13,10	4,98

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Lampiran 59 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2018

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	5,42	94,58	15,27	77,48	6,48	0,76
Sumatera Utara	7,84	92,16	10,99	64,22	21,50	3,29
Sumatera Barat	17,73	82,27	24,69	69,49	5,05	0,76
Riau	29,33	70,67	17,51	67,02	14,34	1,13
Jambi	13,25	86,75	19,93	66,86	11,73	1,48
Sumatera Selatan	11,68	88,32	11,11	74,11	13,57	1,21
Bengkulu	8,59	91,41	21,60	66,33	10,91	1,16
Lampung	10,55	89,45	16,93	71,52	10,28	1,26
Kep. Bangka Belitung	23,27	76,73	37,33	61,00	1,67	-
Kepulauan Riau	27,16	72,84	16,17	60,07	20,79	2,97
DKI Jakarta	83,15	16,85	66,67	33,33	-	-
Jawa Barat	15,28	84,72	21,50	72,64	5,83	0,04
Jawa Tengah	10,87	89,13	26,14	72,24	1,57	0,05
DI Yogyakarta	26,03	73,97	32,41	67,59	-	-
Jawa Timur	13,27	86,73	30,53	67,05	2,28	0,14
Banten	13,47	86,53	19,21	69,92	10,05	0,82
Bali	19,55	80,45	40,97	59,03	-	-
Nusa Tenggara Barat	15,40	84,60	24,92	68,15	5,48	1,45
Nusa Tenggara Timur	9,75	90,25	8,26	57,30	31,36	3,07
Kalimantan Barat	13,24	86,76	10,19	48,87	32,36	8,58
Kalimantan Tengah	12,75	87,25	8,80	54,40	30,62	6,18
Kalimantan Selatan	11,70	88,30	21,88	68,02	8,18	1,92
Kalimantan Timur	19,56	80,44	16,05	51,74	30,30	1,92
Kalimantan Utara	13,69	86,31	11,30	37,26	29,81	21,63
Sulawesi Utara	9,47	90,53	26,74	65,02	7,57	0,66
Sulawesi Tengah	14,50	85,50	18,30	62,94	15,34	3,42
Sulawesi Selatan	12,50	87,50	24,74	61,02	11,96	2,29
Sulawesi Tenggara	8,71	91,29	18,19	65,43	14,66	1,72
Gorontalo	10,49	89,51	27,85	57,99	13,39	0,76
Sulawesi Barat	9,54	90,46	14,63	50,85	25,85	8,67
Maluku	10,89	89,11	10,41	44,62	31,67	13,30
Maluku Utara	10,12	89,88	14,98	51,07	27,72	6,23
Papua Barat	5,69	94,31	6,78	33,03	40,13	20,06
Papua	4,38	95,62	3,86	24,92	36,92	34,30
INDONESIA	11,63	88,37	18,23	62,52	14,50	4,74

Sumber: Diolah dari Podes 2018

Lampiran 60 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	5,17	94,83	19,49	75,39	4,44	0,68
Sumatera Utara	6,67	93,33	10,52	66,85	19,38	3,25
Sumatera Barat	16,71	83,29	29,85	64,37	5,13	0,65
Riau	27,56	72,44	15,53	69,09	13,69	1,69
Jambi	11,01	88,99	17,19	73,17	8,99	0,65
Sumatera Selatan	10,36	89,64	17,21	74,18	8,00	0,61
Bengkulu	8,12	91,88	21,71	70,67	6,69	0,93
Lampung	10,81	89,19	13,35	79,30	6,93	0,42
Kep. Bangka Belitung	20,87	79,13	48,87	48,55	2,25	0,32
Kepulauan Riau	25,70	74,30	18,24	55,03	21,70	5,03
DKI Jakarta	69,29	30,71	59,76	40,24	-	-
Jawa Barat	15,48	84,52	21,41	76,46	1,95	0,18
Jawa Tengah	9,36	90,64	24,55	74,91	0,49	0,05
DI Yogyakarta	30,59	69,41	21,05	78,62	0,33	-
Jawa Timur	12,38	87,62	34,24	64,28	1,37	0,11
Banten	12,56	87,44	16,36	75,76	7,44	0,44
Bali	21,79	78,21	56,61	43,39	-	-
Nusa Tenggara Barat	13,64	86,36	37,73	57,44	3,52	1,31
Nusa Tenggara Timur	8,81	91,19	14,18	57,98	26,19	1,65
Kalimantan Barat	12,48	87,52	7,82	50,96	34,52	6,70
Kalimantan Tengah	13,13	86,87	7,23	56,10	29,58	7,09
Kalimantan Selatan	12,51	87,49	30,13	61,28	7,29	1,31
Kalimantan Timur	18,45	81,55	15,83	53,93	26,96	3,28
Kalimantan Utara	13,90	86,10	14,46	40,24	31,57	13,73
Sulawesi Utara	9,08	90,92	25,22	68,26	6,10	0,42
Sulawesi Tengah	12,62	87,38	16,03	64,93	15,18	3,85
Sulawesi Selatan	11,24	88,76	16,73	71,27	10,30	1,70
Sulawesi Tenggara	7,67	92,33	21,62	66,65	10,65	1,08
Gorontalo	8,86	91,14	42,45	49,33	7,32	0,90
Sulawesi Barat	8,00	92,00	10,03	53,01	32,94	4,01
Maluku	10,10	89,90	9,54	49,73	31,64	9,09
Maluku Utara	8,98	91,02	16,99	49,68	28,22	5,11
Papua Barat	5,44	94,56	5,80	36,21	39,78	18,21
Papua	4,54	95,46	4,94	22,21	38,02	34,83
INDONESIA	10,87	89,13	19,36	63,46	12,82	4,36

Sumber: Diolah dari Podes 2021

DATA SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL



Lampiran 61 Persentase Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan yang di Alami, 2020-2022

Jenis Kejahatan	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1, Pencurian	86,51	86,77	89,11
2, Penganiayaan	3,24	3,71	3,55
3, Pencurian dengan kekerasan	2,25	3,00	2,70
4, Pelecehan Seksual	1,24	1,71	2,13
5, Lainnya	12,64	13,21	11,40
6, Mengalami lebih dari 1 jenis kejahatan	5,88	8,40	8,89

Sumber : Diolah dari Susenas 2021, 2022, dan 2023

Lampiran 62 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2020–2022

Provinsi	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	0,61	0,32	0,34
Sumatera Utara	0,97	0,74	0,64
Sumatera Barat	0,97	0,48	0,62
Riau	0,73	0,56	0,52
Jambi	0,79	0,50	0,59
Sumatera Selatan	1,07	0,57	0,49
Bengkulu	0,95	0,97	0,95
Lampung	1,00	0,50	0,72
Kep. Bangka Belitung	0,72	0,41	0,44
Kepulauan Riau	1,44	0,55	0,88
DKI Jakarta	0,86	0,40	0,63
Jawa Barat	0,90	0,48	0,62
Jawa Tengah	0,57	0,37	0,45
DI Yogyakarta	0,79	0,41	0,83
Jawa Timur	0,66	0,35	0,38
Banten	0,46	0,36	0,46
Bali	0,23	0,20	0,20
Nusa Tenggara Barat	1,49	0,98	0,98
Nusa Tenggara Timur	0,73	0,57	0,45
Kalimantan Barat	0,69	0,44	0,42
Kalimantan Tengah	0,55	0,47	0,38
Kalimantan Selatan	0,59	0,42	0,36
Kalimantan Timur	0,60	0,47	0,41
Kalimantan Utara	1,36	0,57	0,66
Sulawesi Utara	0,63	0,57	0,53
Sulawesi Tengah	1,17	0,63	0,53
Sulawesi Selatan	0,73	0,41	0,51
Sulawesi Tenggara	0,90	0,50	0,53
Gorontalo	0,59	0,46	0,44
Sulawesi Barat	0,58	0,40	0,30
Maluku	1,09	0,78	0,86
Maluku Utara	1,06	0,55	0,53
Papua Barat	1,04	0,73	0,59
Papua	0,73	0,55	0,52
INDONESIA	0,78	0,47	0,53

Sumber : Diolah dari Susenas 2021, 2022, dan 2023

Lampiran 63 Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin, 2020–2022

Provinsi	2020		2021		2022	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	65,54	34,46	69,45	30,55	68,90	31,10
Sumatera Utara	61,10	38,90	60,62	39,38	61,38	38,62
Sumatera Barat	54,36	45,64	51,65	48,35	52,36	47,64
Riau	64,61	35,39	61,94	38,06	67,57	32,43
Jambi	66,52	33,48	60,35	39,65	68,85	31,15
Sumatera Selatan	78,91	21,09	75,93	24,07	78,90	21,10
Bengkulu	71,96	28,04	75,56	24,44	76,01	23,99
Lampung	71,25	28,75	77,88	22,12	72,40	27,60
Kep. Bangka Belitung	51,03	48,97	56,17	43,83	74,82	25,18
Kepulauan Riau	67,35	32,65	58,96	41,04	41,03	58,97
DKI Jakarta	63,18	36,82	66,71	33,29	66,18	33,82
Jawa Barat	64,25	35,75	65,34	34,66	66,31	33,69
Jawa Tengah	64,63	35,37	56,81	43,19	55,53	44,47
DI Yogyakarta	67,14	32,86	65,22	34,78	56,31	43,69
Jawa Timur	61,92	38,08	57,72	42,28	60,99	39,01
Banten	73,18	26,82	54,84	45,16	56,64	43,36
Bali	73,76	26,24	60,47	39,53	72,21	27,79
Nusa Tenggara Barat	57,14	42,86	64,56	35,44	62,97	37,03
Nusa Tenggara Timur	65,49	34,51	64,70	35,30	71,63	28,37
Kalimantan Barat	66,14	33,86	61,72	38,28	71,66	28,34
Kalimantan Tengah	66,85	33,15	64,59	35,41	71,45	28,55
Kalimantan Selatan	62,59	37,41	55,48	44,52	64,69	35,31
Kalimantan Timur	70,03	29,97	67,55	32,45	68,97	31,03
Kalimantan Utara	62,56	37,44	71,86	28,14	63,78	36,22
Sulawesi Utara	62,24	37,76	70,94	29,06	68,90	31,10
Sulawesi Tengah	70,87	29,13	56,48	43,52	56,77	43,23
Sulawesi Selatan	53,56	46,44	51,86	48,14	58,67	41,33
Sulawesi Tenggara	70,72	29,28	64,85	35,15	63,75	36,25
Gorontalo	42,25	57,75	63,33	36,67	63,62	36,38
Sulawesi Barat	62,32	37,68	50,34	49,66	59,32	40,68
Maluku	56,53	43,47	52,00	48,00	49,68	50,32
Maluku Utara	70,50	29,50	59,90	40,10	65,70	34,30
Papua Barat	71,92	28,08	62,44	37,56	57,44	42,56
Papua	63,08	36,92	60,06	39,94	58,92	41,08
INDONESIA	64,46	35,54	62,29	37,71	63,23	36,77

Sumber : Diolah dari Susenas 2021, 2022, dan 2023

Lampiran 64 Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Kelompok Umur, 2020–2022

Provinsi	2020		2021		2022	
	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	8,51	91,49	2,31	97,69	4,64	95,36
Sumatera Utara	7,19	92,81	8,95	91,05	8,07	91,93
Sumatera Barat	10,11	89,89	7,99	92,01	8,28	91,72
Riau	4,41	95,59	9,33	90,67	4,95	95,05
Jambi	4,20	95,80	12,00	88,00	7,54	92,46
Sumatera Selatan	6,15	93,85	6,17	93,83	6,82	93,18
Bengkulu	6,79	93,21	5,11	94,89	4,80	95,20
Lampung	5,64	94,36	3,06	96,94	7,32	92,68
Kep. Bangka Belitung	5,87	94,13	8,35	91,65	3,25	96,75
Kepulauan Riau	15,39	84,61	6,08	93,92	10,12	89,88
DKI Jakarta	4,16	95,84	11,70	88,30	12,27	87,73
Jawa Barat	5,31	94,69	5,17	94,83	5,36	94,64
Jawa Tengah	4,45	95,55	7,23	92,77	8,05	91,95
DI Yogyakarta	0,57	99,43	2,08	97,92	7,65	92,35
Jawa Timur	5,53	94,47	9,54	90,46	4,83	95,17
Banten	3,51	96,49	5,67	94,33	6,82	93,18
Bali	2,25	97,75	–	100,00	0,58	99,42
Nusa Tenggara Barat	7,86	92,14	4,50	95,50	11,90	88,10
Nusa Tenggara Timur	3,12	96,88	6,07	93,93	4,41	95,59
Kalimantan Barat	2,92	97,08	5,22	94,78	4,67	95,33
Kalimantan Tengah	4,84	95,16	4,34	95,66	4,50	95,50
Kalimantan Selatan	5,08	94,92	3,52	96,48	4,39	95,61
Kalimantan Timur	2,12	97,88	4,37	95,63	5,45	94,55
Kalimantan Utara	3,44	96,56	6,17	93,83	–	100,00
Sulawesi Utara	6,15	93,85	7,91	92,09	2,64	97,36
Sulawesi Tengah	8,29	91,71	10,55	89,45	13,47	86,53
Sulawesi Selatan	5,40	94,60	7,73	92,27	2,03	97,97
Sulawesi Tenggara	5,41	94,59	2,72	97,28	5,42	94,58
Gorontalo	7,06	92,94	9,12	90,88	0,61	99,39
Sulawesi Barat	4,21	95,79	6,64	93,36	5,73	94,27
Maluku	7,72	92,28	9,85	90,15	17,24	82,76
Maluku Utara	4,22	95,78	17,41	82,59	10,50	89,50
Papua Barat	5,24	94,76	6,58	93,42	8,91	91,09
Papua	11,60	88,40	10,21	89,79	6,24	93,76
INDONESIA	5,68	94,32	6,94	93,06	6,75	93,25

Sumber : Diolah dari Susenas 2021, 2022, dan 2023

Lampiran 65 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2020–2022

Provinsi	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	88,66	96,47	93,92
Sumatera Utara	93,67	91,60	96,53
Sumatera Barat	89,11	90,15	86,59
Riau	91,92	88,98	88,23
Jambi	81,23	92,36	96,29
Sumatera Selatan	91,32	93,34	88,78
Bengkulu	96,71	96,44	91,11
Lampung	87,90	86,73	89,27
Kep. Bangka Belitung	80,63	82,36	88,81
Kepulauan Riau	94,03	94,51	90,58
DKI Jakarta	88,65	88,33	91,90
Jawa Barat	86,91	87,02	91,69
Jawa Tengah	81,06	75,35	80,82
DI Yogyakarta	69,82	79,04	77,74
Jawa Timur	79,99	81,83	82,49
Banten	87,44	91,57	95,58
Bali	90,17	83,52	80,18
Nusa Tenggara Barat	88,42	94,22	92,09
Nusa Tenggara Timur	87,71	88,57	89,54
Kalimantan Barat	85,70	94,72	88,37
Kalimantan Tengah	84,56	86,30	95,79
Kalimantan Selatan	86,46	72,25	84,38
Kalimantan Timur	87,57	84,13	94,00
Kalimantan Utara	95,98	93,38	82,06
Sulawesi Utara	88,94	83,23	84,68
Sulawesi Tengah	94,11	95,28	89,48
Sulawesi Selatan	87,72	80,52	90,96
Sulawesi Tenggara	89,78	92,43	93,44
Gorontalo	85,76	83,49	89,40
Sulawesi Barat	82,91	87,04	91,93
Maluku	80,71	92,52	95,75
Maluku Utara	94,20	96,53	90,25
Papua Barat	65,31	78,47	91,03
Papua	89,77	87,85	91,99
INDONESIA	86,51	86,77	89,11

Catatan: Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk
 Sumber : Diolah dari Susenas 2021, 2022, dan 2023

Lampiran 66 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Penganiayaan Menurut Provinsi, 2020–2022

Provinsi	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	4,20	4,57	2,04
Sumatera Utara	2,76	3,43	1,11
Sumatera Barat	2,00	1,98	6,01
Riau	3,76	3,46	5,38
Jambi	1,92	0,59	1,13
Sumatera Selatan	2,37	1,33	2,31
Bengkulu	1,08	0,61	4,85
Lampung	2,87	3,45	1,18
Kep. Bangka Belitung	1,53	–	6,30
Kepulauan Riau	3,00	0,52	0,99
DKI Jakarta	7,08	8,44	3,62
Jawa Barat	2,41	5,25	4,63
Jawa Tengah	3,31	4,16	2,03
DI Yogyakarta	4,79	–	8,15
Jawa Timur	2,58	3,01	4,10
Banten	4,25	2,07	1,47
Bali	3,68	4,89	6,12
Nusa Tenggara Barat	1,33	2,19	1,19
Nusa Tenggara Timur	9,17	3,70	6,57
Kalimantan Barat	1,28	0,85	0,48
Kalimantan Tengah	5,12	2,85	0,68
Kalimantan Selatan	–	1,60	–
Kalimantan Timur	1,67	1,78	2,15
Kalimantan Utara	3,24	3,58	0,95
Sulawesi Utara	5,76	8,24	11,43
Sulawesi Tengah	4,79	2,07	5,35
Sulawesi Selatan	1,57	3,09	6,22
Sulawesi Tenggara	4,88	6,05	2,00
Gorontalo	2,39	10,40	5,72
Sulawesi Barat	4,75	9,58	–
Maluku	13,17	5,24	7,25
Maluku Utara	1,39	1,11	4,69
Papua Barat	14,66	8,29	4,55
Papua	7,91	6,59	7,14
INDONESIA	3,24	3,71	3,55

Catatan: Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Sumber : Diolah dari Susenas 2021, 2022, dan 2023

Lampiran 67 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Menurut Provinsi, 2020–2022

Provinsi	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	2,21	2,54	0,20
Sumatera Utara	1,16	3,76	1,51
Sumatera Barat	0,77	3,45	0,09
Riau	2,92	3,76	6,05
Jambi	3,03	3,21	0,98
Sumatera Selatan	3,34	2,54	2,81
Bengkulu	0,33	1,42	5,42
Lampung	3,15	0,49	4,70
Kep. Bangka Belitung	–	7,73	–
Kepulauan Riau	2,28	–	1,09
DKI Jakarta	4,65	5,00	3,08
Jawa Barat	2,38	5,09	4,51
Jawa Tengah	1,42	2,21	1,93
DI Yogyakarta	2,40	1,13	–
Jawa Timur	1,83	1,58	1,90
Banten	5,39	3,56	1,72
Bali	0,30	–	–
Nusa Tenggara Barat	0,78	0,59	0,86
Nusa Tenggara Timur	1,25	2,03	1,88
Kalimantan Barat	1,85	0,87	0,91
Kalimantan Tengah	0,99	2,98	0,68
Kalimantan Selatan	1,08	3,70	–
Kalimantan Timur	1,00	1,40	1,83
Kalimantan Utara	1,05	1,52	–
Sulawesi Utara	0,45	–	4,22
Sulawesi Tengah	1,21	–	0,71
Sulawesi Selatan	4,08	4,63	5,66
Sulawesi Tenggara	0,99	0,30	0,43
Gorontalo	–	6,15	1,52
Sulawesi Barat	–	4,77	–
Maluku	0,60	2,09	0,76
Maluku Utara	1,78	–	3,61
Papua Barat	7,10	8,45	5,18
Papua	7,71	6,63	5,25
INDONESIA	2,25	3,00	2,70

Catatan: Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Sumber : Diolah dari Susenas 2021, 2022, dan 2023

Lampiran 68 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pelecehan Seksual dengan Kekerasan Menurut Provinsi, 2020–2022

Provinsi	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	1,58	2,54	4,30
Sumatera Utara	0,15	1,77	1,31
Sumatera Barat	0,48	1,54	0,87
Riau	–	0,36	2,43
Jambi	0,74	0,59	0,69
Sumatera Selatan	1,11	0,73	0,99
Bengkulu	–	0,56	1,62
Lampung	0,23	0,49	1,72
Kep. Bangka Belitung	–	4,48	–
Kepulauan Riau	0,02	0,67	7,77
DKI Jakarta	2,68	–	2,79
Jawa Barat	1,88	3,70	3,83
Jawa Tengah	0,74	0,49	0,74
DI Yogyakarta	0,40	1,71	2,02
Jawa Timur	1,20	1,69	1,59
Banten	3,91	2,76	0,91
Bali	–	–	–
Nusa Tenggara Barat	0,74	0,27	1,44
Nusa Tenggara Timur	1,40	1,99	0,06
Kalimantan Barat	0,29	0,72	3,16
Kalimantan Tengah	1,88	0,93	0,74
Kalimantan Selatan	–	2,98	–
Kalimantan Timur	0,45	0,35	1,86
Kalimantan Utara	2,86	–	2,40
Sulawesi Utara	0,29	0,48	–
Sulawesi Tengah	1,30	0,27	–
Sulawesi Selatan	0,48	2,28	4,61
Sulawesi Tenggara	2,01	1,41	0,66
Gorontalo	4,59	–	0,44
Sulawesi Barat	1,54	–	–
Maluku	2,95	1,76	0,85
Maluku Utara	–	3,16	1,08
Papua Barat	2,44	1,60	1,37
Papua	4,44	4,11	4,56
INDONESIA	1,24	1,71	2,13

Catatan: Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk
 Sumber : Diolah dari Susenas 2021, 2022, dan 2023

Lampiran 69 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Lainnya Menurut Provinsi, 2020–2022

Provinsi	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	6,13	4,72	4,12
Sumatera Utara	3,84	7,43	4,38
Sumatera Barat	11,62	6,39	10,38
Riau	4,85	5,38	6,51
Jambi	17,11	10,04	5,65
Sumatera Selatan	7,11	6,57	8,05
Bengkulu	4,26	1,53	6,52
Lampung	10,34	11,11	6,18
Kep. Bangka Belitung	18,19	5,94	6,48
Kepulauan Riau	8,92	7,30	8,45
DKI Jakarta	14,31	12,15	15,85
Jawa Barat	15,76	18,36	11,71
Jawa Tengah	15,40	20,92	19,96
DI Yogyakarta	23,10	19,29	13,92
Jawa Timur	19,05	20,56	18,72
Banten	18,06	10,72	5,23
Bali	6,46	21,37	13,70
Nusa Tenggara Barat	10,02	4,93	8,77
Nusa Tenggara Timur	5,39	5,79	5,16
Kalimantan Barat	15,56	4,95	7,70
Kalimantan Tengah	10,55	11,55	5,79
Kalimantan Selatan	16,02	19,47	19,77
Kalimantan Timur	10,32	15,54	8,13
Kalimantan Utara	2,67	5,71	14,69
Sulawesi Utara	7,46	11,64	10,38
Sulawesi Tengah	3,47	7,03	5,26
Sulawesi Selatan	10,01	16,49	12,44
Sulawesi Tenggara	5,14	5,46	8,82
Gorontalo	7,26	5,55	4,89
Sulawesi Barat	10,80	10,79	8,07
Maluku	6,14	9,36	3,32
Maluku Utara	4,66	0,09	5,82
Papua Barat	16,04	10,81	3,91
Papua	7,60	10,63	9,15
INDONESIA	12,64	13,21	11,40

Catatan: Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Sumber : Diolah dari Susenas 2021, 2022, dan 2023

Lampiran 70 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2020–2022

Provinsi	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	13,29	29,15	19,60
Sumatera Utara	19,77	14,54	17,16
Sumatera Barat	25,99	20,27	20,59
Riau	27,61	14,79	15,14
Jambi	16,4	17,40	19,45
Sumatera Selatan	29,65	20,07	14,87
Bengkulu	17,58	12,12	16,81
Lampung	18,84	14,64	21,70
Kep. Bangka Belitung	14,46	25,43	24,40
Kepulauan Riau	32,16	26,10	32,18
DKI Jakarta	31,22	33,90	29,32
Jawa Barat	24,86	32,82	31,09
Jawa Tengah	21,67	16,57	16,46
DI Yogyakarta	21,47	20,34	19,19
Jawa Timur	25,16	21,75	28,19
Banten	31,95	26,04	14,66
Bali	16,23	27,17	30,95
Nusa Tenggara Barat	12,4	18,10	13,71
Nusa Tenggara Timur	15,89	16,88	13,87
Kalimantan Barat	19,14	22,71	22,38
Kalimantan Tengah	19,35	28,53	20,39
Kalimantan Selatan	24,03	24,54	9,26
Kalimantan Timur	26,81	26,52	12,89
Kalimantan Utara	14,15	31,14	21,22
Sulawesi Utara	28,83	26,79	29,01
Sulawesi Tengah	22,26	31,96	32,48
Sulawesi Selatan	24,89	31,64	25,40
Sulawesi Tenggara	23,68	30,55	16,40
Gorontalo	31,06	24,08	27,14
Sulawesi Barat	12,94	23,79	26,51
Maluku	22,57	16,05	15,91
Maluku Utara	16,76	15,46	20,08
Papua Barat	37,22	28,72	44,67
Papua	19,52	30,57	28,37
INDONESIA	23,46	23,31	22,98

Catatan: Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk
 Sumber : Diolah dari Susenas 2021, 2022, dan 2023

Lampiran 71 Persentase Penduduk yang Pernah Melapor dan Mendapatkan/
Ditemani Bantuan Hukum Menurut Provinsi, 2020–2022

Provinsi	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	49,54	10,25	21,97
Sumatera Utara	22,28	26,50	12,86
Sumatera Barat	14,92	14,45	24,39
Riau	10,22	27,64	26,84
Jambi	9,53	29,98	23,40
Sumatera Selatan	18,14	28,63	27,06
Bengkulu	10,49	42,79	23,63
Lampung	21,88	28,73	20,12
Kep. Bangka Belitung	51,53	17,43	–
Kepulauan Riau	10,13	13,67	41,01
DKI Jakarta	10,15	21,11	18,68
Jawa Barat	25,49	21,07	26,82
Jawa Tengah	24,56	24,29	16,10
DI Yogyakarta	20,48	50,37	17,73
Jawa Timur	22,05	35,24	19,93
Banten	32,84	27,48	22,23
Bali	49,45	6,14	33,19
Nusa Tenggara Barat	18,5	21,54	13,52
Nusa Tenggara Timur	19,43	31,38	21,51
Kalimantan Barat	35,95	12,94	9,39
Kalimantan Tengah	35,93	40,00	34,83
Kalimantan Selatan	11,55	62,74	41,45
Kalimantan Timur	32,08	7,54	18,57
Kalimantan Utara	27,92	38,92	41,76
Sulawesi Utara	18,46	26,67	34,45
Sulawesi Tengah	31,43	28,06	24,69
Sulawesi Selatan	25,43	26,62	47,73
Sulawesi Tenggara	15,46	35,53	41,07
Gorontalo	20,07	15,21	48,16
Sulawesi Barat	43,04	39,66	22,06
Maluku	22,98	41,32	33,06
Maluku Utara	27,7	23,75	36,50
Papua Barat	27,69	9,19	31,91
Papua	27,26	56,39	29,44
INDONESIA	22,46	26,19	24,04

Sumber : Diolah dari Susenas 2021, 2022, dan 2023

Lampiran 72 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melapor ke Polisi Menurut Jenis Kejahatan dan Provinsi, 2021-2022

Provinsi	Pencurian		Penganiayaan		Pencurian dengan Kekerasan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	28,04	18,31	3,40	0,56	2,42	0,20
Sumatera Utara	11,19	16,41	3,16	0,80	2,51	0,54
Sumatera Barat	16,70	16,00	–	2,57	–	–
Riau	11,62	12,64	1,31	1,76	2,22	2,06
Jambi	17,40	17,61	0,59	1,03	0,59	0,98
Sumatera Selatan	17,41	12,77	1,25	1,32	0,83	0,18
Bengkulu	10,62	15,20	0,61	1,62	–	1,62
Lampung	13,51	17,25	0,31	1,00	–	2,64
Kep. Bangka Belitung	16,48	18,91	–	1,96	7,73	–
Kepulauan Riau	25,40	25,17	–	–	–	0,93
DKI Jakarta	27,94	28,70	2,49	2,29	3,81	2,57
Jawa Barat	25,85	26,04	4,11	3,09	2,35	4,32
Jawa Tengah	10,15	12,32	0,19	1,00	–	0,75
DI Yogyakarta	15,90	10,90	–	3,28	1,13	–
Jawa Timur	17,58	21,48	2,19	2,83	0,85	1,90
Banten	22,54	14,10	1,90	1,47	1,90	0,91
Bali	21,91	18,16	–	–	–	–
Nusa Tenggara Barat	14,36	12,15	0,88	0,60	0,59	0,59
Nusa Tenggara Timur	9,57	9,10	2,87	3,50	0,62	0,02
Kalimantan Barat	22,11	19,98	–	0,29	–	–
Kalimantan Tengah	25,23	18,61	2,78	0,35	0,58	0,35
Kalimantan Selatan	7,76	9,26	–	–	2,91	–
Kalimantan Timur	20,43	12,08	1,78	1,83	–	1,83
Kalimantan Utara	26,04	16,62	3,58	0,43	1,52	–
Sulawesi Utara	18,05	18,17	7,62	6,77	–	2,93
Sulawesi Tengah	27,93	28,23	1,59	4,21	–	–
Sulawesi Selatan	23,25	21,41	2,32	5,96	1,66	5,66
Sulawesi Tenggara	28,19	12,70	1,73	0,25	0,30	–
Gorontalo	6,18	23,73	8,97	2,96	4,15	–
Sulawesi Barat	15,45	25,96	2,08	–	4,77	–
Maluku	12,28	12,08	1,84	2,02	1,20	0,57
Maluku Utara	11,99	14,62	0,31	3,80	–	0,12
Papua Barat	19,44	37,44	2,06	3,17	5,67	1,27
Papua	23,12	21,20	4,35	5,63	2,28	4,76
INDONESIA	18,27	19,01	2,15	2,16	1,41	1,95

Sumber: Diolah dari Susenas 2022 dan 2023

Lanjutan Lampiran 72

Provinsi	Pelecehan Seksual		Lainnya	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)
A c e h	2,54	1,12	2,42	0,79
Sumatera Utara	1,61	1,03	2,29	2,03
Sumatera Barat	0,59	0,30	3,51	2,41
Riau	0,36	2,40	0,36	3,43
Jambi	0,59	0,69	2,56	2,53
Sumatera Selatan	0,73	0,99	3,19	0,32
Bengkulu	-	1,62	0,88	1,62
Lampung	-	0,88	0,82	2,07
Kep. Bangka Belitung	-	-	1,23	3,53
Kepulauan Riau	0,67	7,77	0,03	0,17
DKI Jakarta	-	2,29	5,16	2,62
Jawa Barat	2,09	3,37	9,59	6,66
Jawa Tengah	0,38	0,55	6,08	3,91
DI Yogyakarta	-	2,02	4,49	2,99
Jawa Timur	1,25	1,56	4,38	7,84
Banten	1,90	0,91	4,14	1,58
Bali	-	-	5,26	12,79
Nusa Tenggara Barat	0,27	-	2,17	1,55
Nusa Tenggara Timur	0,20	0,06	4,44	1,24
Kalimantan Barat	-	-	0,60	2,40
Kalimantan Tengah	0,93	0,35	2,41	3,09
Kalimantan Selatan	-	-	13,88	-
Kalimantan Timur	-	1,83	4,31	2,94
Kalimantan Utara	-	2,40	-	1,77
Sulawesi Utara	0,20	-	2,35	7,25
Sulawesi Tengah	0,27	-	4,36	0,43
Sulawesi Selatan	1,14	4,61	7,37	6,18
Sulawesi Tenggara	1,41	0,26	0,85	3,74
Gorontalo	-	0,44	4,77	-
Sulawesi Barat	-	-	1,48	0,55
Maluku	0,32	0,72	1,69	2,24
Maluku Utara	3,16	1,08	-	0,94
Papua Barat	1,49	0,13	3,24	2,66
Papua	1,53	3,22	6,53	4,41
INDONESIA	1,02	1,74	4,83	4,07

Sumber: Diolah dari Susenas 2022 dan 2023

DATA SUSENAS MODUL KETAHANAN SOSIAL



Lampiran 73 Persentase Tingkat Kekhawatiran Rumah Tangga Berjalan Sendirian di Siang Hari Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Khawatir	Tidak Khawatir	Tidak Relevan
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	10,35	88,91	0,74
Sumatera Utara	11,69	87,86	0,45
Sumatera Barat	7,66	91,95	0,39
Riau	8,33	91,53	0,14
Jambi	6,26	93,15	0,59
Sumatera Selatan	5,13	94,69	0,18
Bengkulu	5,37	94,46	0,17
Lampung	6,03	93,85	0,12
Kep. Bangka Belitung	6,75	92,72	0,53
Kepulauan Riau	8,56	91,42	0,02
DKI Jakarta	22,61	76,24	1,15
Jawa Barat	16,52	83,37	0,11
Jawa Tengah	6,13	93,46	0,41
DI Yogyakarta	9,10	90,62	0,28
Jawa Timur	7,34	92,24	0,42
Banten	12,84	86,77	0,39
Bali	6,94	92,99	0,07
Nusa Tenggara Barat	7,08	92,72	0,20
Nusa Tenggara Timur	9,51	90,05	0,44
Kalimantan Barat	6,40	93,13	0,47
Kalimantan Tengah	7,35	91,56	1,09
Kalimantan Selatan	7,11	92,71	0,18
Kalimantan Timur	11,48	87,33	1,19
Kalimantan Utara	13,56	85,62	0,82
Sulawesi Utara	16,73	81,90	1,37
Sulawesi Tengah	20,45	79,34	0,21
Sulawesi Selatan	6,30	92,82	0,88
Sulawesi Tenggara	9,09	90,73	0,18
Gorontalo	10,35	89,65	-
Sulawesi Barat	8,00	91,76	0,24
Maluku	5,70	94,01	0,29
Maluku Utara	3,79	95,92	0,29
Papua Barat	9,27	90,57	0,16
Papua	9,74	89,65	0,61
INDONESIA	10,30	89,31	0,39

Sumber: Diolah dari Modul Ketahanan Sosial, 2020

Lampiran 74 Persentase Tingkat Kekhawatiran Rumah Tangga Berjalan Sendirian di Malam Hari Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Khawatir	Tidak Khawatir	Tidak Relevan
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	38,79	60,64	0,57
Sumatera Utara	44,93	54,00	1,07
Sumatera Barat	41,01	56,80	2,19
Riau	34,69	63,21	2,10
Jambi	34,22	64,54	1,24
Sumatera Selatan	28,70	70,90	0,40
Bengkulu	31,50	67,41	1,09
Lampung	27,26	72,55	0,19
Kep. Bangka Belitung	32,04	67,21	0,75
Kepulauan Riau	27,25	72,73	0,02
DKI Jakarta	57,88	40,89	1,23
Jawa Barat	47,60	51,70	0,70
Jawa Tengah	24,86	73,90	1,24
DI Yogyakarta	23,67	74,33	2,00
Jawa Timur	33,96	65,32	0,72
Banten	44,45	54,65	0,90
Bali	18,60	81,02	0,38
Nusa Tenggara Barat	33,67	65,71	0,62
Nusa Tenggara Timur	35,19	64,39	0,42
Kalimantan Barat	27,47	70,27	2,26
Kalimantan Tengah	29,44	68,93	1,63
Kalimantan Selatan	32,96	65,64	1,40
Kalimantan Timur	38,70	59,58	1,72
Kalimantan Utara	34,39	64,39	1,22
Sulawesi Utara	39,69	58,00	2,31
Sulawesi Tengah	45,54	53,74	0,72
Sulawesi Selatan	34,69	63,73	1,58
Sulawesi Tenggara	29,90	69,92	0,18
Gorontalo	46,42	53,24	0,34
Sulawesi Barat	22,95	76,28	0,77
Maluku	34,47	64,85	0,68
Maluku Utara	28,66	70,57	0,77
Papua Barat	40,33	59,19	0,48
Papua	29,11	67,07	3,82
INDONESIA	36,72	62,27	1,01

Sumber: Diolah dari Modul Ketahanan Sosial, 2020

Lampiran 75 Persentase Tingkat Kekhawatiran Rumah Tangga Berkendara (Sepeda, Sepeda Motor, Mobil) Sendirian di Malam Hari Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Khawatir	Tidak Khawatir	Tidak Relevan
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	35,71	60,00	4,29
Sumatera Utara	45,55	49,65	4,80
Sumatera Barat	37,95	56,32	5,73
Riau	32,40	63,68	3,92
Jambi	32,53	62,81	4,66
Sumatera Selatan	32,29	62,96	4,75
Bengkulu	30,66	62,36	6,98
Lampung	29,48	68,81	1,71
Kep. Bangka Belitung	27,46	67,89	4,65
Kepulauan Riau	24,78	74,25	0,97
DKI Jakarta	60,55	32,69	6,76
Jawa Barat	48,74	45,65	5,61
Jawa Tengah	25,01	68,99	6,00
DI Yogyakarta	23,93	69,44	6,63
Jawa Timur	34,79	58,15	7,06
Banten	51,92	43,63	4,45
Bali	17,56	79,92	2,52
Nusa Tenggara Barat	33,83	55,58	10,59
Nusa Tenggara Timur	27,99	54,67	17,34
Kalimantan Barat	25,74	68,50	5,76
Kalimantan Tengah	29,33	65,99	4,68
Kalimantan Selatan	31,35	65,69	2,96
Kalimantan Timur	36,81	60,70	2,49
Kalimantan Utara	33,32	61,57	5,11
Sulawesi Utara	36,64	54,77	8,59
Sulawesi Tengah	44,44	51,38	4,18
Sulawesi Selatan	35,29	58,29	6,42
Sulawesi Tenggara	27,49	66,05	6,46
Gorontalo	39,85	47,15	13,00
Sulawesi Barat	22,32	70,95	6,73
Maluku	30,20	55,85	13,95
Maluku Utara	27,41	61,33	11,26
Papua Barat	34,82	55,21	9,97
Papua	27,81	44,07	28,12
INDONESIA	37,15	56,63	6,22

Sumber: Diolah dari Modul Ketahanan Sosial, 2020

Lampiran 76 Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kekerasan dalam 12 bulan Terakhir, 2020–2022

Provinsi	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	0,05	0,02	0,02
Sumatera Utara	0,04	0,04	0,02
Sumatera Barat	0,03	0,03	0,04
Riau	0,05	0,04	0,05
Jambi	0,04	0,02	0,01
Sumatera Selatan	0,06	0,02	0,03
Bengkulu	0,01	0,03	0,08
Lampung	0,05	0,02	0,05
Kep. Bangka Belitung	0,01	0,05	0,03
Kepulauan Riau	0,08	0,01	0,08
DKI Jakarta	0,07	0,05	0,02
Jawa Barat	0,04	0,04	0,04
Jawa Tengah	0,03	0,02	0,02
DI Yogyakarta	0,06	0,01	0,08
Jawa Timur	0,03	0,02	0,02
Banten	0,03	0,01	0,01
Bali	0,01	0,01	0,01
Nusa Tenggara Barat	0,04	0,03	0,03
Nusa Tenggara Timur	0,08	0,04	0,04
Kalimantan Barat	0,02	0,01	0,02
Kalimantan Tengah	0,04	0,03	0
Kalimantan Selatan	0,01	0,03	–
Kalimantan Timur	0,02	0,02	0,01
Kalimantan Utara	0,07	0,03	0,02
Sulawesi Utara	0,04	0,05	0,06
Sulawesi Tengah	0,06	0,01	0,03
Sulawesi Selatan	0,04	0,03	0,04
Sulawesi Tenggara	0,07	0,04	0,01
Gorontalo	0,04	0,08	0,03
Sulawesi Barat	0,04	0,04	–
Maluku	0,17	0,06	0,06
Maluku Utara	0,03	0,02	0,05
Papua Barat	0,25	0,12	0,07
Papua	0,11	0,07	0,06
INDONESIA	0,04	0,03	0,03

Sumber: Diolah dari Susenas 2021, 2022, dan 2023

Lampiran 77 Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Khawatir	Tidak Khawatir	Tidak Relevan
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	38,91	60,79	0,30
Sumatera Utara	45,10	54,52	0,38
Sumatera Barat	41,45	58,19	0,36
Riau	35,04	64,82	0,14
Jambi	34,44	65,17	0,39
Sumatera Selatan	28,70	71,24	0,06
Bengkulu	31,84	68,03	0,13
Lampung	27,28	72,60	0,12
Kep. Bangka Belitung	32,37	67,10	0,53
Kepulauan Riau	27,24	72,74	0,02
DKI Jakarta	58,48	41,17	0,35
Jawa Barat	47,94	52,01	0,05
Jawa Tengah	24,95	74,66	0,39
DI Yogyakarta	24,24	75,60	0,16
Jawa Timur	34,15	65,57	0,28
Banten	44,49	55,38	0,13
Bali	18,68	81,32	-
Nusa Tenggara Barat	33,81	65,99	0,20
Nusa Tenggara Timur	35,39	64,36	0,25
Kalimantan Barat	27,50	72,18	0,32
Kalimantan Tengah	29,50	69,51	0,99
Kalimantan Selatan	33,22	66,60	0,18
Kalimantan Timur	39,19	60,04	0,77
Kalimantan Utara	35,19	64,07	0,74
Sulawesi Utara	40,06	58,86	1,08
Sulawesi Tengah	45,74	54,09	0,17
Sulawesi Selatan	34,83	64,60	0,57
Sulawesi Tenggara	29,90	69,92	0,18
Gorontalo	46,64	53,36	-
Sulawesi Barat	23,96	75,98	0,06
Maluku	34,54	65,17	0,29
Maluku Utara	29,15	70,56	0,29
Papua Barat	40,73	59,27	-
Papua	29,40	70,09	0,51
INDONESIA	36,94	62,80	0,26

Sumber: Diolah dari Susenas 2020, 2021, dan 2022

Lampiran 78 Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan Kepada Polisi Menurut Provinsi, 2020–2022

Provinsi	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	36,53	73,19	24,22
Sumatera Utara	68,84	70,91	45,60
Sumatera Barat	66,7	8,52	41,16
Riau	42,41	46,21	26,14
Jambi	48,79	18,22	92,54
Sumatera Selatan	64,74	44,74	37,61
Bengkulu	–	23,61	18,72
Lampung	33,7	8,93	51,18
Kep. Bangka Belitung	–	63,28	31,02
Kepulauan Riau	43,68	56,24	87,07
DKI Jakarta	73,26	46,89	65,89
Jawa Barat	53,5	57,16	76,60
Jawa Tengah	36,02	8,44	33,39
DI Yogyakarta	45,01	39,69	52,14
Jawa Timur	45,31	59,18	71,26
Banten	67,55	51,11	64,52
Bali	57,55	–	–
Nusa Tenggara Barat	43,34	55,25	36,59
Nusa Tenggara Timur	52,12	45,79	41,83
Kalimantan Barat	81,07	–	6,36
Kalimantan Tengah	71,33	55,77	46,75
Kalimantan Selatan	100	35,12	–
Kalimantan Timur	48,67	50,41	83,63
Kalimantan Utara	72,69	100,00	84,55
Sulawesi Utara	80,49	89,80	59,27
Sulawesi Tengah	35,26	79,32	69,40
Sulawesi Selatan	48,93	41,11	96,48
Sulawesi Tenggara	65,84	40,25	22,37
Gorontalo	34,24	79,32	44,31
Sulawesi Barat	55,65	71,58	–
Maluku	50,63	34,50	29,07
Maluku Utara	87,65	81,43	52,12
Papua Barat	45,02	45,92	41,17
Papua	58,31	32,49	73,04
INDONESIA	52,43	46,71	57,75

Catatan: Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Sumber : Diolah dari Susenas 2021, 2022, dan 2023

ESTIMASI *SAMPLING ERROR*



Lampiran 79 Estimasi *Sampling Error* Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2022

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	0,343	0,046	13,374
Sumatera Utara	0,645	0,060	9,233
Sumatera Barat	0,617	0,073	11,754
Riau	0,519	0,071	13,785
Jambi	0,588	0,083	14,208
Sumatera Selatan	0,491	0,049	10,051
Bengkulu	0,946	0,111	11,766
Lampung	0,725	0,094	12,911
Kep. Bangka Belitung	0,436	0,072	16,593
Kepulauan Riau	0,882	0,178	20,215
DKI Jakarta	0,627	0,088	14,026
Jawa Barat	0,615	0,044	7,076
Jawa Tengah	0,445	0,030	6,641
DI Yogyakarta	0,830	0,104	12,475
Jawa Timur	0,384	0,033	8,691
Banten	0,465	0,103	22,214
Bali	0,195	0,045	23,016
Nusa Tenggara Barat	0,980	0,091	9,307
Nusa Tenggara Timur	0,453	0,049	10,825
Kalimantan Barat	0,420	0,056	13,226
Kalimantan Tengah	0,376	0,059	15,551
Kalimantan Selatan	0,357	0,053	14,774
Kalimantan Timur	0,414	0,067	16,159
Kalimantan Utara	0,657	0,126	19,231
Sulawesi Utara	0,534	0,071	13,358
Sulawesi Tengah	0,527	0,078	14,900
Sulawesi Selatan	0,510	0,054	10,643
Sulawesi Tenggara	0,532	0,085	15,980
Gorontalo	0,439	0,088	19,970
Sulawesi Barat	0,297	0,053	17,872
Maluku	0,859	0,132	15,336
Maluku Utara	0,526	0,088	16,723
Papua Barat	0,587	0,101	17,132
Papua	0,519	0,069	13,318
INDONESIA	0,528	0,014	2,614

Sumber: Diolah dari Susenas 2023

Lanjutan Lampiran 79

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Observasi
	Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	0,264	0,446	1,233	49.468
Sumatera Utara	0,538	0,773	1,929	79.212
Sumatera Barat	0,490	0,777	1,473	43.653
Riau	0,396	0,679	1,784	30.900
Jambi	0,445	0,776	1,398	24.313
Sumatera Selatan	0,403	0,598	1,399	39.809
Bengkulu	0,751	1,191	1,096	20.143
Lampung	0,563	0,933	2,168	36.192
Kep. Bangka Belitung	0,315	0,603	0,900	13.783
Kepulauan Riau	0,593	1,310	2,006	14.734
DKI Jakarta	0,476	0,825	2,430	18.882
Jawa Barat	0,535	0,707	2,644	84.688
Jawa Tengah	0,391	0,507	1,752	100.295
DI Yogyakarta	0,650	1,059	1,529	13.135
Jawa Timur	0,324	0,455	2,282	104.858
Banten	0,301	0,718	3,692	25.805
Bali	0,124	0,306	1,444	23.640
Nusa Tenggara Barat	0,816	1,175	1,433	23.038
Nusa Tenggara Timur	0,366	0,560	1,161	51.470
Kalimantan Barat	0,324	0,545	1,311	32.417
Kalimantan Tengah	0,277	0,510	1,060	26.834
Kalimantan Selatan	0,267	0,477	1,235	27.167
Kalimantan Timur	0,301	0,568	1,347	22.016
Kalimantan Utara	0,450	0,957	0,897	10.569
Sulawesi Utara	0,411	0,694	1,042	29.377
Sulawesi Tengah	0,393	0,705	1,287	27.413
Sulawesi Selatan	0,414	0,628	1,526	56.471
Sulawesi Tenggara	0,389	0,727	1,303	35.630
Gorontalo	0,297	0,649	0,970	12.672
Sulawesi Barat	0,209	0,421	0,775	13.964
Maluku	0,636	1,160	1,286	26.336
Maluku Utara	0,379	0,730	0,921	21.596
Papua Barat	0,420	0,821	0,897	26.876
Papua	0,399	0,673	1,199	56.020
INDONESIA	0,502	0,556	2,106	1.223.376

Sumber: Diolah dari Susenas 2023

Lampiran 80 Estimasi *Sampling Error* Persentase Penduduk Korban Kejahatan Laki-Laki Menurut Provinsi, 2022

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	68,896	4,371	6,344
Sumatera Utara	61,380	3,603	5,870
Sumatera Barat	52,365	4,364	8,333
Riau	67,570	4,817	7,129
Jambi	68,850	4,336	6,297
Sumatera Selatan	78,905	3,510	4,449
Bengkulu	76,008	3,550	4,671
Lampung	72,399	3,507	4,844
Kep. Bangka Belitung	74,822	6,016	8,041
Kepulauan Riau	41,034	9,026	21,997
DKI Jakarta	66,179	5,174	7,818
Jawa Barat	66,308	2,612	3,940
Jawa Tengah	55,526	2,750	4,952
DI Yogyakarta	56,310	5,274	9,367
Jawa Timur	60,991	3,198	5,243
Banten	56,636	4,792	8,462
Bali	72,211	7,704	10,668
Nusa Tenggara Barat	62,971	3,794	6,025
Nusa Tenggara Timur	71,625	3,995	5,578
Kalimantan Barat	71,664	4,896	6,832
Kalimantan Tengah	71,451	5,754	8,053
Kalimantan Selatan	64,688	5,347	8,266
Kalimantan Timur	68,968	6,092	8,834
Kalimantan Utara	63,782	7,639	11,977
Sulawesi Utara	68,904	4,977	7,224
Sulawesi Tengah	56,772	5,970	10,516
Sulawesi Selatan	58,667	4,219	7,191
Sulawesi Tenggara	63,747	5,632	8,835
Gorontalo	63,625	8,105	12,739
Sulawesi Barat	59,319	7,478	12,606
Maluku	49,676	6,584	13,253
Maluku Utara	65,696	4,532	6,899
Papua Barat	57,437	4,425	7,704
Papua	58,921	4,013	6,811
INDONESIA	63,234	0,941	1,488

Sumber: Diolah dari Susenas 2023

Lanjutan Lampiran 80

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Observasi
	Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	59,760	76,765	0,869	174
Sumatera Utara	54,126	68,162	1,541	454
Sumatera Barat	43,826	60,768	1,092	287
Riau	57,522	76,224	1,328	173
Jambi	59,793	76,662	0,918	156
Sumatera Selatan	71,215	84,974	1,194	203
Bengkulu	68,386	82,269	0,771	205
Lampung	65,031	78,723	1,312	231
Kep. Bangka Belitung	61,377	84,750	0,750	60
Kepulauan Riau	25,092	59,113	1,813	69
DKI Jakarta	55,434	75,479	1,889	112
Jawa Barat	61,013	71,223	2,059	558
Jawa Tengah	50,093	60,831	1,456	487
DI Yogyakarta	45,849	66,239	1,298	113
Jawa Timur	54,575	67,048	1,718	396
Banten	47,117	65,690	1,603	117
Bali	55,045	84,650	1,078	41
Nusa Tenggara Barat	55,282	70,055	1,204	272
Nusa Tenggara Timur	63,196	78,772	0,948	244
Kalimantan Barat	61,189	80,225	1,074	148
Kalimantan Tengah	59,014	81,310	0,867	112
Kalimantan Selatan	53,657	74,349	0,934	116
Kalimantan Timur	55,989	79,520	1,096	106
Kalimantan Utara	47,944	77,102	0,739	78
Sulawesi Utara	58,427	77,747	0,836	145
Sulawesi Tengah	44,911	67,904	1,038	136
Sulawesi Selatan	50,230	66,624	1,225	280
Sulawesi Tenggara	52,167	73,924	0,952	181
Gorontalo	46,821	77,653	0,817	59
Sulawesi Barat	44,270	72,801	0,659	52
Maluku	37,071	62,322	1,100	184
Maluku Utara	56,356	73,961	0,525	124
Papua Barat	48,624	65,802	0,467	108
Papua	50,894	66,501	0,732	279
INDONESIA	61,371	65,059	1,569	6.460

Sumber: Diolah dari Susenas 2023

Lampiran 81 Estimasi *Sampling Error* Persentase Penduduk Korban Kejahatan Perempuan Menurut Provinsi, 2022

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	31,104	4,371	14,053
Sumatera Utara	38,620	3,603	9,329
Sumatera Barat	47,635	4,364	9,161
Riau	32,430	4,817	14,855
Jambi	31,150	4,336	13,919
Sumatera Selatan	21,095	3,510	16,641
Bengkulu	23,992	3,550	14,797
Lampung	27,601	3,507	12,705
Kep. Bangka Belitung	25,178	6,016	23,895
Kepulauan Riau	58,965	9,026	15,308
DKI Jakarta	33,821	5,174	15,297
Jawa Barat	33,692	2,612	7,754
Jawa Tengah	44,474	2,750	6,183
DI Yogyakarta	43,690	5,274	12,072
Jawa Timur	39,009	3,198	8,197
Banten	43,364	4,792	11,052
Bali	27,789	7,704	27,722
Nusa Tenggara Barat	37,029	3,794	10,246
Nusa Tenggara Timur	28,375	3,995	14,080
Kalimantan Barat	28,336	4,896	17,278
Kalimantan Tengah	28,549	5,754	20,154
Kalimantan Selatan	35,312	5,347	15,143
Kalimantan Timur	31,032	6,092	19,633
Kalimantan Utara	36,218	7,639	21,093
Sulawesi Utara	31,096	4,977	16,006
Sulawesi Tengah	43,228	5,970	13,811
Sulawesi Selatan	41,333	4,219	10,207
Sulawesi Tenggara	36,253	5,632	15,535
Gorontalo	36,375	8,105	22,283
Sulawesi Barat	40,681	7,478	18,382
Maluku	50,324	6,584	13,083
Maluku Utara	34,304	4,532	13,212
Papua Barat	42,563	4,425	10,396
Papua	41,079	4,013	9,769
INDONESIA	36,766	0,941	2,560

Catatan : Warna kuning menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam penggunaan hasil estimasi

Sumber : Diolah dari Susenas 2023

Lanjutan Lampiran 81

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Observasi
	Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	23,235	40,240	0,869	174
Sumatera Utara	31,838	45,874	1,541	454
Sumatera Barat	39,232	56,174	1,092	287
Riau	23,776	42,478	1,328	173
Jambi	23,338	40,207	0,918	156
Sumatera Selatan	15,026	28,785	1,194	203
Bengkulu	17,731	31,614	0,771	205
Lampung	21,277	34,969	1,312	231
Kep. Bangka Belitung	15,250	38,623	0,750	60
Kepulauan Riau	40,887	74,908	1,813	69
DKI Jakarta	24,521	44,566	1,889	112
Jawa Barat	28,777	38,987	2,059	558
Jawa Tengah	39,169	49,907	1,456	487
DI Yogyakarta	33,761	54,151	1,298	113
Jawa Timur	32,952	45,425	1,718	396
Banten	34,310	52,883	1,603	117
Bali	15,350	44,955	1,078	41
Nusa Tenggara Barat	29,945	44,718	1,204	272
Nusa Tenggara Timur	21,228	36,804	0,948	244
Kalimantan Barat	19,775	38,811	1,074	148
Kalimantan Tengah	18,690	40,986	0,867	112
Kalimantan Selatan	25,651	46,343	0,934	116
Kalimantan Timur	20,480	44,011	1,096	106
Kalimantan Utara	22,898	52,056	0,739	78
Sulawesi Utara	22,253	41,573	0,836	145
Sulawesi Tengah	32,096	55,089	1,038	136
Sulawesi Selatan	33,376	49,770	1,225	280
Sulawesi Tenggara	26,076	47,833	0,952	181
Gorontalo	22,347	53,179	0,817	59
Sulawesi Barat	27,199	55,730	0,659	52
Maluku	37,678	62,929	1,100	184
Maluku Utara	26,039	43,644	0,525	124
Papua Barat	34,198	51,376	0,467	108
Papua	33,499	49,106	0,732	279
INDONESIA	34,941	38,629	1,569	6.460

Sumber: Diolah dari Susenas 2023

Lampiran 82 Estimasi *Sampling Error* Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2022

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	93,921	2,363	2,516
Sumatera Utara	96,531	1,416	1,467
Sumatera Barat	86,586	3,319	3,834
Riau	88,229	3,180	3,604
Jambi	96,294	1,980	2,056
Sumatera Selatan	88,777	3,559	4,009
Bengkulu	91,107	3,892	4,272
Lampung	89,274	2,935	3,288
Kep. Bangka Belitung	88,805	5,099	5,742
Kepulauan Riau	90,582	6,546	7,227
DKI Jakarta	91,898	2,883	3,138
Jawa Barat	91,686	1,496	1,632
Jawa Tengah	80,822	2,402	2,972
DI Yogyakarta	77,744	5,030	6,470
Jawa Timur	82,494	3,398	4,119
Banten	95,584	1,878	1,965
Bali	80,184	11,271	14,056
Nusa Tenggara Barat	92,094	2,533	2,751
Nusa Tenggara Timur	89,536	2,632	2,939
Kalimantan Barat	88,370	3,795	4,294
Kalimantan Tengah	95,792	2,243	2,341
Kalimantan Selatan	84,377	6,013	7,127
Kalimantan Timur	93,997	3,672	3,907
Kalimantan Utara	82,063	7,942	9,677
Sulawesi Utara	84,679	4,035	4,765
Sulawesi Tengah	89,479	4,003	4,474
Sulawesi Selatan	90,960	2,317	2,547
Sulawesi Tenggara	93,438	3,250	3,478
Gorontalo	89,401	4,016	4,493
Sulawesi Barat	91,926	4,660	5,070
Maluku	95,748	1,495	1,561
Maluku Utara	90,251	3,579	3,965
Papua Barat	91,035	3,120	3,427
Papua	91,995	3,132	3,405
INDONESIA	89,114	0,692	0,777

Sumber: Diolah dari Susenas 2023

Lanjutan Lampiran 82

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Observasi
	Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	87,282	97,206	0,910	174
Sumatera Utara	92,392	98,456	1,612	454
Sumatera Barat	78,659	91,872	1,217	287
Riau	80,439	93,180	1,273	173
Jambi	89,751	98,719	1,028	156
Sumatera Selatan	79,705	94,095	1,565	203
Bengkulu	79,978	96,333	1,267	205
Lampung	82,025	93,820	1,587	231
Kep. Bangka Belitung	74,374	95,591	0,875	60
Kepulauan Riau	68,120	97,742	2,214	69
DKI Jakarta	84,149	96,037	1,825	112
Jawa Barat	88,243	94,187	2,018	558
Jawa Tengah	75,669	85,099	1,606	487
DI Yogyakarta	66,393	86,065	1,476	113
Jawa Timur	74,816	88,200	2,344	396
Banten	90,048	98,105	1,515	117
Bali	50,179	94,205	1,772	41
Nusa Tenggara Barat	85,483	95,840	1,438	272
Nusa Tenggara Timur	83,145	93,687	0,920	244
Kalimantan Barat	78,652	94,001	1,170	148
Kalimantan Tengah	88,436	98,546	0,760	112
Kalimantan Selatan	68,831	92,962	1,382	116
Kalimantan Timur	81,384	98,248	1,286	106
Kalimantan Utara	61,370	92,946	0,962	78
Sulawesi Utara	75,025	91,046	0,871	145
Sulawesi Tengah	78,700	95,140	1,124	136
Sulawesi Selatan	85,275	94,589	1,155	280
Sulawesi Tenggara	83,437	97,576	1,067	181
Gorontalo	78,607	95,089	0,633	59
Sulawesi Barat	76,877	97,499	0,741	52
Maluku	91,641	97,884	0,619	184
Maluku Utara	80,659	95,360	0,663	124
Papua Barat	82,757	95,552	0,570	108
Papua	83,310	96,358	1,036	279
INDONESIA	87,681	90,399	1,786	6.460

Sumber: Diolah dari Susenas 2023

Lampiran 83 Estimasi *Sampling Error* Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2022

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	19,600	5,661	28,883
Sumatera Utara	17,158	3,360	19,586
Sumatera Barat	20,590	4,030	19,574
Riau	15,139	3,725	24,606
Jambi	19,448	4,449	22,874
Sumatera Selatan	14,868	3,237	21,768
Bengkulu	16,815	3,981	23,673
Lampung	21,700	5,758	26,535
Kep. Bangka Belitung	24,399	6,805	27,892
Kepulauan Riau	32,178	9,642	29,964
DKI Jakarta	29,320	5,986	20,417
Jawa Barat	31,089	3,169	10,194
Jawa Tengah	16,460	2,217	13,468
DI Yogyakarta	19,186	4,787	24,949
Jawa Timur	28,188	3,946	13,998
Banten	14,663	4,883	33,306
Bali	30,946	7,620	24,625
Nusa Tenggara Barat	13,714	2,994	21,834
Nusa Tenggara Timur	13,866	3,237	23,345
Kalimantan Barat	22,384	4,588	20,497
Kalimantan Tengah	20,387	4,809	23,587
Kalimantan Selatan	9,258	2,937	31,722
Kalimantan Timur	12,889	5,105	39,606
Kalimantan Utara	21,220	6,394	30,130
Sulawesi Utara	29,012	5,626	19,392
Sulawesi Tengah	32,476	6,301	19,403
Sulawesi Selatan	25,397	5,286	20,813
Sulawesi Tenggara	16,399	4,917	29,983
Gorontalo	27,140	8,449	31,131
Sulawesi Barat	26,511	7,431	28,029
Maluku	15,912	4,527	28,453
Maluku Utara	20,085	5,619	27,975
Papua Barat	44,666	8,072	18,071
Papua	28,373	4,673	16,469
INDONESIA	22,975	1,060	4,612

Catatan : Warna kuning menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam penggunaan hasil estimasi

Sumber : Diolah dari Susenas 2023

Lanjutan Lampiran 83

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Observasi
	Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	10,757	33,022	1,312	174
Sumatera Utara	11,527	24,769	1,856	454
Sumatera Barat	13,787	29,597	1,245	287
Riau	9,177	23,952	1,341	173
Jambi	12,155	29,642	1,102	156
Sumatera Selatan	9,567	22,380	1,262	203
Bengkulu	10,370	26,098	0,986	205
Lampung	12,481	35,004	2,336	231
Kep. Bangka Belitung	13,538	39,947	0,857	60
Kepulauan Riau	16,635	53,010	2,039	69
DKI Jakarta	19,058	42,224	2,271	112
Jawa Barat	25,238	37,615	2,550	558
Jawa Tengah	12,560	21,276	1,573	487
DI Yogyakarta	11,474	30,306	1,483	113
Jawa Timur	21,126	36,517	2,298	396
Banten	7,402	26,969	2,289	117
Bali	18,216	47,414	1,033	41
Nusa Tenggara Barat	8,824	20,700	1,334	272
Nusa Tenggara Timur	8,645	21,499	1,002	244
Kalimantan Barat	14,665	32,614	1,088	148
Kalimantan Tengah	12,530	31,401	0,812	112
Kalimantan Selatan	4,890	16,837	0,845	116
Kalimantan Timur	5,721	26,514	1,267	106
Kalimantan Utara	11,289	36,310	0,727	78
Sulawesi Utara	19,305	41,115	0,964	145
Sulawesi Tengah	21,496	45,794	1,159	136
Sulawesi Selatan	16,459	37,038	1,736	280
Sulawesi Tenggara	8,851	28,379	1,079	181
Gorontalo	13,881	46,261	0,921	59
Sulawesi Barat	14,588	43,245	0,729	52
Maluku	8,882	26,866	1,034	184
Maluku Utara	11,232	33,299	0,770	124
Papua Barat	29,850	60,493	0,847	108
Papua	20,152	38,337	0,930	279
INDONESIA	20,964	25,118	2,024	6.460

Sumber: Diolah dari Susenas 2023

Lampiran 84 Estimasi *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	60,786	1,170	1,924
Sumatera Utara	54,522	1,089	1,997
Sumatera Barat	58,192	1,392	2,392
Riau	64,823	1,373	2,119
Jambi	65,169	1,487	2,281
Sumatera Selatan	71,240	1,199	1,683
Bengkulu	68,027	1,714	2,519
Lampung	72,601	1,201	1,654
Kep. Bangka Belitung	67,102	1,898	2,828
Kepulauan Riau	72,740	2,500	3,437
DKI Jakarta	41,170	1,763	4,281
Jawa Barat	52,006	0,840	1,615
Jawa Tengah	74,662	0,605	0,811
DI Yogyakarta	75,602	1,866	2,468
Jawa Timur	65,569	0,680	1,037
Banten	55,382	1,560	2,816
Bali	81,324	1,582	1,946
Nusa Tenggara Barat	65,989	1,532	2,322
Nusa Tenggara Timur	64,361	1,142	1,774
Kalimantan Barat	72,177	1,298	1,798
Kalimantan Tengah	69,509	1,519	2,185
Kalimantan Selatan	66,598	1,436	2,156
Kalimantan Timur	60,037	1,871	3,116
Kalimantan Utara	64,070	3,004	4,689
Sulawesi Utara	58,857	1,560	2,651
Sulawesi Tengah	54,086	1,630	3,014
Sulawesi Selatan	64,597	1,077	1,668
Sulawesi Tenggara	69,924	1,450	2,073
Gorontalo	53,363	2,328	4,363
Sulawesi Barat	75,983	1,997	2,629
Maluku	65,167	2,013	3,089
Maluku Utara	70,556	1,984	2,812
Papua Barat	59,268	2,341	3,949
Papua	70,089	1,362	1,944
INDONESIA	62,801	0,271	0,432

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Hansos 2020

Lanjutan Lampiran 84

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
	Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	58,471	63,053	0,849	2.666
Sumatera Utara	52,381	56,646	1,279	4.287
Sumatera Barat	55,442	60,893	0,989	2.294
Riau	62,086	67,465	1,167	1.686
Jambi	62,201	68,024	0,931	1.410
Sumatera Selatan	68,835	73,532	1,193	2.270
Bengkulu	64,578	71,289	0,818	1.163
Lampung	70,186	74,891	1,239	2.132
Kep. Bangka Belitung	63,281	70,709	0,785	844
Kepulauan Riau	67,576	77,358	1,331	767
DKI Jakarta	37,764	44,663	1,865	990
Jawa Barat	50,358	53,650	1,895	5.334
Jawa Tengah	73,457	75,830	1,316	6.382
DI Yogyakarta	71,762	79,072	1,408	806
Jawa Timur	64,225	66,889	1,476	6.983
Banten	52,309	58,415	1,755	1.469
Bali	78,023	84,229	1,345	1.296
Nusa Tenggara Barat	62,925	68,925	1,221	1.441
Nusa Tenggara Timur	62,093	66,567	0,815	2.511
Kalimantan Barat	69,564	74,649	0,987	1.752
Kalimantan Tengah	66,453	72,402	0,864	1.487
Kalimantan Selatan	63,727	69,351	1,021	1.703
Kalimantan Timur	56,321	63,641	1,149	1.076
Kalimantan Utara	57,997	69,724	0,784	450
Sulawesi Utara	55,768	61,878	0,790	1.673
Sulawesi Tengah	50,879	57,259	0,888	1.378
Sulawesi Selatan	62,459	66,679	1,025	3.187
Sulawesi Tenggara	67,009	72,687	0,784	1.431
Gorontalo	48,784	57,886	0,802	680
Sulawesi Barat	71,854	79,677	0,829	664
Maluku	61,125	69,002	0,809	1.070
Maluku Utara	66,525	74,290	0,717	869
Papua Barat	54,613	63,763	0,675	807
Papua	67,353	72,689	0,878	2.322
INDONESIA	62,268	63,331	1,456	67.280

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Hansos 2020

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id

ISSN 2089-5291



9 772089 529000